



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan laporan kinerja SKPD, Gubernur/ Bupati/ Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang disusun ini merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan segala kritik serta saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

↳ Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ↳


Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan laporan kinerja SKPD, Gubernur/ Bupati/ Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang disusun ini merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan segala kritik serta saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, memiliki target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Indeks	90,00	99,87	110,97%
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persen	93,29	100	107,19 %
3	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	Pengguna	100,00	105,38	105,38%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91,00	95,62	105,08%

Selain dari itu terdapat beberapa indikator lainnya yang berasal dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebanyak 6 (enam) Indikator, Sasaran Khusus sebanyak 7 (tujuh) indikator dan dari Sasaran Operasional sebanyak 3 (tiga) Indikator.

Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 berasal dari Tujuan dan Sasaran Dinas, sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2017-2022, dimana didukung oleh 4 (empat) Program Prioritas dan 1 (satu) Program Penunjang.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	59.336.481.504	59.066.271.695	99,54%
2	Program Pencatatan Sipil	5.078.961.799	4.618.421.274	90,93%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	255.244.862	252.327.096	98,86%
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	231.068.617	226.113.790	97,86%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	256.505.949.683	238.194.477.980	92,86%
	TOTAL	321.407.706.465	302.357.611.835	94,07%

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat	4
C. Kedudukan.....	4
D. Tugas dan dan Fungsi (sampai tingkat kepala Dinas)	4
E. Struktur Organisasi	6
F. Aspek Strategis Organisasi	8
G. Sumber Daya Manusia	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja.....	15
C. Tujuan dan Sasaran.....	17
D. Anggaran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja	20
B. Analisis Capaian Kinerja	23
1. Capaian Sasaran Strategis dari Tujuan dan Sasaran Dinas.....	23
2. Capaian Sasaran Strategis dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	72
3. Capaian Sasaran Khusus	84
4. Capaian Sasaran Operasional.....	95
C. Realisasi Anggaran.....	112
BAB IV PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
LAMPIRAN	139
Lampiran I : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	139
Lampiran II : Inovasi	142
Lampiran III : Penghargaan	151
Lampiran IV : Dokumentasi Layanan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pegawai Menurut Golongan	10
Tabel 1.2.	Pegawai Menurut Pendidikan	11
Tabel 1.3.	Pegawai Menurut Usia	11
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	18
Tabel 2.3.	Anggaran Belanja Tahun 2022.....	19
 Tabel 3.1.	Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tahun 2022	20
Tabel 3.2.	Realisasi Anggaran Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tahun 2022	22
Tabel 3.3.	Realisasi IKM Dinas Dukcapil Tahun 2022 berdasarkan Nilai Kepuasan Layanan Eksternal.....	24
Tabel 3.4.	Realisasi IKM Dinas Dukcapil Tahun 2022 berdasarkan Nilai Kepuasan Layanan Internal.....	24
Tabel 3.5.	Realisasi IKM Tahun 2022 per Kota/ Kabupaten	26
Tabel 3.6.	Realisasi IKM Tahun 2022 per Kota/ Kabupaten	26
Tabel 3.7.	Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindo Tahun 2022	28
Tabel 3.8.	Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Wilayah Tahun 2022.....	29
Tabel 3.9.	Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022	29
Tabel 3.10.	Realisasi Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Wilayah Tahun 2022	30
Tabel 3.11.	Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Kecamatan Tahun 2022	31
Tabel 3.12.	Realisasi Cakupan Kepemilikan KK Per Wilayah Tahun 2022	32
Tabel 3.13.	Cakupan Kepemilikan KK per Kecamatan Tahun 2022	32
Tabel 3.14.	Realisasi Cakupan Kepemilikan KIA Per Wilayah Tahun 2022	34
Tabel 3.15.	Cakupan Kepemilikan KIA per Kecamatan Tahun 2022	34
Tabel 3.16.	Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Wilayah Tahun 2022.....	36
Tabel 3.17.	Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Kecamatan Tahun 2022	37
Tabel 3.18.	Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Wilayah Tahun 2022	38
Tabel 3.19.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan Tahun 2022	38
Tabel 3.20.	Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Wilayah Tahun 2022	40
Tabel 3.21.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Kecamatan Tahun 2022	40
Tabel 3.22.	Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Wilayah Tahun 2022	41
Tabel 3.23.	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Tahun 2022	42
Tabel 3.24.	Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Wilayah Tahun 2022.....	43
Tabel 3.25.	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan Tahun 2022	43
Tabel 3.26.	Rekapitulasi Realisasi KAMSA Tahun 2022	45
Tabel 3.27.	Rekapitulasi Realisasi KAMSA 4 Cakupan Tahun 2022	46
Tabel 3.28.	Rekap Pemanfaatan Data Tahun 2022.....	51
Tabel 3.29.	Rekap Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022	56
Tabel 3.30.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Dinas Dukcapil DKI Jakarta	57
Tabel 3.31.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Pusat.....	59
Tabel 3.32.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Utara	61
Tabel 3.33.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Barat	62
Tabel 3.34.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Selatan.....	64
Tabel 3.35.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Timur	66
Tabel 3.36.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Kepulauan Seribu	67
Tabel 3.37.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada UPTIK	69

Tabel 3.38.	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada UPAK.....	70
Tabel 3.39.	Tersedianya Data PBI JK dan PBPU dan BP dan data kepesertaan BPJS yang valid KSD 12 Tahun 2022.....	72
Tabel 3.40.	Tersedianya Data PBI JK dan PBPU dan BP dan data kepesertaan BPJS yang valid KSD 12 Tahun 2022.....	73
Tabel 3.41.	KSD 29 Tahun 2022 - Tersusunnya data agregat kependudukan per RW semester 1	74
Tabel 3.42.	KSD 39 Tahun 2022 - Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026.....	75
Tabel 3.43.	KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023)	76
Tabel 3.44.	KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya Evaluasi Renja dan Evaluasi Perkin TW 4 Tahun 2021.....	77
Tabel 3.45.	KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya Evaluasi Renja dan Evaluasi Perkin TW I, II & III Tahun 2022.....	77
Tabel 3.46.	KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya LKIP Tahun 2021.....	78
Tabel 3.47.	KSD 39 Tahun 2022 – Rancangan Dokumen Perkin dan SKP Tahun 2023	79
Tabel 3.48.	KSD 42 Tahun 2022	80
Tabel 3.49.	KSD 61 – Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.....	81
Tabel 3.50.	KSD 61 – Pengawasan APIP Tahun 2022.....	83
Tabel 3.51.	KSD 63 – SPBE Tahun 2022	84
Tabel 3.52.	Pelaksanaan e-Order Tahun 2022	86
Tabel 3.53.	Realisasi TL Arahan Gubernur Tahun 2022.....	95
Tabel 3.54.	Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022.....	96
Tabel 3.55.	Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022.....	97
Tabel 3.56.	Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2022.....	98
Tabel 3.57.	Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022.....	99
Tabel 3.58.	Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya	105
Tabel 3.59.	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.....	107
Tabel 3.60.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional	108
Tabel 3.61.	Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional	109
Tabel 3.62.	Realisasi Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2022	112
Tabel 3.63.	Realisasi Program Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	113
Tabel 3.64.	Realisasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2022	113
Tabel 3.65.	Realisasi Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2022	114
Tabel 3.66.	Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2022	115
Tabel 3.67.	Rekapitulasi Realisasi Program Tahun 2022	116
Tabel 3.68.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tahun 2022	117
Tabel 3.69.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2022	120
Tabel 3.70.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Utara Tahun 2022.....	122
Tabel 3.71.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Barat Tahun 2022.....	124
Tabel 3.72.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2022	126
Tabel 3.73.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Timur Tahun 2022.....	129
Tabel 3.74.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kab Adm Kepulauan Seribu Tahun 2022	131
Tabel 3.75.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada UPTIK Tahun 2022.....	133
Tabel 3.76.	Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada UPAK Tahun 2022	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil DKI Jakarta	8
Gambar 3.1.	Hasil SKM Tahun 2022 per Triwulan.....	25
Gambar 3.2.	Screenshot Upload Dokumen LKIP 2021 pada system esr.menpan.go.id	79
Gambar 3.3.	WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	85
Gambar 3.4.	Strategi Komunikasi Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta	87
Gambar 3.5.	Laporan Publikasi Strategi Komunikasi.....	89
Gambar 3.6.	Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022.....	90
Gambar 3.7.	Perbandingan Penilaian SAKIP 2020 dan 2021.....	91
Gambar 3.8.	Bobot Penilaian PMPRB Tahun 2022	92
Gambar 3.9.	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2021	92
Gambar 3.10.	Perhitungan e-Office Tahun 2022	93
Gambar 3.11.	Nota Dinas Penggunaan e-Produk Hukum Tahun 2022	94
Gambar 3.12.	Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022	97
Gambar 3.13.	Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022	98
Gambar 3.14.	Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2022	99
Gambar 3.15.	Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2022.....	100
Gambar 3.16.	Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan I 2022	101
Gambar 3.17.	Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan II 2022	102
Gambar 3.18.	Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan III 2022	103
Gambar 3.19.	Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan IV 2022	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Wujud pertanggungjawaban SKPD atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan perjanjian kinerja ini juga merupakan upaya berbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara serta peran strategisnya sebagai pusat dari berbagai aktifitas seperti pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain telah menjadikan DKI Jakarta berkembang sebagai kota megapolitan yang maju dan modern dengan tingkat pertumbuhan, pendapatan regional dan modernitas yang tertinggi di Indonesia. Namun demikian, sebaliknya, DKI Jakarta yang mempunyai citra sebagai kota yang bertabur sejuta gemerlap keindahan (*the city with million charms*) ini juga harus menanggung konsekuensi untuk menjadi wilayah yang paling sarat dengan beban kompleksitas permasalahan dan persoalan bila dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pangkal timbulnya permasalahan perkotaan lainnya adalah masalah kepadatan penduduk akibat jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta yang terus bertambah dengan besaran yang jauh melebihi ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimiliki DKI Jakarta. Ketidakmampuan wilayah DKI Jakarta untuk terus-menerus menyerap dan menampung para pendatang pada akhirnya memunculkan persoalan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di wilayah DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 661,52 km², termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, yakni: Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan

luas 187,73 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas wilayah 11,81 km².

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu penduduk dengan jumlah kepadatan terbesar di Indonesia. Luas wilayah DKI Jakarta adalah 661,52 km². Jumlah Penduduk DKI Jakarta sebanyak 11.249.585 jiwa pada Juni 2022 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 7,96 juta jiwa atau 70,77% penduduk di provinsi tersebut merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Terdapat pula 2,71 juta jiwa (24,12%) adalah kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan 575 ribu jiwa (5,11%) merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini telah mencapai 17.013,12 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di DKI Jakarta ada di Jakarta Pusat. Sebagai kota pusat pemerintahan, Jakarta Pusat hanya memiliki luas 47,56 km persegi atau 7,3 persen dari luas DKI Jakarta. Dengan luas itu, Jakarta Pusat menampung 1.105.731 penduduk. Sehingga kepadatan penduduknya mencapai 23.249,18 jiwa/km persegi. Bila kita bandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk di DKI Jakarta, maka terdapat 3 wilayah yang kepadatan penduduknya diatas rata-rata, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang serta pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan baik melalui pembinaan penduduk (Biduk) bekerjasama dengan daerah anggota Mitra Praja Utama (MPU) yakni Pemerintah Provinsi diseluruh pulau Jawa ditambah pulau Bali, Lampung dan NTB maupun BODETABEKJUR.

Data Penduduk DKI Jakarta

Berdasarkan data per- Juni 2022 (Semester I Tahun 2022), ***jumlah penduduk WNI Provinsi DKI Jakarta adalah 11.249.585 jiwa***, dengan rincian per wilayah sebagai berikut :

NAMA_KAB	JUMLAH PENDUDUK WNI			JUMLAH KK			JML WKTP
	L	P	L+P	L	P	L+P	
KEP. SERIBU	15.043	14.676	29.719	7.369	1.402	8.771	20.649
JAKARTA PUSAT	555.089	550.642	1.105.731	286.017	98.486	384.503	834.065
JAKARTA UTARA	940.044	925.603	1.865.647	475.410	135.513	610.923	1.350.714
JAKARTA BARAT	1.302.548	1.287.041	2.589.589	660.623	175.814	836.437	1.903.498
JAKARTA SELATAN	1.190.508	1.193.675	2.384.183	607.481	170.216	777.697	1.766.508
JAKARTA TIMUR	1.642.684	1.632.032	3.274.716	834.638	219.486	1.054.124	2.385.662
PROV DKI JAKARTA	5.645.916	5.603.669	11.249.585	2.871.538	800.917	3.672.455	8.261.096

Sebagai perbandingan, ***jumlah penduduk WNI Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah 11.261.595 jiwa***, terdapat laju penurunan -0,17%.

B. Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/ kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2022 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tahun yang akan datang.

C. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 85 tahun 2019 pada bab II (pasal 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. Tugas dan Fungsi (sampai tingkat kepala Dinas)

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 85 tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar telmis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan;
6. Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan;
7. Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
8. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan;
9. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;
10. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum;
11. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
12. Penyusunan profil kependudukan;
13. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil;
14. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
16. Perawatan prasarana dan sarana kelja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
18. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
19. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
22. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala UPT yang bekerja sesuai dengan lingkup tugasnya serta 6 (enam) Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Kepegawaian
 - c. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
 - d. Subbagian Keuangan
- Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk
 - c. Seksi Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Pengelolaan Dokumen Akta Pencatatan Sipil
- Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Vital Kependudukan
 - b. Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data
 - c. Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi
- Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan
 - b. Seksi Pengawasan dan Penindakan
 - c. Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, susunan organisasi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Suku Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Seksi Data, Informasi dan Pengawasan

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, susunan organisasi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Suku Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- d. Seksi Data, Informasi dan Pengawasan
- e. Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
- f. Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

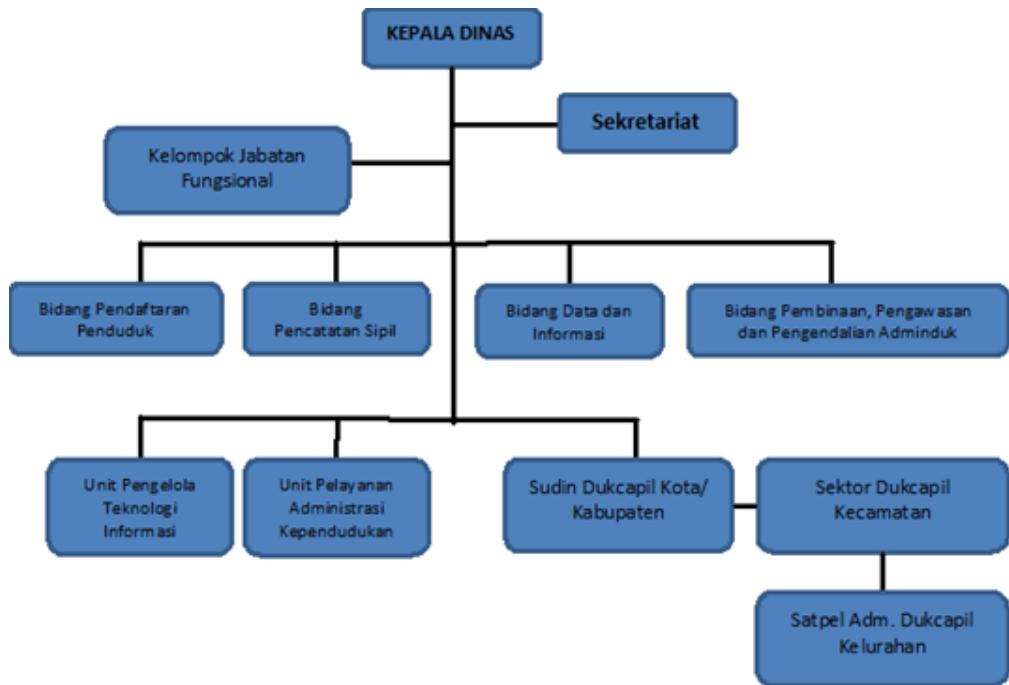
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) susunan organisasi UPTIK terdiri dari:

- a. Kepala Unit
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database
- d. Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan
- e. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah
- f. Sub kelompok Jabatan Fungsional

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (UPAK), susunan organisasi UPAK, terdiri dari:

- a. Kepala Unit
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Satuan Pelaksana Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan
- f. Sub kelompok Jabatan Fungsional

Untuk selengkapnya, bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil DKI Jakarta

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan secara operasional bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati yang bersangkutan. Suku Dinas mempunyai Tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (*Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 Pasal 33 ayat (1)*).

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Meskipun secara struktural Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 menempatkan Kelompok Jabatan Fungsional dalam struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, namun sampai saat ini belum ada Pegawai dengan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

F. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, khususnya yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengendalian mobilitas penduduk dan

penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan aspek strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang pendaftaran penduduk, antara lain berupa penerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS)
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan
- e. Surat-surat kependudukan lainnya

Dalam rangka kepastian hukum terkait dengan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan di bidang pencatatan sipil dengan menerbitkan Akta-akta Catatan Sipil bagi mereka yang mengalami peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai, pengakuan anak, pengangkatan dan pengesahan anak, dll.) di DKI Jakarta.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

G. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 31 Desember 2022 berjumlah 382 Orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Ditinjau berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebanyak 302 orang (79,06%) dari total pegawai atau sebanyak 393 orang. Urutan kedua terbesar adalah Golongan II sebanyak 44 orang (11,60%) yang sebagian besar merupakan lulusan D3. Data ini menunjukkan 90,58% pegawai berada pada golongan II dan III sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki Disdukcapil dan perlu dikembangkan

melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1.1. Pegawai Menurut Golongan

No	Wilayah	Golongan				Jumlah	%
		I	II	III	IV		
1	Dinas	1	5	40	10	56	14,66%
2	JP	0	4	32	6	42	10,99%
3	JU	0	5	30	3	38	9,95%
4	JB	0	5	51	2	58	15,18%
5	JS	0	13	55	5	73	19,11%
6	JT	0	6	65	7	78	20,42%
7	KS	0	1	12	0	13	3,40%
8	UPTIK	0	3	10	0	13	3,40%
9	UPAK	0	2	7	2	11	2,88%
TOTAL		1	44	302	35	382	
		0,26%	11,52%	79,06%	9,16%		

2. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan proporsi: S1 sebesar 63,87 persen, S2 sebesar 11,78 persen. Dengan kata lain, 75,65 persen pegawai Dinas Dukcapil adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal pelayanan masyarakat terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukan permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara, 7,33 persen adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma 3, dimana kebanyakan dari mereka adalah PNS yang diangkat antara tahun 2010-2021 yang berarti masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sedangkan sebanyak 17,02 persen pegawai berpendidikan SMP sampai dengan SMA. Pegawai yang berpendidikan SMP sebanyak 1 orang (0,26%), SMA sebanyak 64 orang (16,75%). Jumlah pegawai Dinas Dukcapil pada saat ini mengalami kekurangan terutama pada tingkat kelurahan, sehingga belum dapat dikatakan bahwa pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1.2. Pegawai Menurut Pendidikan

No	Wilayah	Pendidikan							Jumlah	%
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
1	Dinas	-	13	32	5	5	1		56	14,66%
2	JP	-	8	24	2	8	-		42	10,99%
3	JU	-	4	26	3	5	-		38	9,95%
4	JB	-	3	40	4	11	-		58	15,18%
5	JS	-	6	44	7	16	-		73	19,11%
6	JT	-	9	53	2	14	-		78	20,42%
7	KS	-	-	10	-	3	-		13	3,40%
8	UPTIK	-	-	9	3	1	-		13	3,40%
9	UPAK	-	2	6	2	1	-		11	2,88%
	TOTAL	-	45	244	28	64	1		382	
		0%	11,78%	63,87%	7,33%	16,75%	0,26%	0%		

3. Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 40-49 tahun, yaitu 33,77% atau 129 orang. Kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur di bawah 20-29 tahun, yaitu hanya sebesar 5,50% atau sebanyak 21 orang.

Table di bawah menunjukkan bahwa dalam 2 tahun (2023-2025) yang akan datang terdapat 34 orang atau 8,90% pegawai yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2023-2026.

Tabel 1.3. Pegawai Menurut Usia

No	Wilayah	Rentan Usia					Jumlah	%
		(20-29)	(30-39)	(40-49)	(50-55)	(56-60)		
1	Dinas	13	23	13	6	1	56	14,66%
2	JP	1	17	9	10	5	42	10,99%
3	JU	2	9	13	10	4	38	9,95%
4	JB	2	17	24	10	5	58	15,18%
5	JS	1	19	25	18	10	73	19,11%
6	JT	1	16	36	18	7	78	20,42%
7	KS	0	1	3	8	1	13	3,40%
8	UPTIK	0	11	2	0	0	13	3,40%
9	UPAK	1	4	4	1	1	11	2,88%
	TOTAL	21	117	129	81	34	382	
		5,50%	30,63%	33,77%	21,20%	8,90%		

H. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permepan Nomor 53 Tahun 2014, LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV : LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022.

Visi - Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta

a. Visi

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 - 2022 pada waktu kampanye menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta 2017 - 2022. Melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan bottom up dan top down, maka visi Provinsi DKI Jakarta 2017 - 2022 adalah:

“Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun misi RPJMD DKI Jakarta adalah:

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

e. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

”Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Gubernur DKI Jakarta, mengingat sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah Penduduk DKI Jakarta yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

B. Perjanjian Kinerja

Pada tanggal 6 Februari 2022 telah ditandatangai Perjanjian Kinerja antara Gubernur DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang isinya antara lain :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
	Sasaran Strategis			
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	90	Indeks
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	93,29	Persen
		Persentase Kampung Sadar Adminduk (Kamsa)	100	Persen
3	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	100	Persen
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	Persen

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Percentase penyelesaian rencana aksi Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42)	100	Persen
		Percentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100	Persen
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Percentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100	Persen
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Percentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100	Persen
		Percentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100	Persen
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Percentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	100	Persen
Sasaran Khusus				
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	Predikat
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Percentase Pemanfaatan E-Order	100	Persen
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Percentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100	Persen
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	Predikat
13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	Nilai

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
14	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100	Persen
15	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100	Persen
Sasaran Operasional				
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Percentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persen
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Percentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Percentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persen

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2017 - 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan Memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk.

b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan.
- 2) Peningkatan pelayanan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk	Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	65	70	86	88	90
				Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	59,30	67,10			
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	59,30	67,10	91.67	96.67	100.00
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			69.25	82.50	88.25
	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	0%	0%	100%	100%	100%
				Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data	-	40	60	80	100
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	-	48	72	96	120

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap mengenai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab III Laporan ini.

D. Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, besaran anggaran pada PD/UKPD di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 2.3. Anggaran Belanja Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	59.470.726.672	59.336.481.504
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	5.127.304.399	5.078.961.799
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	255.244.862	255.244.862
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	246.305.587	231.068.617
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	294.120.518.708	256.505.949.683
	JUMLAH		359.220.100.228	321.407.706.465

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian kinerja menunjukkan kontribusi dari seluruh jajaran Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan selama tahun 2022.

Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (*tiga*) jenis sasaran yaitu:

- Sasaran Strategis
- Sasaran Khusus
- Sasaran Operasional

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis						
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Indeks	90	99,87	110,97%
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persen	93,29	100,00	107,19%
		Persentase Kampung Sadar Adminduk (Kamsa)	Persen	100	111,99	111,99%
3	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	Persen	100	105,38	105,38%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91	93,80	103,08%
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42)	Persen	100	100	100,00%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	Persen	100	100	100,00%
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	Persen	100	100	100,00%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	Persen	100	100	100,00%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	Persen	100	100	100,00%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	Persen	100	100	100,00%
Sasaran Khusus						
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100,00%
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	100	100,00%
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persen	100	100	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	AA (91)	(AA) 97,56	107,21%
13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai	95	99,33	104,56%
14	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Per센	100	100	100,00%
15	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Per센	100	100	100,00%
Sasaran Operasional						
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Percentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Per센	100	100	100,00%
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Percentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Per센	100	100	100,00%
18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Percentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Per센	100	100	100,00%

Untuk mencapai Target yang telah ditetapkan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung dengan 4 (empat) Program Prioritas dan 1 (satu) Program penunjang sebagai berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	59.336.481.504	59.066.271.695	99,54%
2	Program Pencatatan Sipil	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	5.078.961.799	4.618.421.274	90,93%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	255.244.862	252.327.096	98,86%
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Percentase tersusunnya profil kependudukan	231.068.617	226.113.790	97,86%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	indeks kepuasan pelayanan kantor	256.505.949.683	238.194.477.980	92,86%
	TOTAL ANGGARAN		321.407.706.465	302.357.611.835	94,07%

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Data seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga dikumpulkan dengan instrumen yang telah tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaianya dengan hasil analisis.

Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap kriteria penilaian. Analisis ini dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada setiap kriteria. Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis dari Tujuan dan Sasaran Dinas

Sasaran Strategis pada Perkin Tahun 2022 terdiri atas Indikator Tujuan dan Sasaran serta Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah disepakati oleh para Kepala Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1, dari tabel di atas dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk (Target 90,00%, Realisasi 99,87%)

Indikator ini merupakan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Kependudukan” perhitungan IKM didapatkan dari Rata-rata Indeks survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan dukcapil dengan ruang lingkup kepuasan layanan dukcapil secara eksternal oleh masyarakat dan layanan dukcapil internal secara bertingkat (Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas dan Dinas), Pejabat Administrator yang mengampu Indikator ini yaitu: Para Kepala Bidang Dinas, Para Kepala UPT dan Para Kepala Suku Dinas. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017. Pelaksanaannya dengan melakukan survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan dukcapil yang dilakukan di loket-loket pelayanan dan instansi pengguna data base kependudukan, target yang ingin dicapai secara keseluruhan baik dari tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten dan Kecamatan pada Tahun 2022 ini sebesar 90 Indeks.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan survey yang terselenggara atas kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik serta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dengan hasil 99,87 untuk tingkat Provinsi, sedangkan untuk tingkat kota kabupaten sebagaimana data berikut:

Target tahun 2022 sebesar 90 Indeks tercapai sebesar 99,87 Indeks atau dengan capaian Kinerja pada sebesar (110,97).

Tabel 3.3. Realisasi IKM Dinas Dukcapil Tahun 2022 berdasarkan Nilai Kepuasan Layanan Eksternal

Indikator	Variabel	Nilai Kepuasan Variabel
PERSYARATAN PELAYANAN	Persyaratan pelayanan mudah dipahami oleh masyarakat dan sudah sesuai dengan yang diinformasikan	99,92
PROSEDUR	Prosedur dalam mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan cukup mudah dipahami	99,91
WAKTU PELAYANAN	Waktu penyelesaian Dokumen cukup cepat dan sesuai dengan yang dijanjikan	99,91
BIAYA	Seluruh layanan administrasi kependudukan gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali dalam pengurusan dokumen kependudukan	99,94
SPESIFIKASI PRODUK LAYANAN	Produk layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan	99,88
KOMPETENSI PELAKSANA	Petugas Dukcapil mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan	99,88
PERILAKU PELAKSANA	Petugas Dukcapil mampu memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada masyarakat	99,88
SARANA DAN PRASARANA	Kualitas sarana kerja (komputer/printer/alat perekaman KTP) di loket layanan Dukcapil sudah sangat baik	99,82
PENANGANAN PENGADUAN	Penanganan pengaduan yang disampaikan sudah cukup baik	98,73
NILAI AKHIR		99,87

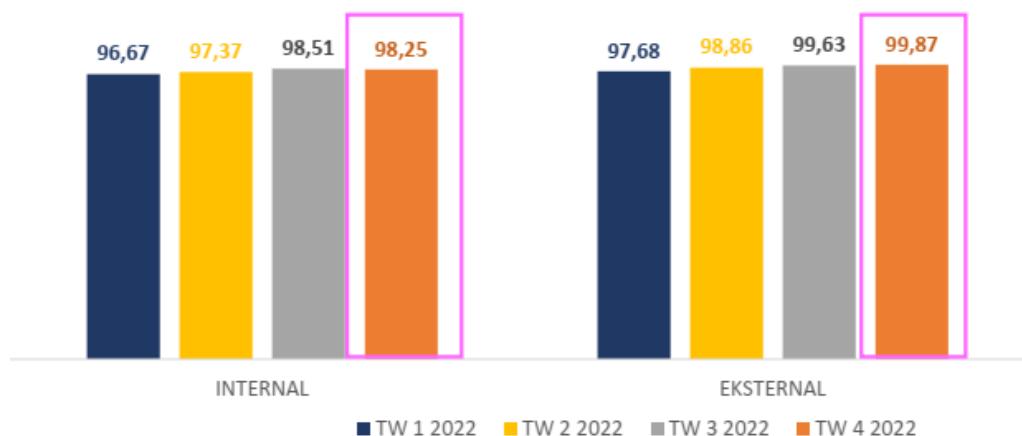
Nilai tertinggi berada pada indikator biaya (99,94) sedangkan nilai terendah ada pada indikator penanganan pengaduan (99,73). Nilai ini didapatkan dari Survey Eksternal yaitu survey yang dilakukan kepada penerima layanan Dukcapil.

Tabel 3.4. Realisasi IKM Dinas Dukcapil Tahun 2022 berdasarkan Nilai Kepuasan Layanan Internal

INDIKATOR	VARIABEL	NILAI KEPUASAN
PERSYARATAN PELAYANAN	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil memahami peraturan administrasi kependudukan yang berlaku serta memahami persyaratan dalam pengurusan layanan administrasi kependudukan	98,57
PROSEDUR	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil memahami mekanisme dan prosedur layanan-layanan yang	98,68

INDIKATOR	VARIABEL	NILAI KEPUASAN
	ada di Disdukcapil, baik layanan administrasi kependudukan maupun layanan lainnya	
WAKTU PELAYANAN	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil sangat menghargai waktu dalam bekerja	98,36
BIAYA/TARIF	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil tidak pernah meminta uang kepada bawahan dalam pengurusan apapun, baik terkait pengurusan layanan administrasi kependudukan maupun pengurusan lainnya seperti urusan kepegawaian dll	98,36
PRODUK LAYANAN	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil memahami spesifikasi produk- produk layanan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil	98,68
KOMPETENSI PELAKSANA	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil memiliki kompetensi dan keterampilan komunikasi yang memadai	97,92
PERILAKU PELAKSANA	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil ramah dan sopan baik kepada masyarakat maupun kepada sesama pegawai	98,25
SARANA DAN PRASARANA	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil memelihara perlengkapan sarana kerja dengan baik dan terjaga	97,81
PENANGANAN PENGADUAN	Pegawai/Pejabat Dinas Dukcapil cepat dan tepat dalam merespon pengaduan dan keluhan dari bawahannya, baik mengenai persoalan pelayanan maupun keluhan lainnya	97,59
NILAI AKHIR		98,25

Nilai tertinggi berada pada indikator Prosedur dan Produk Layanan dengan nilai 98,68 sedangkan nilai terendah ada pada indikator Penanganan Pengaduan dengan nilai sebesar 97,59.



Gambar 3.1. Hasil SKM Tahun 2022 per Triwulan

- Secara umum nilai kepuasan Pelayanan Internal Disdukcapil Triwulan 4 tahun 2022 (98,25) turun sekitar 0,26 poin dibandingkan nilai Triwulan 3 2022 (98,51)
- Secara umum IKM layanan Eksternal Triwulan 4 2022 di tingkat kelurahan bernilai 99,87, naik sebesar 0,24 poin dibandingkan dengan nilai Triwulan 3 2022 (99,63).

Tabel 3.5. Realisasi IKM Tahun 2022 per Kota/ Kabupaten

No	Kota	Jumlah Target	Jumlah Responden	Rata – Rata IKM
1	Kepulauan Seribu	42	53	99,95
2	Jakarta Pusat	916	970	99,91
3	Jakarta Utara	711	826	99,95
4	Jakarta Barat	1.266	1.487	100,00
5	Jakarta Selatan	1.473	1.646	99,81
6	Jakarta Timur	1.647	1.845	99,78
	DKI Jakarta	6.055	6.827	99,87

Sedangkan untuk capaian IKM Per Kecamatan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.6. Realisasi IKM Tahun 2022 per Kota/ Kabupaten

Kota/Kab	Kecamatan	Target	Jml Responden	Rata-rata IKM
Kep.Seribu	Kep. Seribu Utara	24	30	99,91
Kep.Seribu	Kep. Seribu Selatan	18	23	100,00
Jakarta Pusat	Gambir	104	111	100,00
Jakarta Pusat	Sawah Besar	98	115	100,00
Jakarta Pusat	Kemayoran	187	191	99,84
Jakarta Pusat	Senen	128	134	99,71
Jakarta Pusat	Cempaka Putih	75	83	100,00
Jakarta Pusat	Menteng	64	71	100,00
Jakarta Pusat	Tanah Abang	158	162	99,90
Jakarta Pusat	Johar Baru	102	103	99,97
Jakarta Utara	Penjaringan	111	133	100,00
Jakarta Utara	Tanjung Priok	164	198	99,92
Jakarta Utara	Koja	133	149	99,87
Jakarta Utara	Cilincing	161	180	100,00
Jakarta Utara	Pademangan	79	88	100,00
Jakarta Utara	Kelapa Gading	63	78	99,89
Jakarta Barat	Cengkareng	156	199	100,00
Jakarta Barat	Grogol Petamburan	158	176	100,00
Jakarta Barat	Taman Sari	143	160	100,00
Jakarta Barat	Tambora	230	270	100,00
Jakarta Barat	Kebon Jeruk	169	186	100,00
Jakarta Barat	Kali Deres	133	168	100,00
Jakarta Barat	Palmerah	146	169	100,00

Kota/Kab	Kecamatan	Target	Jml Responden	Rata-rata IKM
Jakarta Barat	Kembangan	131	159	100,00
Jakarta Selatan	Tebet	179	179	100,00
Jakarta Selatan	Setia Budi	132	147	99,75
Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	100	125	99,96
Jakarta Selatan	Pasar Minggu	159	177	100,00
Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	163	176	99,92
Jakarta Selatan	Cilandak	130	155	99,98
Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	172	200	98,74
Jakarta Selatan	Pancoran	128	149	100,00
Jakarta Selatan	Jagakarsa	177	185	100,00
Jakarta Selatan	Pesanggrahan	133	153	100,00
Jakarta Timur	Matraman	148	173	99,34
Jakarta Timur	Pulo Gadung	163	184	100,00
Jakarta Timur	Jatinegara	200	220	100,00
Jakarta Timur	Kramat Jati	186	193	100,00
Jakarta Timur	Pasar Rebo	123	139	99,78
Jakarta Timur	Cakung	187	213	99,84
Jakarta Timur	Duren Sawit	171	197	100,00
Jakarta Timur	Makasar	129	145	99,94
Jakarta Timur	Ciracas	131	139	99,76
Jakarta Timur	Cipayung	209	242	99,20
Jumlah		6.055	6.827	99,87

Kesimpulan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

1. Tingkat kepuasan Disdukcapil baik di eksternal maupun internal tergolong sangat baik (nilai mutu A).
2. Layanan internal bernilai **98,25 turun 0,26 poin** dari triwulan 3 tahun 2022. Sedangkan layanan eksternal di tingkat kelurahan bernilai **99,87 naik 0,24 poin** dari triwulan 3 tahun 2022.
3. Nilai tertinggi pada layanan **Internal** berada pada indikator **Prosedur dan Produk Layanan** dengan nilai **99,68**, sedangkan nilai terendah adalah indikator **Penanganan Pengaduan** dengan nilai **97,59**. Untuk layanan **Eksternal**, nilai tertinggi berada pada indikator **Biaya** dengan nilai **99,94**, sedangkan nilai terendah adalah indikator **Penanganan pengaduan** dengan nilai sebesar **99,73**.
4. Semua kelurahan di Triwulan ini mendapatkan nilai **mutu A (> 88,30)**. Walaupun pelayanan secara keseluruhan sudah sangat baik, ada beberapa masukan dan saran untuk pelayanan di kelurahan perihal peningkatan mutu layanan dan penambahan fasilitas.

b. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk (Target 93,29%, Realisasi 100%)

Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk ini terdiri atas dua Indikator yang terdapat dalam Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil dengan Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Target tahun 2022 sebesar 93,29% dengan realisasi pada indikator ini sebesar 100% (Capaian 107,19%), tercapainya indikator ini dikarenakan beberapa hal ini salah satunya karena tinggi nya mobilitas penduduk di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.7. Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk Tahun 2022

No	Dokumen	Target	Realisasi	%
1	KTP-el	8.261.096	8.260.039	100,0%
2	KK	3.654.480	3.654.480	100,0%
3	KIA	3.074.586	3.074.586	100,0%
4	Akta Kelahiran	3.234.646	3.234.645	100,0%
5	Akta Kematian	93.921	93.921	100,0%
6	Akta Perkawinan	13.996	13.996	100,0%
7	Akta Perceraian	1.847	1.847	100,0%
	Rata-rata			99,82%

Adapun komponen pendukung indikator diatas antara lain :

1) Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Indikator ini merupakan target dari Program Pendaftaran Penduduk dengan cara perhitungan Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen: KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100% Hasil akhir persentase rata-rata).

Indikator Ini diampu oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala UPTIK dan Para Kepala Suku Dinas, target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Adapun realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebesar 100% (100%), adapun rincian realisasi dari target kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Target Kepemilikan Dokumen Dafduk	Realisasi Kepemilikan Dokumen Dafduk	Capaian
1	Kepulauan Seribu	100%	100%	100%
2	Jakarta Pusat	100%	100%	100%
3	Jakarta Utara	100%	100%	100%
4	Jakarta Barat	100%	100%	100%
5	Jakarta Selatan	100%	99,99%	99,99%
6	Jakarta Timur	100%	99,99%	99,99%
	Prov. DKI Jakarta	100%	100%	100%

Adapun Realisasi Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Target Kepemilikan Dokumen Dafduk	Realisasi Kepemilikan Dokumen Dafduk	Capaian
1	Kepulauan Seribu	Kep.Seribu Utara	100,00%	100,00%	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Selatan	100,00%	100,00%	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	100,00%	100,00%	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	100,00%	100,00%	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	100,00%	100,00%	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	100,00%	100,00%	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	100,00%	100,00%	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	100,00%	100,00%	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	100,00%	100,00%	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	100,00%	100,00%	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	100,00%	100,00%	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	100,00%	100,00%	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	100,00%	100,00%	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	100,00%	100,00%	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	100,00%	100,00%	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	100,00%	100,00%	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	100,00%	100,00%	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	100,00%	100,00%	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	100,00%	100,00%	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	100,00%	100,00%	100,00%
21	Jakarta Barat	KebonJeruk	100,00%	100,00%	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	100,00%	100,00%	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Target Kepemilikan Dokumen Dafduk	Realisasi Kepemilikan Dokumen Dafduk	Capaian
23	Jakarta Barat	Palmerah	100,00%	100,00%	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	100,00%	100,00%	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	100,00%	100,00%	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	100,00%	100,00%	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	100,00%	100,00%	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	100,00%	99,98%	99,98%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	100,00%	100,00%	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	100,00%	100,00%	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	100,00%	100,00%	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	100,00%	100,00%	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	100,00%	99,99%	99,99%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	100,00%	100,00%	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	100,00%	99,97%	99,97%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	100,00%	100,00%	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	100,00%	99,96%	99,96%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	100,00%	100,00%	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	100,00%	99,99%	99,99%
40	Jakarta Timur	Cakung	100,00%	100,00%	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	100,00%	100,00%	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	100,00%	99,96%	99,96%
43	Jakarta Timur	Ciracas	100,00%	100,00%	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	100,00%	100,00%	100,00%
Prov. DKI Jakarta			100,00%	100,00%	100,00%

Cakupan dari Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan rata-rata dari cakupan kepemilikan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA)

1) Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Cakupan Kepemilikan KTP-el pada Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3.10. Realisasi Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Usia WK	Jumlah Perekaman KTP-el	%
1	Kepulauan Seribu	20.649	20.649	100,0%
2	Jakarta Pusat	834.065	834.065	100,0%
3	Jakarta Utara	1.350.714	1.350.698	100,0%
4	Jakarta Barat	1.903.498	1.903.487	100,0%

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Usia WK	Jumlah Perekaman KTP-el	%
5	Jakarta Selatan	1.766.508	1.766.225	100,0%
6	Jakarta Timur	2.385.662	2.384.915	100,0%
Provinsi DKI Jakarta		8.261.096	8.260.039	100,00%

Cakupan Kepemilikan KTP-el pada Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.11. Cakupan Kepemilikan KTP-el Per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia WK	Jumlah Perekaman KTP-el	%
1	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Utara	12.078	12.078	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Selatan	8.571	8.571	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	73.303	73.303	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	98.264	98.264	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	191.502	191.502	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	94.670	94.670	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	75.509	75.509	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	67.243	67.243	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	129.907	129.907	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	103.667	103.667	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	242.741	242.741	100,00%
12	Jakarta Utara	TanjungPriok	307.468	307.462	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	248.150	248.149	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	314.704	314.704	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	125.518	125.513	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	112.133	112.129	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	420.790	420.788	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	182.009	182.009	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	99.077	99.077	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	203.062	203.062	100,00%
21	Jakarta Barat	KebonJeruk	269.406	269.406	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	330.437	330.433	100,00%
23	Jakarta Barat	Palmerah	172.197	172.196	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	226.520	226.516	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	180.902	180.901	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	88.572	88.571	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	117.879	117.879	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	245.586	245.410	99,93%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	245.904	245.901	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	170.572	170.572	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	118.889	118.885	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia WK	Jumlah Perekaman KTP-el	%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	131.615	131.615	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	270.312	270.214	99,96%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	196.277	196.277	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	143.095	142.967	99,91%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	230.893	230.882	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	242.321	242.044	99,89%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	232.871	232.871	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	173.093	173.017	99,96%
40	Jakarta Timur	Cakung	417.560	417.560	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	330.521	330.521	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	165.290	165.067	99,87%
43	Jakarta Timur	Ciracas	233.631	233.603	99,99%
44	Jakarta Timur	Cipayung	216.387	216.383	100,00%
	Prov. DKI Jakarta		8.261.096	8.260.039	100,00%

2) Cakupan Kartu Keluarga (KK)

Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3.12. Realisasi Cakupan Kepemilikan KK Per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Cetak KK	%
1	Kepulauan Seribu	8.630	8.630	100,00%
2	Jakarta Pusat	390.872	390.872	100,00%
3	Jakarta Utara	607.244	607.244	100,00%
4	Jakarta Barat	829.590	829.590	100,00%
5	Jakarta Selatan	771.601	771.601	100,00%
6	Jakarta Timur	1.046.543	1.046.543	100,00%
	Provinsi DKI Jakarta	3.654.480	3.654.480	99,93%

Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada Kecamatan Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3.13. Cakupan Kepemilikan KK per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Cetak KK	%
1	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Utara	5.014	5.014	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Selatan	3.616	3.616	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	34.492	34.492	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	46.833	46.833	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Cetak KK	%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	88.637	88.637	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	45.131	45.131	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	34.592	34.592	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	31.033	31.033	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	62.853	62.853	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	47.301	47.301	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	108.387	108.387	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	138.059	138.059	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	112.714	112.714	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	142.728	142.728	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	57.475	57.475	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	47.881	47.881	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	184.781	184.781	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	80.595	80.595	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	44.518	44.518	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	89.835	89.835	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	115.479	115.479	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	143.557	143.557	100,00%
23	Jakarta Barat	Palmerah	74.456	74.456	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	96.369	96.369	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	80.161	80.161	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	40.279	40.279	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	52.687	52.687	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	108.179	108.179	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	106.547	106.547	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	73.213	73.213	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	52.301	52.301	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	58.453	58.453	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	115.693	115.693	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	84.088	84.088	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	64.844	64.844	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	103.428	103.428	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	108.236	108.236	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramat jati	103.353	103.353	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	73.707	73.707	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	185.762	185.762	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	141.840	141.840	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	70.988	70.988	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	102.752	102.752	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	91.633	91.633	100,00%
	Prov. DKI Jakarta		3.654.480	3.654.480	100,00%

3) Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)

Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Cakupan Kepemilikan KIA Per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-16 tahun)	Jumlah Kepemilikan KIA	%
1	Kepulauan Seribu	9.290	9.290	100,00%
2	Jakarta Pusat	279.531	279.531	100,00%
3	Jakarta Utara	529.352	529.352	100,00%
4	Jakarta Barat	705.867	705.867	100,00%
5	Jakarta Selatan	635.854	635.854	100,00%
6	Jakarta Timur	914.692	914.692	100,00%
PROV. DKI JAKARTA		3.074.586	3.074.586	100,00%

Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Kecamatan Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3.15. Cakupan Kepemilikan KIA per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-18 tahun)	Jumlah Kepemilikan KIA	%
1	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Utara	5.295	5.295	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Selatan	3.995	3.995	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	22.286	22.286	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	28.951	28.951	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	67.573	67.573	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	31.490	31.490	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	24.122	24.122	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	21.374	21.374	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	46.515	46.515	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	37.220	37.220	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	87.352	87.352	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	116.824	116.824	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	106.102	106.102	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	138.718	138.718	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	46.209	46.209	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	34.147	34.147	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	168.634	168.634	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-18 tahun)	Jumlah Kepemilikan KIA	%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	57.679	57.679	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	29.505	29.505	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	67.983	67.983	100,00%
21	Jakarta Barat	KebonJeruk	99.123	99.123	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	133.073	133.073	100,00%
23	Jakarta Barat	Palmerah	63.544	63.544	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	86.326	86.326	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	62.012	62.012	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	29.326	29.326	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	41.839	41.839	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	90.870	90.870	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	88.678	88.678	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	58.711	58.711	100,00%
31	Jakarta Selatan	KebayoranBaru	38.321	38.321	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	47.194	47.194	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	104.683	104.683	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	74.220	74.220	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	49.320	49.320	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	80.734	80.734	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	88.777	88.777	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramat jati	90.765	90.765	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	67.665	67.665	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	172.668	172.668	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	124.377	124.377	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	63.011	63.011	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	91.434	91.434	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	85.941	85.941	100,00%
	Prov. DKI Jakarta		3.074.586	3.074.586	100,00%

Dari target kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk pada Tahun 2022 sebesar 100,00% telah terealisasi 100,00%, hal ini dikarenakan semakin pedulinya masyarakat Provinsi DKI Jakarta dengan pentingnya identitas diri, hal ini juga didukung dengan beberapa kegiatan yang membantu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan pelaksanaan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk. Dilaksanakan dalam rangka pelayanan Jemput Bola Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara Lain :

- Pelayanan Jemput Bola Lansia/ Disabilitas/ Orang Sakit

- Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP usia 16 Tahun pada Sekolah Menengah Atas/ Sederajat
- Pelayanan Jemput Bola hari Sabtu

Selain itu, sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dimana sub kegiatan ini digunakan untuk pengadaan Petugas PJLP Pelayanan Dukcapil pada Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan juga sangat berperan penting dalam tercapainya indikator ini.

2) Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator ini akan dicapai dengan Program Pencatatan Sipil, pengukuran kinerja yang digunakan dengan mengukur cakupan kepemilikan dokumen: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100% Hasil akhir persentase rata-rata)

Indikator Ini diampu oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala UPAK dan Para Kepala Suku Dinas, target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 88,25%. Adapun realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil sebesar 100% (113,31%), adapun rincian realisasi dari target kepemilikan dokumen pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Target Kepemilikan Dokumen Capil	Realisasi Kepemilikan Dokumen Capil	Capaian
1	Kepulauan Seribu	88,25%	100,00%	113,31%
2	Jakarta Pusat	88,25%	100,00%	116,28%
3	Jakarta Utara	88,25%	99,98%	116,26%
4	Jakarta Barat	88,25%	99,98%	116,25%
5	Jakarta Selatan	88,25%	99,83%	116,08%
6	Jakarta Timur	88,25%	99,80%	116,05%
Provinsi DKI Jakarta		88,25%	100,00%	113,31%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17. Realisasi Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil per Kecamatan Tahun 2022

NO	Wilayah	Kecamatan	Target Kepemilikan Dokumen Capil	Realisasi Kepemilikan Dokumen Capil	Capaian
1	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Utara	88,25%	100,00%	113,31%
2	Kepulauan Seribu	Kep. Seribu Selatan	88,25%	100,00%	113,31%
3	Jakarta Pusat	Gambir	88,25%	100,00%	113,31%
4	Jakarta Pusat	SawahBesar	88,25%	100,00%	113,31%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	88,25%	100,00%	113,31%
6	Jakarta Pusat	Senen	88,25%	100,00%	113,31%
7	Jakarta Pusat	CempakaPutih	88,25%	100,00%	113,31%
8	Jakarta Pusat	Menteng	88,25%	100,00%	113,31%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	88,25%	100,00%	113,31%
10	Jakarta Pusat	JoharBaru	88,25%	100,00%	113,31%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	88,25%	100,00%	113,31%
12	Jakarta Utara	TanjungPriok	88,25%	100,00%	113,31%
13	Jakarta Utara	Koja	88,25%	100,00%	113,31%
14	Jakarta Utara	Cilincing	88,25%	100,00%	113,31%
15	Jakarta Utara	Pademangan	88,25%	100,00%	113,31%
16	Jakarta Utara	KelapaGading	88,25%	100,00%	113,31%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	88,25%	100,00%	113,31%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	88,25%	100,00%	113,31%
19	Jakarta Barat	Tamansari	88,25%	100,00%	113,31%
20	Jakarta Barat	Tambora	88,25%	100,00%	113,31%
21	Jakarta Barat	KebonJeruk	88,25%	100,00%	113,31%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	88,25%	100,00%	113,31%
23	Jakarta Barat	Palmerah	88,25%	100,00%	113,31%
24	Jakarta Barat	Kembangan	88,25%	100,00%	113,31%
25	Jakarta Selatan	Tebet	88,25%	100,00%	113,31%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	88,25%	100,00%	113,31%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	88,25%	100,00%	113,31%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	88,25%	100,00%	113,31%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	88,25%	100,00%	113,31%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	88,25%	100,00%	113,31%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	88,25%	100,00%	113,31%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	88,25%	100,00%	113,31%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	88,25%	100,00%	113,31%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	88,25%	100,00%	113,31%
35	Jakarta Timur	Matraman	88,25%	100,00%	113,31%
36	Jakarta Timur	PuloGadung	88,25%	100,00%	113,31%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	88,25%	100,00%	113,31%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	88,25%	100,00%	113,31%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	88,25%	100,00%	113,31%

NO	Wilayah	Kecamatan	Target Kepemilikan Dokumen Capil	Realisasi Kepemilikan Dokumen Capil	Capaian
40	Jakarta Timur	Cakung	88,25%	100,00%	113,31%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	88,25%	100,00%	113,31%
42	Jakarta Timur	Makasar	88,25%	100,00%	113,31%
43	Jakarta Timur	Ciracas	88,25%	100,00%	113,31%
44	Jakarta Timur	Cipayung	88,25%	100,00%	113,31%
Prov. DKI Jakarta			88,25%	100,00%	113,31%

Cakupan dari Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil merupakan rata-rata dari berbagai cakupan akta yang terdiri atas cakupan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian

a) Cakupan Akta Kelahiran

Cakupan Akta Kelahiran pada tingkat wilayah kota/ kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 3.18. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-17 tahun)	Jumlah Kepemilikan Akta Lahir	%
1	Kepulauan Seribu	9.794	9.794	100,00%
2	Jakarta Pusat	295.787	295.787	100,00%
3	Jakarta Utara	557.837	557.837	100,00%
4	Jakarta Barat	741.349	741.349	100,00%
5	Jakarta Selatan	669.896	669.895	100,00%
6	Jakarta Timur	959.983	959.983	100,00%
	Provinsi DKI Jakarta	3.234.646	3.234.645	100,00%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-17 tahun)	Jumlah Kepemilikan Akta Lahir	Capaian
1	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Utara	5.595	5.595	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Selatan	4.199	4.199	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	23.563	23.563	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	30.693	30.693	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Anak (0-17 tahun)	Jumlah Kepemilikan Akta Lahir	Capaian
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	71.673	71.673	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	33.272	33.272	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	25.553	25.553	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	22.582	22.582	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	49.089	49.089	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	39.362	39.362	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	91.969	91.969	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	123.188	123.188	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	111.680	111.680	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	145.964	145.964	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	48.881	48.881	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	36.155	36.155	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	176.798	176.798	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	60.631	60.631	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	31.134	31.134	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	71.577	71.577	100,00%
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	104.103	104.103	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	139.561	139.561	100,00%
23	Jakarta Barat	Palmerah	66.892	66.892	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	90.653	90.653	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	65.410	65.410	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	30.917	30.917	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	44.028	44.028	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	95.615	95.615	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	93.320	93.320	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	62.094	62.094	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	40.486	40.486	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	49.629	49.629	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	110.267	110.266	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	78.130	78.130	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	52.000	52.000	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	84.949	84.949	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	93.380	93.380	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	95.254	95.254	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	71.236	71.236	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	180.230	180.230	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	130.507	130.507	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	66.266	66.266	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	95.948	95.948	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	90.213	90.213	100,00%
Prov. DKI Jakarta			3.234.646	3.234.645	100,00%

b) Cakupan Akta Kematian

Cakupan Akta Kematian pada tingkat wilayah kota/ kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 3.20. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Lapor Mati 2022	Akta Mati	%
1	Kepulauan Seribu	441	441	100,00%
2	Jakarta Pusat	11.736	11.736	100,00%
3	Jakarta Utara	15.050	15.050	100,00%
4	Jakarta Barat	19.361	19.361	100,00%
5	Jakarta Selatan	20.395	20.395	100,00%
6	Jakarta Timur	26.938	26.938	100,00%
	Provinsi DKI Jakarta	93.921	93.921	100,00%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Kematian pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Lapor Mati 2022	Akta Mati	Capaian
1	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Utara	231	231	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Selatan	210	210	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	982	982	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	1.398	1.398	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	2.556	2.556	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	1.223	1.223	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	1.087	1.087	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	990	990	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	1.784	1.784	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	1.716	1.716	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	2.078	2.078	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	3.797	3.797	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	2.859	2.859	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	3.632	3.632	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	1.578	1.578	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	1.106	1.106	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	3.963	3.963	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	2.022	2.022	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	1.158	1.158	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	2.225	2.225	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Lapor Mati 2022	Akta Mati	Capaian
21	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	2.757	2.757	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	3.079	3.079	100,00%
23	Jakarta Barat	Palmerah	2.004	2.004	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	2.153	2.153	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	2.132	2.132	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	988	988	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	1.422	1.422	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	2.806	2.806	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	2.741	2.741	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	2.098	2.098	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	1.570	1.570	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	1.684	1.684	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	2.802	2.802	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	2.152	2.152	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	1.901	1.901	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	3.246	3.246	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	2.976	2.976	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	2.406	2.406	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	1.728	1.728	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	4.091	4.091	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	3.802	3.802	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	1.900	1.900	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	2.709	2.709	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	2.179	2.179	100,00%
Prov. DKI Jakarta			93.921	93.921	100,00%

c) Cakupan Akta Perkawinan

Cakupan Akta Perkawinan pada tingkat wilayah kota/ kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 3.22. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Pemohonan	Akta Perkawinan	%
1	Kepulauan Seribu	-	-	100,00%
2	Jakarta Pusat	1.227	1.227	100,00%
3	Jakarta Utara	3.013	3.013	100,00%
4	Jakarta Barat	5.237	5.237	100,00%
5	Jakarta Selatan	1.109	1.109	100,00%
6	Jakarta Timur	3.410	3.410	100,00%
Provinsi DKI Jakarta			13.996	13.996
				100,00%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Pemohon	Akta Kawin	Capaian
1	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Utara	-	-	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Selatan	-	-	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	144	144	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	298	298	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	250	250	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	164	164	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	78	78	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	79	79	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	111	111	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	103	103	100,00%
11	Jakarta Utara	Penjaringan	945	945	100,00%
12	Jakarta Utara	Tanjung Priok	655	655	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	255	255	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	339	339	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	361	361	100,00%
16	Jakarta Utara	Kelapa Gading	458	458	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	1.080	1.080	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	815	815	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	318	318	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	871	871	100,00%
21	Jakarta Barat	KebonJeruk	557	557	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	922	922	100,00%
23	Jakarta Barat	Palmerah	196	196	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	478	478	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	96	96	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	86	86	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	58	58	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	151	151	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	157	157	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	134	134	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	74	74	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	94	94	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	123	123	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	136	136	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	128	128	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	442	442	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	270	270	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	310	310	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Pemohon	Akta Kawin	Capaian
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	300	300	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	496	496	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	410	410	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	299	299	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	378	378	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	377	377	100,00%
	Prov. DKI Jakarta		13.996	13.996	100,00%

d) Cakupan Akta Perceraian

Cakupan Akta Perceraian pada tingkat wilayah kota/ kabupaten administrasi sesuai dengan data berikut:

Tabel 3.24. Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Wilayah Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Pemohonan	Akta Perceraian	%
1	Kepulauan Seribu	-	-	100,00%
2	Jakarta Pusat	205	205	100,00%
3	Jakarta Utara	450	450	100,00%
4	Jakarta Barat	627	627	100,00%
5	Jakarta Selatan	242	242	100,00%
6	Jakarta Timur	323	323	100,00%
	Provinsi DKI Jakarta	1.847	1.847	100,00%

Sedangkan capaian Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Pemohon	Akta Cerai	Capaian
1	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Utara	-	-	100,00%
2	Kepulauan Seribu	Kep Seribu Selatan	-	-	100,00%
3	Jakarta Pusat	Gambir	23	23	100,00%
4	Jakarta Pusat	Sawah Besar	46	46	100,00%
5	Jakarta Pusat	Kemayoran	46	46	100,00%
6	Jakarta Pusat	Senen	21	21	100,00%
7	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	17	17	100,00%
8	Jakarta Pusat	Menteng	9	9	100,00%
9	Jakarta Pusat	Tanah Abang	18	18	100,00%
10	Jakarta Pusat	Johar Baru	25	25	100,00%

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Pemohon	Akta Cerai	Capaian
11	Jakarta Utara	Penjaringan	146	146	100,00%
12	Jakarta Utara	TanjungPriok	110	110	100,00%
13	Jakarta Utara	Koja	22	22	100,00%
14	Jakarta Utara	Cilincing	30	30	100,00%
15	Jakarta Utara	Pademangan	58	58	100,00%
16	Jakarta Utara	KelapaGading	84	84	100,00%
17	Jakarta Barat	Cengkareng	108	108	100,00%
18	Jakarta Barat	Grogol Petamburan	120	120	100,00%
19	Jakarta Barat	Tamansari	60	60	100,00%
20	Jakarta Barat	Tambora	84	84	100,00%
21	Jakarta Barat	KebonJeruk	88	88	100,00%
22	Jakarta Barat	Kali Deres	78	78	100,00%
23	Jakarta Barat	Palmerah	24	24	100,00%
24	Jakarta Barat	Kembangan	65	65	100,00%
25	Jakarta Selatan	Tebet	20	20	100,00%
26	Jakarta Selatan	Setia Budi	20	20	100,00%
27	Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	18	18	100,00%
28	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	19	19	100,00%
29	Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	38	38	100,00%
30	Jakarta Selatan	Cilandak	33	33	100,00%
31	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	27	27	100,00%
32	Jakarta Selatan	Pancoran	20	20	100,00%
33	Jakarta Selatan	Jagakarsa	21	21	100,00%
34	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	26	26	100,00%
35	Jakarta Timur	Matraman	16	16	100,00%
36	Jakarta Timur	Pulo Gadung	53	53	100,00%
37	Jakarta Timur	Jatinegara	48	48	100,00%
38	Jakarta Timur	Kramatjati	22	22	100,00%
39	Jakarta Timur	Pasar Rebo	11	11	100,00%
40	Jakarta Timur	Cakung	50	50	100,00%
41	Jakarta Timur	Duren Sawit	53	53	100,00%
42	Jakarta Timur	Makasar	15	15	100,00%
43	Jakarta Timur	Ciracas	32	32	100,00%
44	Jakarta Timur	Cipayung	23	23	100,00%
Prov. DKI Jakarta			1.847	1.847	100.00%

Dari target kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 sebesar 88,25% telah terealisasi 113,31%, hal ini dikarenakan semakin pedulinya masyarakat Provinsi DKI Jakarta dengan pentingnya legalitas diri, sama seperti pada indikator kepamilikan dokumen Pendaftaran Penduduk hal ini juga didukung dengan beberapa kegiatan yang membantu meningkatkan cakupan

kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan pelaksanaan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk. Dilaksanakan dalam rangka pelayanan Jemput Bola Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara Lain :

- Pelayanan Jemput Bola Lansia/ Disabilitas/ Orang Sakit
- Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP usia 16 Tahun pada Sekolah Menengah Atas/ Sederajat
- Pelayanan Jemput Bola hari Sabtu

Selain itu, sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dimana sub kegiatan ini digunakan untuk pengadaan Petugas PJLP Pelayanan Dukcapil pada Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan juga sangat berperan penting dalam tercapainya indikator ini.

c. Persentase Kampung Sadar Adminduk (Kamsa)

Indikator ini merupakan target dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang masih berhubungan dengan Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun 2022, KAMSA merupakan akronim dari Kampung Sadar Administrasi Kependudukan.

Indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah kawasan/kampung/RW yang capaian kepemilikan dokumen adminduk sama dengan atau lebih besar dari target Nasional. Pada Tahun 2022 ini target pelaksanaan KAMSA dilaksanakan pada 267 Lokasi. Adapun realisasinya pada Tahun 2022 sebesar 299 Kamsa (111,99%).

Tabel 3.26. Rekapitulasi Realisasi KAMSA Tahun 2022

No	Kota/ Kabupaten Administrasi	Jumlah RW KAMSA	Realisasi KAMSA				Capaian 4 Cakupan 03/01/2023
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kepulauan Seribu	24	4	7	12	24	24
2	Jakarta Pusat	46	7	14	24	46	46
3	Jakarta Utara	31	5	9	16	31	31
4	Jakarta Barat	58	9	17	29	58	58
5	Jakarta Selatan	66	10	20	33	66	66
6	Jakarta Timur	74	11	22	37	74	74
	TOTAL	299	46	89	151	299	299

Berikut rincian 299 KAMSA pada tiap Kelurahan yang diukur berdasarkan persentase capaian kepemilikan dokumen adminduk sama dengan atau lebih besar dari target Nasional pada Dokumen KTP-el, KK, KIA dan Akta Kelahiran.

Tabel 3.27. Rekapitulasi Realisasi KAMSA 4 Cakupan Tahun 2022

Kelurahan	No RW	KTP (99,3%)	KIA (98%)	Akta Lahir (98%)	KK (99,3%)	Akta Kawin (60%)	Akta Cerai (100%)
Pulau Panggang	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Panggang	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Panggang	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Panggang	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Panggang	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Kelapa	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Kelapa	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Kelapa	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Kelapa	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Kelapa	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Harapan	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Harapan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Harapan	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Untung Jawa	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Untung Jawa	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Untung Jawa	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Tidung	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Tidung	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Tidung	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Tidung	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Pari	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Pari	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Pari	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulau Pari	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gambir	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cideng	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Petojo Utara	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Petojo Selatan	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Kelapa	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Duri Pulo	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pasar Baru	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Karang Anyar	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kartini	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gunung Sahari Utara	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mangga Dua Selatan	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kemayoran	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Kosong	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Harapan Mulia	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Serdang	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gunung Sahari Selatan	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cempaka Baru	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sumur Batu	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Utan Panjang	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Senen	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kenari	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kenari	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Paseban	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kelurahan	No RW	KTP (99,3%)	KIA (98%)	Akta Lahir (98%)	KK (99,3%)	Akta Kawin (60%)	Akta Cerai (100%)
Kramat	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kwitang	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bungur	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cempaka Putih Timur	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cempaka Putih Barat	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rawasari	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rawasari	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Menteng	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pegangsaan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cikini	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gondangdia	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Sirih	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gelora	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bendungan Hilir	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Karet Tengsin	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Petamburan	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Melati	14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Kacang	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kampung Bali	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Johar Baru	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kampung Rawa	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Galur	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tanah Tinggi	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Penjaringan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,25%	100,00%
Kamal Muara	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kapuk Muara	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,78%	100,00%
Pejagalan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pluit	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,71%	100,00%
Tanjung Priok	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	77,40%	100,00%
Sunter Jaya	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Papanggo	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,11%	100,00%
Sungai Bambu	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,56%	100,00%
Kebon Bawang	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sunter Agung	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Warakas	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64,79%	100,00%
Koja	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,15%	81,82%
Tugu Utara	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,79%	85,00%
Lagoa	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rawa Badak Utara	14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,58%	88,57%
Tugu Selatan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,40%	100,00%
Rawa Badak Selatan	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cilincing	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sukapura	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,83%	66,67%
Marunda	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,81%	33,08%
Kalibaru	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,93%	81,25%
Semper Timur	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rorotan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Semper Barat	17	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pademangan Timur	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,35%	100,00%
Pademangan Barat	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ancol	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kelapa Gading Timur	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pegangsaan Dua	24	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kelapa Gading Barat	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cengkareng Barat	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Duri Kosambi	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,97%	100,00%

Kelurahan	No RW	KTP (99,3%)	KIA (98%)	Akta Lahir (98%)	KK (99,3%)	Akta Kawin (60%)	Akta Cerai (100%)
Rawa Buaya	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,39%	100,00%
Kedaung Kali Angke	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kapuk	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,88%	100,00%
Cengkareng Timur	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Grogol	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tanjung Duren Utara	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tomang	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jelambar	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tanjung Duren Selatan	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tanjung Duren Selatan	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jelambar Baru	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wijaya Kusuma	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Taman Sari	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Krukut	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Maphar	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tangki	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mangga Besar	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mangga Besar	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Keagungan	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Glodok	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pinangsia	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tambora	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kali Anyar	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Duri Utara	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,11%	100,00%
Tanah Sereal	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,20%	82,54%
Krendang	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	77,08%
Jembatan Besi	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Angke	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,87%	100,00%
Jembatan Lima	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	63,08%	50,67%
Pekojan	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,25%	89,13%
Roa Malaka	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Duri Selatan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Jeruk	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sukabumi Utara	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Sukabumi Selatan	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kelapa Dua	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,24%	100,00%
Duri Kepa	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kedoya Utara	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kedoya Selatan	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,42%	85,20%
Kalideres	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Semanan	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,51%	100,00%
Tegal Alur	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kamal	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,83%	72,58%
Pegadungan	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,34%	100,00%
Palmerah	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72,42%	100,00%
Slipi	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kota Bambu Utara	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,32%	84,62%
Jatipulo	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kemanggisan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,99%	100,00%
Kota Bambu Selatan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kembangan Utara	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meruya Utara	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meruya Selatan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Srengseng	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Joglo	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kembangan Selatan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kelurahan	No RW	KTP (99,3%)	KIA (98%)	Akta Lahir (98%)	KK (99,3%)	Akta Kawin (60%)	Akta Cerai (100%)
Tebet Timur	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,62%	87,50%
Tebet Barat	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,65%	63,98%
Menteng Dalam	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Baru	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64,48%	35,45%
Bukit Duri	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,08%	79,58%
Manggarai Selatan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,82%	95,24%
Manggarai	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,64%	57,84%
Setia Budi	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Karet Semanggi	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Karet Kuningan	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64,14%	64,62%
Karet	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,27%	96,67%
Menteng Atas	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,00%	100,00%
Pasar Manggis	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Guntur	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,86%	76,25%
Kuningan Timur	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mampang Prapatan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%
Bangka	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72,19%	66,45%
Pela Mampang	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,58%	92,75%
Tegal Parang	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,23%	100,00%
Kuningan Barat	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kuningan Barat	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pasar Minggu	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jati Padang	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cilandak Timur	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76,75%	100,00%
Ragunan	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	77,78%	92,37%
Pejaten Timur	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,46%	89,76%
Pejaten Barat	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebagusan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,77%	38,10%
Kebayoran Lama Utara	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,91%	85,14%
Pondok Pinang	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,30%	84,76%
Cipulir	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,87%	84,39%
Grogol Utara	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,75%	76,79%
Grogol Selatan	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,07%	39,17%
Kebayoran Lama Selatan	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cilandak Barat	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,03%	100,00%
Lebak Bulus	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,57%	88,10%
Pondok Labu	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gandaria Selatan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cipete Selatan	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,68%	100,00%
Melawai	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,82%	72,28%
Gunung	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	65,10%	52,08%
Kramat Pela	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	73,30%	70,17%
Selong	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	77,25%	100,00%
Rawa Barat	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,67%	94,12%
Senayan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulo	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,71%	91,89%
Petogogan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,03%	100,00%
Gandaria Utara	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,60%	100,00%
Cipete Utara	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pancoran	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,64%	87,50%
Kalibata	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,10%
Rawajati	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,06%	100,00%
Duren Tiga	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,22%	92,97%
Pengadegan	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,29%	73,41%
Cikoko	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,45%	90,79%
Jagakarsa	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,33%	83,17%

Kelurahan	No RW	KTP (99,3%)	KIA (98%)	Akta Lahir (98%)	KK (99,3%)	Akta Kawin (60%)	Akta Cerai (100%)
Srengseng Sawah	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,10%	94,83%
Ciganjur	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76,69%	92,86%
Lenteng Agung	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	71,33%	89,29%
Tanjung Barat	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,69%	84,52%
Cipedak	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60,02%	42,35%
Pesanggrahan	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bintaro	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Petukangan Utara	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,61%	96,51%
Petukangan Selatan	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	100,00%
Ulujami	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,31%	94,17%
Pisangan Baru	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Utan Kayu Utara	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kayu Manis	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Palmeriam	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Palmeriam	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kebon Manggis	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Utan Kayu Selatan	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pulo Gadung	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pisangan Timur	14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cipinang	18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jatinegara Kaum	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rawamangun	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rawamangun	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kayu Putih	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jati	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kampung Melayu	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bidara Cina	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bali Mester	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rawa Bunga	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,26%	100,00%
Cipinang Cempedak	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cipinang Muara	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	100,00%
Cipinang Besar Selatan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	73,66%	85,06%
Cipinang Besar Utara	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cipinang Besar Utara	13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kramatjati	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tengah	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,90%	91,43%
Dukuh	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Batu Ampar	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Balekambang	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	63,05%	85,78%
Cililitan	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cililitan	14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cawang	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Gedong	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Baru	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cijantung	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kalisari	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kalisari	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,62%
Pekayon	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jatinegara	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79,28%	100,00%
Rawa Terate	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,21%	100,00%
Rawa Terate	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Penggilingan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,27%	56,20%
Cakung Timur	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,90%	65,48%
Pulo Gebang	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ujung Menteng	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cakung Barat	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kelurahan	No RW	KTP (99,3%)	KIA (98%)	Akta Lahir (98%)	KK (99,3%)	Akta Kawin (60%)	Akta Cerai (100%)
Duren Sawit	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pondok Bambu	11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Klender	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pondok Kelapa	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,74%	100,00%
Malaka Sari	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Malaka Jaya	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Malaka Jaya	13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pondok Kopi	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Makasar	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pinangranti	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	100,00%
Kebon Pala	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Halim Perdana Kusumah	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Halim Perdana Kusumah	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cipinang Melayu	13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,97%	100,00%
Ciracas	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cibubur	13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kelapa Dua Wetan	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Susukan	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rambutan	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cipayung	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cilangkap	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,53%
Pondok Ranggon	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60,86%	69,57%
Munjul	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Munjul	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Setu	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bambu Apus	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Lubang Buaya	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,39%	100,00%
Ceger	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tercapainya KAMSA tidak dapat terlepas dari tercapainya target Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Persentase Pemanfaatan data Kependudukan

Target tahun 2022 sebesar 100% dan 130 pengguna data, adapun realisasi pada indikator ini pada Tahun 2022 telah mencapai 137 pengguna data (capaian 105,38%).

Tabel 3.28. Rekap Pemanfaatan Data Tahun 2022

No	Instansi	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	PKS Pembaharuan
2	RSUD Tarakan	RSUD Keas A dan B
3	RSUD Koja	RSUD Keas A dan B
4	RSUD Budhi Asih	RSUD Keas A dan B
5	RSUD Pasar Rebo	RSUD Keas A dan B
6	RSUD Cengkareng	RSUD Keas A dan B
7	RSKD Duren Sawit	RSUD Keas A dan B
8	RSUD Pasar Minggu	RSUD Keas A dan B
9	RSUD Cilincing	RSUD Kelas C

No	Instansi	Keterangan
10	RSUD Tugu Koja	RSUD Kelas C
11	RSUD Pesanggrahan	RSUD Kelas C
12	RSUD Tebet	RSUD Kelas C
13	RSU Adhyaksa	RSUD Kelas C
14	RSUD Cempaka Putih	RSUD Kelas D
15	RSUD Johar Baru	RSUD Kelas D
16	RSUD Kemayoran	RSUD Kelas D
17	RSUD Sawah Besar	RSUD Kelas D
18	RSUD Tanah Abang	RSUD Kelas D
19	RSUD Tajung Priok	RSUD Kelas D
20	RSUD Pademangan	RSUD Kelas D
21	RSUD Taman Sari	RSUD Kelas D
22	RSUD Kembangan	RSUD Kelas D
23	RSUD Kalideres	RSUD Kelas D
24	RSUD Mampang Prapatan	RSUD Kelas D
25	RSUD Jagakarsa	RSUD Kelas D
26	RSUD Kebayoran Baru	RSUD Kelas D
27	RSUD Kebayoran Lama	RSUD Kelas D
28	RSUD Jati Padang	RSUD Kelas D
29	RSUD Matraman	RSUD Kelas D
30	RSUD Kramat Jati	RSUD Kelas D
31	RSUD Cipayung	RSUD Kelas D
32	RSUD Ciracas	RSUD Kelas D
33	RSUD Kepulauan Seribu	RSUD Kelas D
34	Kepala Puskesmas Kec. Cempaka Putih	Puskesmas
35	Kepala Puskesmas Kec. Johar Baru	Puskesmas
36	Kepala Puskesmas Kec. Kemayoran	Puskesmas
37	Kepala Puskesmas Kec. Sawah Besar	Puskesmas
38	Kepala Puskesmas Kec. Tanah Abang	Puskesmas
39	Kepala Puskesmas Kec. Menteng	Puskesmas
40	Kepala Puskesmas Kec. Senen	Puskesmas
41	Kepala Puskesmas Kec. Gambir	Puskesmas
42	Kepala Puskesmas Kec. Kelapa Gading	Puskesmas
43	Kepala Puskesmas Kec. Pademangan	Puskesmas
44	Kepala Puskesmas Kec. Penjaringan	Puskesmas
45	Puskesmas Kec. Tanjung Priok	Puskesmas
46	Kepala Puskesmas Kec. Koja	Puskesmas
47	Kepala Puskesmas Kec. Cilincing	Puskesmas
48	Kepala Puskesmas Kec. Cengkareng	Puskesmas
49	Kepala Puskesmas Kec. Kalideres	Puskesmas
50	Puskesmas Kec. Grogol Petamburan	Puskesmas
51	Kepala Puskesmas Kec. Palmerah	Puskesmas
52	Kepala Puskesmas Kec. Taman Sari	Puskesmas

No	Instansi	Keterangan
53	Kepala Puskesmas Kec. Tambora	Puskesmas
54	Kepala Puskesmas Kec. Kebon Jeruk	Puskesmas
55	Kepala Puskesmas Kec. Kembangan	Puskesmas
56	Kepala Puskesmas Kec. Tebet	Puskesmas
57	Kepala Puskesmas Kec. Setiabudi	Puskesmas
58	Kepala Puskesmas Kec. Mampang Prapatan	Puskesmas
59	Kepala Puskesmas Kec. Pancoran	Puskesmas
60	Kepala Puskesmas Kec. Pasar Minggu	Puskesmas
61	Kepala Puskesmas Kec. Jagakarsa	Puskesmas
62	Kepala Puskesmas Kec. Kebayoran Baru	Puskesmas
63	Kepala Puskesmas Kec. Kebayoran Lama	Puskesmas
64	Kepala Puskesmas Kec. Pesanggrahan	Puskesmas
65	Kepala Puskesmas Kec. Cilandak	Puskesmas
66	Kepala Puskesmas Kec. Jatinegara	Puskesmas
67	Kepala Puskesmas Kec. Matraman	Puskesmas
68	Kepala Puskesmas Kec. Pulogadung	Puskesmas
69	Kepala Puskesmas Kec. Duren Sawit	Puskesmas
70	Kepala Puskesmas Kec. Kramat Jati	Puskesmas
71	Kepala Puskesmas Kec. Makasar	Puskesmas
72	Kepala Puskesmas Kec. Pasar Reba	Puskesmas
73	Kepala Puskesmas Kec. Ciracas	Puskesmas
74	Kepala Puskesmas Kec. Cipayung	Puskesmas
75	Kepala Puskesmas Kec. Cakung	Puskesmas
76	Kepala Puskesmas Kec. Kepulauan Seribu Utara	Puskesmas
77	Kepala Puskesmas Kec. Kepulauan Seribu Selatan	Puskesmas
78	Badan Pendapatan Daerah	PKS Pembaharuan
79	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	PKS Pembaharuan
80	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	PKS Pembaharuan
81	Dinas Pendidikan	PKS Pembaharuan
82	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	PKS Pembaharuan
83	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PKS Pembaharuan
84	Dinas Sosial	PKS Pembaharuan
85	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	PKS Pembaharuan
86	Palang Merah Indonesia DKI Jakarta	PKS Baru
87	Dinas Kebudayaan	PKS Baru
88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PKS Baru
89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PKS Baru
90	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Permohonan Data
91	Dinas Lingkungan hidup	Permohonan Data
92	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Permohonan Data
93	Dinas Perhubungan	Permohonan Data

No	Instansi	Keterangan
94	Dinas Lingkungan Hidup	Permohonan Data
95	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Permohonan Data
96	Kecamatan Kelapa Gading	Permohonan Data
97	Kelurahan Kembangan Selatan	Permohonan Data
98	Kelurahan Melawai	Permohonan Data
99	Kelurahan Pulo Gebang	Permohonan Data
100	Koramil 03/GP	Permohonan Data
101	UIN Syarif Hidayatullah	Permohonan Data
102	WRI INDONESIA	Permohonan Data
103	Kelurahan Joglo	Permohonan Data
104	Kelurahan Pondok Pinang	Permohonan Data
105	Kelurahan Ciganjur	Permohonan Data
106	Universitas Indonesia	Permohonan Data
107	CISDI	Permohonan Data
108	STMKG	Permohonan Data
109	Universitas Pancasila	Permohonan Data
110	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Permohonan Data
111	Kelurahan Cipedak	Permohonan Data
112	Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Permohonan Data
113	Bareskrim Polri	Verifikasi Data
114	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan	Verifikasi Data
115	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	Verifikasi Data
116	Kanwil Pembimbing Masyarakat Buddha Kemenag Prov. DKI Jakarta	Verifikasi Data
117	Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	Verifikasi Data
118	Polsek Kebayoran Lama	Verifikasi Data
119	Polsek Pasar Minggu	Verifikasi Data
120	PT Kanaya Survey Indonesia	Verifikasi Data
121	PT. Bank Central Asia, Tbk	Verifikasi Data
122	PT. Integrity Indonesia	Verifikasi Data
123	PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia	Verifikasi Data
124	PT. Veris	Verifikasi Data
125	Benny Wulur & Associates Advocate, Counsellor At Law & Receiver	Verifikasi Data
126	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	Verifikasi Data
127	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4	Verifikasi Data
128	PT. Federal International Finance Central Bekasi	Verifikasi Data
129	Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat	Verifikasi Data
130	Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Verifikasi Data
131	PT. Federal International Finance Pamulang Credit Central	Verifikasi Data

No	Instansi	Keterangan
132	Kantor Hukum Apollas Simanjuntak, S.H.	Verifikasi Data
133	Manaeck Manurung, S.H. Law Firm "MANAECK MANURUNG & PARTNERS"	Verifikasi Data
134	Bank Danamon Cabang Duta Mas	Verifikasi Data
135	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun	Verifikasi Data
136	PT BNI TBK KCP Graha Elok Mas	Verifikasi Data
137	Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta	Permohonan Data

e. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Target 91%, Realisasi 95,62%)

Merupakan indikator yang dihitung dari persentase serapan anggaran, persentase efisiensi, dan persentase output, diukur dari 3 (tiga) komponen berikut:

- 1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- 2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- 3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

- Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 10\%) / 20\% + (50\%)$$
- Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$

$$(\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%))$$
- Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

Target pada Indikator ini pada akhir tahun 2022 sebesar 91% dengan realisasi sebesar 95,62% (105,08%), capaian ini didapatkan dari rata-rata

persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Dinas, UPT dan Suku Dinas.

Tabel 3.29. Rekap Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

No	PD/UKPD	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Dinas Dukcapil	91%	93,80%	103,08%
2	UPTIK	91%	95,36%	104,79%
3	UPAK	91%	98,74%	108,51%
4	Sudin Dukcapil Jakarta Pusat	91%	95,45%	104,89%
5	Sudin Dukcapil Jakarta Utara	91%	94,43%	103,77%
6	Sudin Dukcapil Jakarta Barat	91%	94,56%	103,91%
7	Sudin Dukcapil Jakarta Selatan	91%	97,14%	106,75%
8	Sudin Dukcapil Jakarta Timur	91%	94,36%	103,69%
9	Sudin Dukcapil Kep. Seribu	91%	96,75%	106,32%
	Total	91%	95,62%	105,08%

Rekapitulasi diatas didapatkan dari serapan anggaran masing-masing, output setiap sub kegiatan serta efisiensi anggaran pada tahun 2022, adapun rinciannya sebagai berikut :

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Dinas

Tabel 3.30. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Dinas Dukcapil DKI Jakarta

REALISASI	Serapan Anggaran	93,80%
	Efisiensi	6,20%
	Output	103,72%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		93,80%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
			Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	%				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	165.768.323.583	155.757.229.371	93,96%	10.011.094.212	6,04%	Persentase Pembayaran Gaji atau Tunjangan ASN	100	Persen	100	Persen	100,00%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00%	-	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86.900.000	86.900.000	100,00%	-	0,00%	1. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	376	Orang	376	Orang	100,00%
							2. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	376	Orang	376	Orang	100,00%
							3. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	200	Orang	200	Orang	100,00%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.405.990.562	4.972.077.966	91,97%	433.912.596	8,03%	1. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
							2. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan toner pelayanan Adminkuk	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
							3. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
							4. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan cetakan khusus	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.483.834	12.466.410	99,86%	17.424	0,14%	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Nilai	4	Nilai	100,00%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
			Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	%				
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	338.253.438	331.040.850	97,87%	7.212.588	2,13%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
7	Penyediaan Bahan/Material	122.040.520	122.040.520	100,00%	-	0,00%	1. Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBM-nya terpenuhi	20	Unit	20	Unit	100,00%
							2. Nilai kepuasan penuhan kebutuhan BBM dan material lainnya*	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.849.200	31.880.260	91,48%	2.968.940	8,52%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.199.080	9.199.067	100,00%	13	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap keamanan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.831.462	126.046.035	97,84%	2.785.427	2,16%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menjurut	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.181.863.860	1.134.291.820	95,97%	47.572.040	4,03%	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.720.000	98.234.994	77,52%	28.485.006	22,48%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.417.146.082	1.408.787.373	99,41%	8.358.709	0,59%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
							Nilai kepuasan pelayanan terhadap keamanan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.615.439	203.840.425	91,57%	18.775.014	8,43%	1. Jumlah KDO/KDO khusus yang laik jalan/berfungsi	20	Unit	20	Unit	100,00%
							2. Jumlah KDO/KDO khusus yang memiliki surat izin	20	Unit	20	Unit	100,00%
							3. Nilai kepuasan pemeliharaan dan perizinan KDO/KDO Khusus*	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
15	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.364.325.030	3.091.734.485	91,90%	272.590.545	8,10%	1. Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebersihan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
							2. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	710.346.923	675.236.900	95,06%	35.110.023	4,94%	1. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja	4	Kali	4	Kali	100,00%
							2. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.107.000	21.800.000	98,61%	307.000	1,39%	1. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Pemanfaatan Data*	50	Orang	109	Orang	218,00%
							2. Nilai kepuasan pelayanan terhadap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
18	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	128.831.462	128.820.273	99,99%	11.189	0,01%	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminkud	30	Lokasi	32	Lokasi	106,67%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
			Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	%				
19	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	380.237.540	380.236.000	100,00%	1.540	0,00%	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
20	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	3.108.856.199	2.656.413.332	85,45%	452.442.867	14,55%	1. Jumlah register akta yang berhasil dilakukan alih media	1.000.000	Register	1.091.143	Register	109,11%
							2. Persentase Penataan Arsip Register Akta Catatan Sipil	100	Per센	100	Per센	100,00%
21	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.212.540	65.211.000	100,00%	1.540	0,00%	1. Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Biduk Orang Asing	10	Lokasi	10	Lokasi	100,00%
							2. Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelayanan adminduk	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
22	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain						Jumlah buku hasil registrasi dan profil kependudukan	880	Buku	880	Buku	100,00%
		182.639.133.754	171.317.487.081	93,80%	11.321.646.673	6,20%						103,72%

Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat

Tabel 3.31. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Pusat

REALISASI	Serapan Anggaran	95,45%
	Efisiensi	4,55%
	Output	100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		95,45%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.533.528.188	9.476.604.520	99,40%	56.923.668	0,60%	Jumlah Laporan Kinerja Pelayanan Adminduk oleh Pekerja Kontrak Pelayanan Adminduk	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	46.800.000	46.800.000	100,00%	-	0,00%	Jumlah Laporan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
3	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	135.219.480	134.221.200	99,26%	998.280	0,74%	Jumlah Register Akta Catatan Sipil yang dikelola dan dirawat	2000	Buku	2000	Buku	100,00%
4	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	21.192.600	20.682.630	97,59%	509.970	2,41%	Jumlah buku profil kependudukan	30	Buku	30	Buku	100,00%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00%	-	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.558.449.781	5.841.870.800	89,07%	716.578.981	10,93%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan Tonner pelayanan Adminduk	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
7		199.220.230	198.412.778	99,59%	807.452	0,41%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
8		501.703.191	490.235.870	97,71%	11.467.321	2,29%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	187.687.500	185.352.240	98,76%	2.335.260	1,24%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
10	Penyediaan Bahan/Material	51.445.440	51.445.440	100,00%	-	0,00%	Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi	47	Unit	47	Unit	100,00%
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.474.000	18.111.440	84,34%	3.362.560	15,66%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	644.157.310	637.959.527	99,04%	6.197.783	0,96%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menyrat	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	337.154.400	309.370.356	91,76%	27.784.044	8,24%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.831.462	126.031.759	97,83%	2.799.703	2,17%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.937.400	6.035.700	33,65%	11.901.700	66,35%	Jumlah KDO/KDO khusus yang memiliki surat izin	47	Unit	47	Unit	100,00%
16		133.191.630	130.829.709	98,23%	2.361.921	1,77%	Jumlah KDO/KDO khusus yang laik jalan/berfungsi	47	Unit	47	Unit	100,00%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.635.410	38.617.300	99,95%	18.110	0,05%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
	TOTAL	18.559.628.022	17.715.581.269	95,45%	844.046.753	4,55%						100,00%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utara

Tabel 3.32. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Utara

REALISASI	Serapan Anggaran	94,43%
Efisiensi		5,57%
Output		100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		94,43%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja				
								Target	Satuan	Capaian	Satuan	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.900.000	6.900.000	100,00%	-	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.022.137.733	7.051.892.783	87,91%	970.244.950	12,09%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	174.235.303	173.123.870	99,36%	1.111.433	0,64%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
4	Penyediaan Bahan/Material	55.915.200	55.915.200	100,00%	-	0,00%	Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBM-nya terpenuhi	33	Unit	33	Unit	100,00%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.459.620	25.664.030	90,18%	2.795.590	9,82%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.821.880	520.639.564	99,96%	182.316	0,04%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menyurat	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.613.170	168.330.373	82,27%	36.282.797	17,73%	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.231.200	245.260.932	93,53%	16.970.268	6,47%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.508.334	653.030.968	99,93%	477.366	0,07%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	183.120.266	169.168.510	92,38%	13.951.756	7,62%	Jumlah KDO/KDO khusus yang memiliki surat izin	33	Unit	33	Unit	100,00%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja			
								Target	Satuan	Capaian	Satuan
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.128.223	388.934.026	99,19%	3.194.197	0,81%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebersihan kantor	4	Nilai	4	Nilai
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.945.000	100.975.590	98,09%	1.969.410	1,91%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja	4	Nilai	4	Nilai
13	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.374.045.030	8.354.261.538	99,76%	19.783.492	0,24%	Jumlah Laporan Kinerja Pelayanan Adminduk oleh Pekerja Kontrak Pelayanan Adminduk	12	Laporan	12	Laporan
14	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	45.240.000	45.240.000	100,00%	-	0,00%	Jumlah Laporan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	12	Laporan
15	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	142.156.740	140.997.917	99,18%	1.158.823	0,82%	Jumlah Register Akta Catatan Sipil yang dikelola dan dirawat	2500	Buku	2500	Buku
16	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	21.307.572	21.085.560	98,96%	222.012	1,04%	Jumlah buku profil kependudukan	50	Buku	50	Buku
		19.189.765.271	18.121.420.861	94,43%	1.068.344.410	5,57%					100,00%

Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat

Tabel 3.33. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Barat

REALISASI	Serapan Anggaran	94,56%
	Efisiensi	5,44%
	Output	100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		94,56%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.460.000	13.460.000	100,00%	-	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.412.353.643	7.332.250.206	87,16%	1.080.103.437	12,84%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan Tonner pelayanan Adminduk	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.324.460	18.053.040	98,52%	271.420	1,48%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.919.436	131.000.202	99,30%	919.234	0,70%	Nilai Kepuasan terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
5	Penyediaan Bahan/Material	217.079.520	217.079.520	100,00%	-	0,00%	Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi	55	unit	55	unit	100,00%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.254.080	41.809.564	83,20%	8.444.516	16,80%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	644.157.310	644.028.617	99,98%	128.693	0,02%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menyurat	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454.497.360	382.493.379	84,16%	72.003.981	15,84%	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.616.000	358.225.950	95,62%	16.390.050	4,38%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.246.511	652.917.703	99,95%	328.808	0,05%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap Pelayanan Umum Kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.969.770	238.825.703	88,79%	30.144.067	11,21%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebersihan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.314.199.368	1.213.804.251	92,36%	100.395.117	7,64%	Nilai Kepuasan terhadap pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.634.785	345.488.077	99,10%	3.146.708	0,90%	Nilai Kepuasan terhadap Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
14	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11.530.415.849	11.495.214.559	99,69%	35.201.290	0,31%	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
15	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	214.817.972	214.070.288	99,65%	747.684	0,35%	Jumlah lokasi pelaksanaan pelayanan mobile	242	Lokasi	242	Lokasi	100,00%
16	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	133.741.036	132.086.670	98,76%	1.654.366	1,24%	Jumlah buku register	1500	buku	1500	buku	100,00%
17	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	46.620.000	45.787.500	98,21%	832.500	1,79%	Jumlah buku profil kependudukan	100	buku	100	buku	100,00%
		24.827.307.100	23.476.595.229	94,56%	1.350.711.871	5,44%						100,00%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan

Tabel 3.34. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Selatan

REALISASI	Serapan Anggaran	97,14%
	Efisiensi	2,86%
	Output	100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		97,14%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja				
								Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.103.600	10.049.300	99,46%	54.300	0,54%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.591.917.700	7.055.423.995	92,93%	536.493.705	7,07%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan Tonner pelayanan Adminduk	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.628.870	198.168.078	99,77%	460.792	0,23%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	677.067.965	651.956.949	96,29%	25.111.016	3,71%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	198.167.200	194.309.385	98,05%	3.857.815	1,95%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
6	Penyediaan Bahan/Material	99.433.500	99.433.500	100,00%	0	0,00%	Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi	71	Unit	71	Unit	100,00%
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.623.288	27.213.420	91,86%	2.409.868	8,14%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.578.120	769.515.963	99,60%	3.062.157	0,40%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menjurut	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.291.000	257.928.609	82,86%	53.362.391	17,14%	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.672.000	407.520.000	99,72%	1.152.000	0,28%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.662.924	254.783.989	98,88%	2.878.935	1,12%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja				
								Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.229.071	391.870.364	99,91%	358.707	0,09%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap keamanan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.429.923	202.967.839	89,24%	24.462.084	10,76%	Jumlah KDO/KDO khusus yang laik jalan/berfungsi	71	Unit	71	Unit	100,00%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.518.000	8.047.000	64,28%	4.471.000	35,72%	Jumlah KDO/KDO khusus yang memiliki surat izin	71	Unit	71	Unit	100,00%
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	508.414.283	498.466.868	98,04%	9.947.415	1,96%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebersihan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.501.758	286.705.900	90,87%	28.795.858	9,13%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.071.426	179.875.917	97,72%	4.195.509	2,28%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
18	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.205.224.855	13.176.486.637	99,78%	28.738.218	0,22%	Jumlah Laporan Kinerja Pelayanan Adminduk oleh Pekerja Kontrak Pelayanan Adminduk	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
19	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	70.525.000	70.525.000	100,00%	0	0,00%	Jumlah Laporan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
20	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	80.739.340	80.003.250	99,09%	736.090	0,91%	Jumlah Register Akta Catatan Sipil yang dikelola dan dirawat	1.350	Buku	1350	Buku	100,00%
21	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	39.600.000	38.572.500	97,41%	1.027.500	2,59%	Jumlah laporan profil kependudukan	100	Buku	100	Buku	100,00%
		25.591.399.823	24.859.824.463	97,14%	731.575.360	2,86%						100,00%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Suku Dinas Dukcapil Jakarta Timur

Tabel 3.35. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Jakarta Timur

REALISASI	Serapan Anggaran	94,36%
Efisiensi		5,64%
Output		100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		94,36%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja				
								Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.400.000	15.400.000	100,00%	-	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.425.698.795	9.224.454.400	88,48%	1.201.244.395	11,52%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan Tonner pelayanan Adminduk	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.268.012	122.266.500	98,39%	2.001.512	1,61%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	167.004.365	166.325.397	99,59%	678.968	0,41%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
5	Penyediaan Bahan/Material	275.737.440	275.737.440	100,00%	-	0,00%	Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi	66	Unit	66	Unit	100,00%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.790.050	18.973.515	73,57%	6.816.535	26,43%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.988.772	767.511.446	99,29%	5.477.326	0,71%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menjurut	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.047.320	145.594.675	79,98%	36.452.645	20,02%	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	412.077.600	374.712.800	90,93%	37.364.800	9,07%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	666.269.908	645.265.426	96,85%	21.004.482	3,15%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap keamanan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja				
								Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.818.359	288.799.199	87,30%	42.019.160	12,70%	Jumlah KDO/KDO Khusus yang Laik Jalan/Berfungsi	66	Unit	66	Unit	100,00%
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	910.690.621	842.167.433	92,48%	68.523.188	7,52%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.605.773	271.589.830	85,78%	45.015.943	14,22%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
14	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.212.240.160	13.094.679.421	99,11%	117.560.739	0,89%	Jumlah Laporan Kinerja Pelayanan Adminduk oleh Pekerja Kontrak Pelayanan Adminduk	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
15	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	145.860.000	143.545.000	98,41%	2.315.000	1,59%	Jumlah Laporan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	1	Laporan	100,00%
16	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	184.567.000	182.006.700	98,61%	2.560.300	1,39%	Jumlah Register Akta Catatan Sipil yang dikelola dan dirawat	3000	Buku	3000	Buku	100,00%
17	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	20.084.460	19.980.000	99,48%	104.460	0,52%	Jumlah buku profil kependudukan	100	buku	100	buku	100,00%
		28.188.148.635	26.599.009.182	94,36%	1.589.139.453	5,64%						100,00%

Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Suku Dinas Dukcapil Kepulauan Seribu

Tabel 3.36. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada Sudin Dinas Dukcapil Kepulauan Seribu

REALISASI	Serapan Anggaran	96,75%
	Efisiensi	3,25%
	Output	100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)	96,75%	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.033.914	126.859.680	90,59%	13.174.234	9,41%	1. Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan alat tulis kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0	0,00%	-	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.336.573	5.076.920	95,13%	259.653	4,87%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	127.788.776	114.585.300	89,67%	13.203.476	10,33%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menyurat	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.461.600	35.750.100	95,43%	1.711.500	4,57%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
6	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	776.922.888	769.815.871	99,09%	7.107.017	0,91%	Jumlah Laporan Kinerja Pelayanan Adminduk oleh Pekerja Kontrak Pelayanan Adminduk	12	laporan	12	laporan	100,00%
7	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.592.300	2.550.000	98,37%	42.300	1,63%	Jumlah Laporan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1	laporan	1	laporan	100,00%
8	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.981.880	2.970.000	99,60%	11.880	0,40%	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	628.155	615.000	97,91%	13.155	2,09%	Jumlah buku hasil registrasi dan profil kependudukan	30	Buku	30	Buku	100,00%
		1.093.746.086	1.058.222.871	96,75%	35.523.215	3,25%						100,00%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada UPTIK

Tabel 3.37. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada UPTIK

REALISASI	Serapan Anggaran	89,17%
	Efisiensi	10,72%
	Output	100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		95,36%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja				
			Target	Satuan	Capaian	Satuan		Target	Satuan	Capaian	Satuan	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.912.000	2.595.700	66,35%	1.316.300	33,65%	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	4	Indesk	4	Indeks	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.128.448.784	9.903.412.629	88,99%	1.225.036.155	11,01%	1. Jumlah anjungan dukcapil mandiri	8	Unit	8	Unit	100%
							2. Tersedianya Perangkat Pelayanan Adminduk	15	Jenis	15	Jenis	100%
							3. Persentase perangkat pelayanan adminduk yang laik fungsi	100	Per센	100	Per센	100%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.136.650	2.750.000	87,67%	386.650	12,33%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	4	Nilai	4	Nilai	100%
4	Penyediaan Bahan/Material	26.418.000	26418000	100,00%	-	0,00%	Jumlah KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi	8	Unit	8	Unit	100%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.357.200	5.275.900	71,71%	2.081.300	28,29%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nia	4	Nilai	100%
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.286.548.724	5.430.968.836	86,39%	835.590.952	13,29%	Persentase Aplikasi Penunjang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang laik fungsi	100	Per센	100	Per센	100%
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.485.500	225.685.200	96,25%	8.800.300	3,75%	1. Persentase komputer yang laik fungsi	100	Per센	100	Per센	100%
							2. Persentase printer yang laik fungsi	100	Per센	100	Per센	100%
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.209	24.018.841	80,06%	5.981.368	19,94%	1. Jumlah KDO/KDO khusus yang memiliki surat izin	8	Unit	8	Unit	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	
							2. Jumlah KDO/KDO khusus yang laik jalan/berfungsi	8	Unit	8	Unit	100%
9	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1.669.200.260	1669093655	99,99%	106.605	0,01%	Jumlah laporan kinerja tenaga teknis TIK	12	Laporan	12	Laporan	100%
		19.389.507.327	17.290.218.761	89,17%	2.079.299.630	10,72%						100,00%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada UPAK

Tabel 3.38. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 pada UPAK

REALISASI	Serapan Anggaran	98,74%
	Efisiensi	1,26%
	Output	100,00%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)		
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		98,74%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja					
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	Satuan	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan jasa administrasi keuangan	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.952.596	124.950.450	94,69%	7.002.146	5,31%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.994.183	19.864.560	99,35%	129.623	0,65%	Nilai kepuasan terhadap Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
4	Penyediaan Bahan/Material	11.781.720	11.750.000	99,73%	31.720	0,27%	Nilai kepuasan pemenuhan kebutuhan BBM dan material lainnya	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.559.920	33.296.000	96,34%	1.263.920	3,66%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan makanan dan minuman	4	Nilai	4	Nilai	100,00%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Indikator	Kinerja				
								Target	Satuan	Capaian	Satuan	%
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.415.731	74.394.132	99,97%	21.599	0,03%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap administrasi surat-menyurat	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	32.450.000	76,82%	9.790.000	23,18%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan mesin fotokopi	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.655.310	9.710.418	91,13%	944.892	8,87%	Nilai kepuasan pemeliharaan dan perizinan KDO/KDO Khusus	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.674.339	38.522.550	99,61%	151.789	0,39%	Nilai kepuasan pelayanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Nilai Kepuasan Pelayanan terhadap Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	4	Nilai	4	Nilai	100,00%
10	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1.290.700.124	1.289.722.205	99,92%	977.919	0,08%	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
11	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	190.032.322	187.116.096	98,47%	2.916.226	1,53%	Jumlah laporan Konsultasi	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
		1.846.506.245	1.823.276.411	98,74%	23.229.834	1,26%						100,00%

2. Capaian Sasaran Strategis dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerj Tahun 2022 selain berasal dari Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berasal dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dimana Dinas Dukcapil menjadi Penanggung Jawab beberapa KSD maupun terlibat dalam keberhasilan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya.

- a. Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD 12).

KSD ini memiliki Sasaran Strategis Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua, dalam KSD ini memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu

- 1) Verifikasi Data Kependudukan UHC semua segmen, Peserta PBI JK dan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda.

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersedianya Data Kependudukan UHC semua segmen Peserta PBI JK dan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu Tersedianya Data PBI JK dan PBPU dan BP dan data kepesertaan BPJS yang valid. Dilaksanakan setiap triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I, B06 untuk Triwulan II, B09 untuk Triwulan III dan B12 untuk Triwulan IV.

Tabel 3.39. Tersedianya Data PBI JK dan PBPU dan BP dan data kepesertaan BPJS yang valid KSD 12 Tahun 2022

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA22-B03M4	1. Tersedianya Data Ganda hasil pemanfaatan PBI JK dan PBPU dan BP 2. Tersedianya data Pemanfaatan DTKS dengan PBPU dan BP 3. Tersedianya Data kepesertaan JKN (UHC semua segmen)	100%	100%	Proses Pemanfaatan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri
2	TA22-B06M4	1. Tersedianya Data Ganda hasil pemanfaatan PBI JK dan PBPU dan BP 2. Tersedianya data Pemanfaatan DTKS dengan PBPU dan BP 3. Tersedianya Data kepesertaan JKN (UHC semua segmen)	100%	100%	Proses Pemanfaatan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri
3	TA22-B09M4	1. Tersedianya Data Ganda hasil pemanfaatan PBI JK dan PBPU dan BP 2. Tersedianya data Pemanfaatan DTKS dengan PBPU dan BP	100%	100%	Proses Pemanfaatan berdasarkan hasil koordinasi

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
		3. Tersedianya Data kepesertaan JKN (UHC semua segmen)			dengan Kemendagri
4	TA22-B12M4	1. Tersedianya Data Ganda hasil pemanfaatan PBI JK dan PBPU dan BP 2. Tersedianya data Pemanfaatan DTKS dengan PBPU dan BP 3. Tersedianya Data kepesertaan JKN (UHC semua segmen)	100%	100%	Proses Pemanfaatan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri

Capaian Dinas Dukcapil pada indikator KSD ini mencapai 100%, hal ini dikarenakan Dinas Dukcapil berhasil dalam

- Penyediaan Data Ganda hasil pemanfaatan PBI JK dan PBPU dan BP
- Penyediaan data Pemanfaatan DTKS dengan PBPU dan BP
- Penyediaan Data kepesertaan JKN (UHC semua segmen)

2) Tersedianya Data Sasaran Program Tahun 2023

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersedianya data sasaran program Tahun 2023, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu 100% Tersedianya data sasaran program Tahun 2023. KSD ini dilaksanakan pada 2 triwulan dengan Kode B03 untuk Triwulan I dan B09 untuk Triwulan III.

Tabel 3.40. Tersedianya Data PBI JK dan PBPU dan BP dan data kepesertaan BPJS yang valid KSD 12 Tahun 2022

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA22-B03M4	Hasil Konsolidasi Teknis penyediaan data sasaran program Tahun 2023	100%	100%	*Tahun 2020 perhitungan menggunakan data Proyeksi BPS *Tahun 2021 perhitungan menggunakan data dari Dukcapil secara manual melalui excel *Tahun 2022 perhitungan menggunakan data dari Dukcapil secara manual
2	TA22-B09M4	Hasil Konsolidasi Teknis penyediaan data sasaran program Tahun 2023	100%	100%	*Tahun 2020 perhitungan menggunakan data Proyeksi BPS *Tahun 2021 perhitungan menggunakan data dari Dukcapil secara manual melalui excel *Tahun 2022 perhitungan menggunakan data dari Dukcapil secara manual

Pada B03 Telah dilakukan rapat konsolidasi teknis antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan Disdukcapil DKI Jakarta pada hari selasa tanggal 8 Maret 2022 secara virtual melalui zoom meeting. Hasil dari rapat konsolidasi telah dituangkan ke dalam nota dinas yang dikirimkan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan B09 Telah ada koordinasi antara Dinas Dukcapil DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan DKI jakarta terkait tersedianya data sasaran program tahun 2023 melalui mekanisme API.

Saat ini penyampaian data sasaran (penduduk) dalam bentuk agregat sudah terfasilitasi melalui mekanisme API (web service) yang terhubung antara Disdukcapil DKI dengan Dinas Kesehatan. Dengan adanya mekanisme ini, Dinas Kesehatan akan lebih mudah merancang kegiatan berdasarkan data sasaran yang sudah terhubung

- b. Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui JakLingko (KSD 29) KSD ini memiliki Sasaran Strategis Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta, dalam KSD ini memiliki rencana aksi Evaluasi Jangkauan Rute Angkutan Umum yang terintegrasi dalam program Jak Lingko. Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya data agregat kependudukan per RW semester 1, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu Tersampaikannya data agregat kependudukan per RW semester 1 kepada Dinas Perhubungan. KSD ini hanya dilaksanakan pada Triwulan I (B03).

Tabel 3.41. KSD 29 Tahun 2022 - Tersusunnya data agregat kependudukan per RW semester 1

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B03M4	Penyediaan data agregat kependudukan per RW semester 1 tahun 2021 kepada Dinas Perhubungan (Januari)	100%	100%	Disdukcapil menerbitkan data kependudukan 2 kali dalam setahun (per semester) berdasarkan ketentuan Kemendagri (data yg dipublish adalah data agregat)

Terkait data jumlah penduduk per RW semester 1 Tahun 2021 sudah disampaikan kepada Dinas Perhubungan melalui Surat jawaban Kepala Dinas Dukcapil bernomor 365/-072.26 tanggal 10 Januari 2022. Surat ini untuk menjawab surat permohonan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 042/-1.811.125 tanggal 5 Januari 2022 mengenai permintaan data agregat kependudukan DKI Jakarta Semester 1 tahun 2021.

Catatan :

Disdukcapil menerbitkan data kependudukan 2 kali dalam satu tahun (per semester) berdasarkan ketentuan Kemendagri (data yg di-publish adalah data agregat)

- c. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39)

KSD ini memiliki Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, dalam KSD ini memiliki 8 (delapan) rencana aksi yang dilaksanakan setiap triwulan.

- 1) Verifikasi Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Terlaksananya penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu Tersusunnya Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. KSD ini dilaksanakan pada triwulan I dengan Kode B03.

Tabel 3.42. KSD 39 Tahun 2022 - Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1	TA22-B03M4	Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026	100%	100%	Telah disusun Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026

KSD ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan 1 dengan Kode B093 dengan diunggahnya/ upload Dokumen Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026 pada website KSD 2022

- 2) Penyusunan Rancangan Cascading Kinerja dan Matriks Peran Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023), ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023). KSD ini dilaksanakan pada triwulan III dengan Kode B09.

Tabel 3.43. KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023)

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B09M4	1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023	100%	100%	1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) 2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023

Pada Bulan September 2022 telah terselesaikannya

- Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4)
- Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023

KSD ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan 3 dengan Kode B09 dengan diunggahnya/ upload Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) dan Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 pada website KSD 2022

- 3) Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu tersusunnya :

- a) Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021
- b) Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2021

KSD ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan I dengan Kode B03 dengan diunggahnya/ upload Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinas Dukcapil TW IV Tahun 2021 dan Dokumen Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2021 pada website KSD 2022

Tabel 3.44. KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya Evaluasi Renja dan Evaluasi Perkin TW 4 Tahun 2021

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B03M4	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021 (selesai di akhir Januari 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2021 (selesai di akhir Januari 2022)	100%	100%	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021 (selesai di akhir Januari 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2021 (selesai di akhir Januari 2022)

4) Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I, TW II, TW III 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Merupakan gabungan dari 3 Rencana Aksi sekaligus yaitu Evaluasi Renja dan Evaluasi Perkin Triwulan I, II dan III dengan kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2022, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu tersusunnya:

- a) Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I, II dan III Tahun 2022
- b) Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I, II dan III Tahun 2022

Tabel 3.45. KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya Evaluasi Renja dan Evaluasi Perkin TW I, II & III Tahun 2022

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B06M4	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2022 (selesai di April 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2022 (selesai di akhir April 2022)	100%	100%	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2022 (selesai di April 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2022 (selesai di akhir April 2022)
2	TA22-B09M4	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2022 (selesai di Juli 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2022	100%	100%	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2022 (selesai di Juli 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2022

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
		(selesai di akhir Juli 2022)			(selesai di akhir Juli 2022)
3	TA22-B12M4	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2022 (selesai di Oktober 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2022 (selesai di akhir Oktober 2022)	100%	100%	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2022 (selesai di Oktober 2022) 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2022 (selesai di akhir Oktober 2022)

KSD ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan I dengan Kode B03 dengan diunggahnya/ upload Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinas Dukcapil TW I, II dan III Tahun 2022 dan Dokumen Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I, II dan III Tahun 2022 pada website KSD 2022.

5) Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

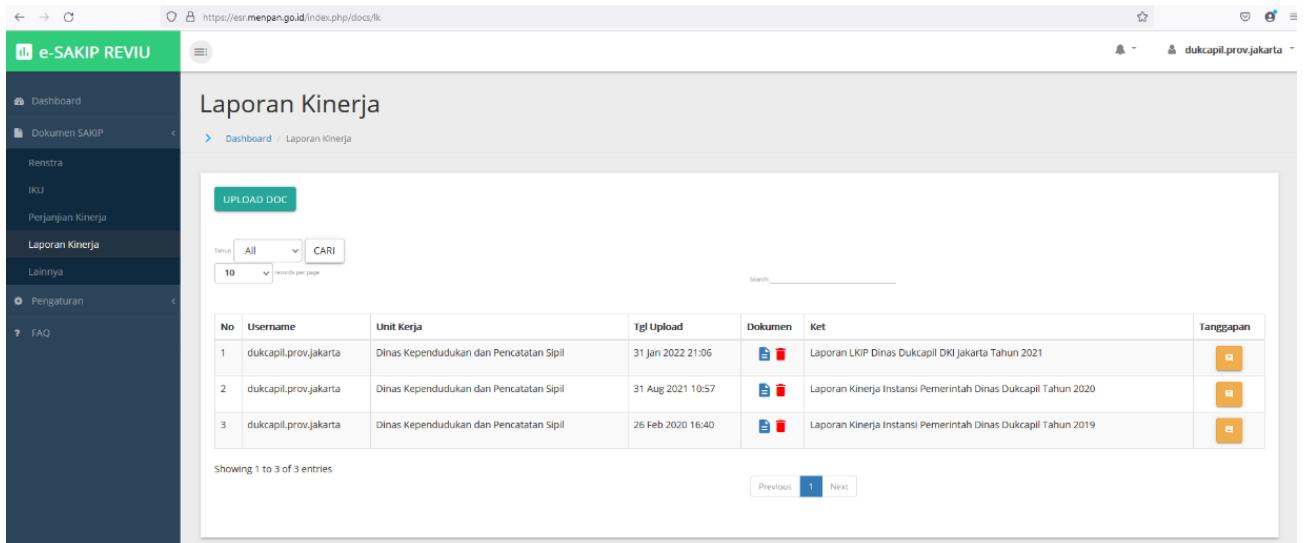
Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu, ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu tersusunnya:

- a) Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021
- b) Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada website esr.menpan.go.id

Tabel 3.46. KSD 39 Tahun 2022 - Tersusunnya LKIP Tahun 2021

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B03M4	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id (selesai akhir Januari 2022)	100%	100%	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id (selesai akhir Januari 2022)

Dokumen LKIP Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah disusun dan diupload pada website esr.menpan.go.id



Gambar 3.2. Screenshot Upload Dokumen LKIP 2021 pada system esr.menpan.go.id

6) Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022) sedangkan ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu tersusunnya Tersusunnya Rancangan Dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022).

Tabel 3.47. KSD 39 Tahun 2022 – Rancangan Dokumen Perkin dan SKP Tahun 2023

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B03M4	1. Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) 2. Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4 (dituangkan dalam bentuk cascading kinerja) 3. Laporan pegawai yang telah menginput SKP Tahun 2022	100%	100%	1. Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) 2. Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4 (dituangkan dalam bentuk cascading kinerja) 3. Laporan pegawai yang telah menginput SKP Tahun 2022

KSD ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan I dengan Kode B03 dengan diunggahnya/ upload pada website KSD 2022 :

- Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2)
- Rancangan Cascading Kinerja Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4
- Laporan pegawai yang telah menginput SKP Tahun 2022.

- d. Pengentasan Kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial (KSD 42)
- KSD ini memiliki Sasaran Strategis Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua, dalam KSD ini memiliki 8 (delapan) rencana aksi yang dilaksanakan setiap triwulan (B03, B06, B09 dan B12).

Tabel 3.48. KSD 42 Tahun 2022

100	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B03M4	1. Laporan pembaharuan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan data kependudukan sebagai basis data program pengentasan kemiskinan 2. Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri	100%	100%	1. Laporan pembaharuan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan data kependudukan sebagai basis data program pengentasan kemiskinan 2. Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri
2	TA22-B06M4	Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri	100%	100%	Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri
3	TA22-B09M4	Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri	100%	100%	Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri
4	TA22-B12M4	Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri	100%	100%	Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri

Keterangan :

- Pada B03 KSD ini Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta telah membuat 2 (dua) nota dinas kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat mengenai laporan pembaharuan PKS bagi perangkat daerah di OPD pemprov DKI Jakarta dan laporan perkembangan pengintegrasian NIK antara para OPD dengan Disdukcapil DKI Jakarta

- a) Tersedianya Laporan pembaharuan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan data kependudukan sebagai basis data program pengentasan kemiskinan
- b) Tersedianya Laporan perkembangan pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta dengan data Kemendagri
- 2) Pada B06, B09 dan B12 KSD ini Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta telah membuat nota dinas kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat mengenai laporan perkembangan pengintegrasian NIK antara para OPD dengan Disdukcapil DKI Jakarta dan Nota Dinas tersebut telah diunggah pada website KSD.
- e. Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61)
- KSD ini memiliki Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, dalam KSD ini memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu :
- a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Terlaksananya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 sedangkan ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022

Tabel 3.49. KSD 61 – Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B03M4	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal 3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 1 Tahun 2022	100%	100%	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal 3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 1 Tahun 2022
2	TA22-B06M4	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal	100%	100%	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
		3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 2 Tahun 2022			3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 2 Tahun 2022
3	TA22-B09M4	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal 3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 3 Tahun 2022	100%	100%	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal 3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 3 Tahun 2022
4	TA22-B06M4	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal 3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 4 Tahun 2022	100%	100%	1. Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Data calon responden internal dan eksternal 3. Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan 4. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 4 Tahun 2022

Keterangan:

Dinas Dukcapil telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022 yang dilakukan terhadap 2 responden yaitu responden internal (pegawai disdukcapil) dan responden eksternal (masyarakat).

Survey responden eksternal menggunakan link survey yang diberikan kepada responden, sementara untuk survey responden internal menggunakan aplikasi JAKI. Adapun komponen survey IKM sebagai berikut :

- Tersedianya Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 1 2022

- b) Tersedianya Data calon responden internal dan eksternal
- c) Tersedianya Data jumlah penerima layanan pada masing-masing pelayanan
- d) Tersedianya Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 1 Tahun 202

KSD ini telah selesai dilaksanakan dengan diunggahnya/ upload dokumen bukti tersebut pada website KSD 2022.

- b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022

Tabel 3.50. KSD 61 – Pengawasan APIP Tahun 2022

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B06M4	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat. Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%	100%	100%	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat. Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%
2	TA22-B12M4	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%	100%	100%	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%

Keterangan:

TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022. Target Capaian : 90%, pada B03 dan B09 tidak ada TLHP APIP pada Dinas Dukcapil sehingga persentase capaian KSD dinilai 100% dan telah ditindaklanjuti dan mendapatkan Berita Acara hasil verifikasi Inspektorat

- f. Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD 63)
- KSD ini memiliki Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi, dalam KSD ini memiliki rencana aksi yang dilaksanakan pada

triwulan IV (B12) yaitu Evaluasi SPBE pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kriteria Keberhasilan pada rencana aksi ini adalah Terlaksananya pengumpulan data isian form evaluasi SPBE Perangkat Daerah sedangkan ukuran keberhasilan dari KSD ini yaitu Tersampaikannya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 3.51. KSD 63 – SPBE Tahun 2022

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Data Dukung
1	TA22-B12M4	Surat penyampaian dan lampiran data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE lingkup Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	100	Surat penyampaian dan lampiran data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE lingkup Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KSD ini Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta telah membuat Surat penyampaian dan lampiran data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE lingkup Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan surat tersebut telah diunggah pada website KSD

3. Capaian Sasaran Khusus

- a. Opini laporan keuangan daerah (Target 3 Nilai (WTP), realisasi WTP)
Berdasar UU No 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis Opini yang diberikan BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu :
 - 1) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) : Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
 - 2) Opini Tidak Wajar atau adversed opinion : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar semua material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penilaian WTP, yang merupakan penilaian paling baik dari jenis penilaian yang diberikan BPK.



Gambar 3.3. WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b. Persentase Pemanfaatan E-Order

Sebagai indikator dari Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaksanaan e-Order tidak hanya pada Dinas, namun juga pada Suku Dinas dan UPT yang akan dikeluarkan laporan penggunaan e-Order setiap bulannya oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan e-Order harus dilaporkan setiap Triwulan nya kepada Asisten pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan e-Order pada Dinas Dukcapil DKI Jakarta didasarkan pada Anggaran Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Jamuan Tamu dan Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan, dimana terdapat

pengecualian terhadap belanja Air Mineral Galon, Kopi, Teh dan Gula bisa tidak masuk ke dalam pengadaan menggunakan system e-Order tersebut.

Berdasarkan riwayat transaksi pemesanan pada e-Order, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 telah melakukan 69 transaksi melalui e-Order dengan Nilai Realisasi Belanja e-order sebagai berikut

Tabel 3.52. Pelaksanaan e-Order Tahun 2022

No	Kode Rekening	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.485.000	69.485.000	100,00%
2	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.750.000	5.940.000	28,63%
3	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.400.000	10.400.000	100,00%
	Total		100.635.000	85.825.000	85,28%

Seluruh Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Tamu serta Aktivitas Lapangan telah dilakukan seluruhnya melalui e-order dan seluruh transaksi telah selesai dibayarkan oleh Bendahara, sehingga realisasi e-Order Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 100%. Seluruh bukti capaian pelaksanaan e-Order diinput ke dalam system e TPP Kepala Dinas dan divalidasi oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- c. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : (target 100%, realisasi 100%).

Merupakan pelaksanaan dari sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah, aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam indikator ini antara lain :

- 1) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.
- 2) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfo menyusun editorial plan lingkup Provinsi.
- 3) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.
- 4) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Penghitungan:

- Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan.
- Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan.
- Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.
- Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

Adapun Realisasi sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100% Cara pencapaian dalam indikator ini dengan melaporkan segala bentuk rencana kerja pelayanan yang akan dilaksanakan pada masyarakat dan melakukan Publikasi di dalam media sosial Dinas Dukcapil dan dilaporkan ke dalam website <https://komunikasi.jakarta.go.id>, berikut contoh yang dilaporkan dalam indikator ini

The screenshot shows a table listing seven entries of communication strategies. Each entry includes the name of the strategy, a download link, the quarter it was created, and creation date. There are also 'Ubah' (Edit) and 'Hapus' (Delete) buttons for each entry.

No	Nama Program/Kegiatan Unggulan	Materi Paparan	Triwulan	Tanggal Buat	Aksi
1	1. Layanan Adminduk Bagi Warga DKI Jakarta	1. Download Materi	1. Triwulan 4	2022-12-29 11:51:15	<button>Ubah</button> <button>Hapus</button>
2	1. Layanan Adminduk Bagi Warga DKI Jakarta	1. Download Materi	1. Triwulan 3	2022-09-28 08:06:47	
3	1. Layanan Adminduk Bagi Warga DKI Jakarta	1. Download Materi	1. Triwulan 2	2022-06-30 09:44:42	
4	1. Layanan Adminduk Bagi Warga DKI Jakarta	1. Download Materi	1. Triwulan 1	2022-04-01 10:43:07	
5	1. Layanan Adminduk Bagi Warga DKI Jakarta	1. Download Materi	1. Triwulan 4	2021-12-29 14:39:25	
6	1. Layanan Adminduk Bagi Warga DKI Jakarta	1. Download Materi	1. Triwulan 3	2021-10-04 09:38:22	
7	1. Layanan Adminduk Bagi Warga DKI Jakarta	1. Download Materi	1. Triwulan 2	2021-06-30 11:45:40	

Gambar 3.4. Strategi Komunikasi Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

Bukti capaian pelaksanaan implementasi rencana strategi komunikasi dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan bukti program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil twlah disosialisasikan kepada warga DKI Jakarta, baik dalam bentuk produksi dan penayangan materi infografis, motion grafis, video PSA dan kegiatan tatap muka.

Materi-materi komunikasi dimaksud telah berupaya menjelaskan antara lain tentang infomasi Layanan Administrasi Kependudukan selama Pandemi. Pelayanan Jemput Bola baik dihari libur maupun bagi dissabilitas, serta layanan lainnya.

**REKAPITULASI PENYIAPAN DAN PUBLIKASI
MATERI KOMUNIKASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA DKI JAKARTA**

NO	TANGGAL	JUDUL	MEDIA & TAUTAN	FOTO
1.	04 Oktober 2022	Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi dalam kegiatan Festival Kolaborasi Jakarta pada Tahun 2022 Bersama Gubernur DKI Jakarta pada hari Minggu, Tgl 2 Oktober pukul 18.30 WIB Bertempat di Taman Fatahillah Kota Tua Kegiatan ini dihadiri juga oleh delapan Kolaborator yang bekerja sama dengan Dukcapil Jakarta, antara lain : 1. BPJS Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2. Vihara Hemadhiro Mettavati 3. RS. Pondok Indah - Puri Indah 4. Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jemaat Petamburan 5. PT Paket Anak Bangsa GoSend 6. VC Gamers 7. PGC Cillitan 8. Koja Trade Mall Jawara! "Jagonya Melayani Warga" @dkijakarta @aniebsaswedan @budiawaludin	INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mplCjPivSzp9e4/	
2.	04 Oktober 2022	Kolaborasi nyata telah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Jakarta dengan BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek, yaitu dalam proses pendaftaran JKN, pendaftaran bayi baru lahir yang terintegrasi dengan SIMPATIK DUKCAPIL Selain itu juga dalam upaya meningkatkan akurasi peserta JKN sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih berkualitas Ayo kembangkan Kolaborasi dengan Solid dengan Semangat yang menggema !!! @dkijakarta @aniebsaswedan @budiawaludin @bona.evita @livin_inisiatif @bojkesehatan_ni @bojkesehatan_asktheexperts #Dukcapil #bojkesehatan #dukcapiinfo #dukcapijakarta #festivalkolaborasijakarta #mk2022 #dkijakarta #kotakolaborasi #5tahunkolaborasi #welovejakarta	INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mplCjPzbInpxXW/	

Gambar 3.5. Laporan Publikasi Strategi Komunikasi



NOTA DINAS

Kepada Yth : Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 8245/RB.05.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Publikasi Materi Komunikasi Renkin Strategi Komunikasi Triwulan IV Tahun 2022

Sehubungan dengan pembuatan Renkin Strategi Komunikasi Program Layanan Administrasi Kependudukan bagi warga DKI Jakarta. Telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempublikasikan Program/Kegiatan Layanan Administrasi Kependudukan bagi warga DKI Jakarta.
2. Terkait program yang dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kampanye dan sosialisasi Program/Kegiatan Layanan Administrasi Kependudukan bagi warga DKI Jakarta, baik dalam bentuk produksi dan penayangan materi infografis, motion grafis, video PSA dan kegiatan tatap muka (terlampir).
3. Materi-materi komunikasi dimaksud telah berupaya menjelaskan antara lain tentang Infomasi Layanan Administrasi Kependudukan selama Pandemi. Pelayanan Jemput Bola baik diharu libur maupun bagi disabilitas, serta layanan lainnya.
4. Untuk perencanaan publikasi terkait Layanan Administrasi Kependudukan bagi warga DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Jakarta, 20 Desember 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Budi Awaluddin
NIP 192801171997111001

Tembusan :
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- g. Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2022 (target nilai 91 (AA), realisasi 97,56 (AA))

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri dari evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%.

Adapun SAKIP Tahun 2022 sampai dengan saat ini masih berproses di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 3417/PA.02.02 tertanggal 26 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022, dilaporkan bahwa Hasil SAKIP Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencapai Nilai 97,56 (AA) dan berada pada peringkat Pertama dari 41 Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	
		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	97,56	AA
2	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	97,11	AA
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	96,81	AA
4	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	96,68	AA
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	96,66	AA
6	Kota Administrasi Jakarta Pusat	96,66	AA
7	Kota Administrasi Jakarta Timur	96,41	AA
8	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	96,26	AA
9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	96,01	AA
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	95,31	AA

Gambar 3.6. Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022

Hal ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berhasil mengulangi keberhasilan sebagai Perangkat Daerah dengan capaian SAKIP terbaik seperti pada tahun 2021.

No	Komponen	Bobot	Nilai 2021	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30%	29,13%	Perencanaan Kinerja	30%	30,00%
b.	Pengukuran Kinerja	25%	23,44%	Pengukuran Kinerja	25%	30,00%
c.	Pelaporan Kinerja	15%	14,69%	Pelaporan Kinerja	15%	14,55%
d.	Evaluasi Internal	10%	10,00%	Evaluasi Internal	25%	23,01%
e.	Capaian Kinerja	20%	18,33%			
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	95,58%	Nilai Hasil Evaluasi	100%	97,56%
	Predikat Implementasi SAKIP		AA	Predikat Implementasi SAKIP		AA

Gambar 3.7. Perbandingan Penilaian SAKIP 2020 dan 2021

- h. Nilai PMP RB Perangkat Daerah (target nilai 92%, realisasi 99,33%)
Nilai PMPRB merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Biro ORB kepada setiap SKPD. Penilaian dilakukan melalui pemenuhan kertas kerja yang telah disediakan.

Model PMPRB terdiri dari dua komponen, yang disebut dengan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit adalah seluruh aspek internal organisasi pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk mewujudkan output dan outcome bagi masyarakat/pengguna layanan, SDM Aparaturnya, dan bagi komunitas lokal, nasional dan internasional, serta mewujudkan kinerja yang jadi tujuannya.

Komponen Pengungkit dalam model PMPRB terdiri dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan Dan Sumber Daya, dan Proses. Berikut adalah tabel penilaian PMPRB untuk masing-masing SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1506/PA.02.02 tertanggal 11 Juli 2022 Perihal Hasil Evaluasi atas PMPRB Tahun 2022, dilaporkan bahwa Nilai

Pengungkit PMPRB Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencapai Nilai 36,06 (99,33%) dan berada pada peringkat Pertama dari 42 Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

NO	SKPD	PENGUNGKIT		PEMENUHAN		REFORM	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36,06	99,33%	14,36	98,34%	21,70	100,00%
2	Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara	35,53	98,98%	14,08	99,12%	21,46	98,89%
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	35,87	98,81%	14,46	99,02%	21,41	98,67%
4	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	35,81	98,64%	14,60	100,00%	21,21	97,73%
5	Inspektorat	35,75	98,48%	14,53	99,49%	21,22	97,80%
6	Dinas Perhubungan	35,72	98,39%	14,50	99,32%	21,22	97,77%
7	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	35,62	98,14%	14,47	99,14%	21,15	97,47%
8	Badan Kepegawaian Daerah	35,61	98,11%	14,50	99,32%	21,11	97,29%
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35,60	98,06%	14,17	97,03%	21,43	98,75%
10	Dinas Sumber Daya Air	35,57	97,99%	13,78	94,40%	21,70	100,00%
11	Dinas Bina Marga	35,54	97,90%	14,48	99,20%	21,06	97,03%
12	Badan Pengelola Aset Daerah	35,49	97,78%	13,88	95,09%	21,61	99,58%
13	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	35,44	97,62%	14,60	100,00%	20,84	96,03%
14	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	35,13 ✓	96,77%	13,70 ✓	93,84%	21,43	98,74%
15	Sekretariat Daerah	35,09	96,67%	13,81	94,58%	21,28	98,08%

Gambar 3.8. Bobot Penilaian PMPRB Tahun 2022

Hal ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan capaian terhadap Hasil Evaluasi PMPRB Tahun 2021 dimana masuk pada peringkat ke tiga dengan Nilai Komponen Pengungkit sebesar 35,20 (96,97).

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pengungkit (36,30)	% %	Nilai Pemenuhan		Nilai Reform	
				Nilai (14,60)	%	Nilai (21,70)	%
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35,90	98.90%	14,46	99,04%	21,44	98.80%
2	Dinas Sumber Daya Air	35,53	97.88%	14,42	98,77%	21,11	97.28%
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35,20	96.97%	14,10	96,58%	21,10	97.24%
4	Badan Pengelolaan Aset Daerah	34,900	96.14%	13,58	93,01%	21,32	98,25%
5	Dinas Lingkungan Hidup	34,900	96.14%	13,58	93,01%	21,32	98,25%
6	Inspektorat	34,78	95.81%	13,87	95,00%	20,91	96,36%
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34,71	95,62%	14,42	98,77%	20,29	93,50%
8	Kota Administrasi Jakarta Pusat	34,69	95,56%	14,12	96,71%	20,57	94,79%
9	Dinas Bina Marga	34,60	95,32%	13,66	93,56%	20,94	96,50%
10	Dinas Kesehatan	34,30	94,49%	14,18	97,12%	20,12	92,72%
11	Kota Administrasi Jakarta Timur	34,21	94,24%	13,87	95,00%	20,34	93,73%
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34,12	93,99%	13,50	92,47%	20,62	95,02%
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	33,91	93,42%	13,73	94,04%	20,18	93,00%
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33,90	93,37%	13,52	92,60%	20,38	93,89%
15	Kota Administrasi Jakarta Selatan	33,85	93,25%	13,95	95,55%	19,90	91,71%

Gambar 3.9. Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2021

- Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi (target 100%, Realisasi 100%)
Sebagai Indikator dari Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan, dalam indikator ini yang diperhitungkan adalah

Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut. Indikator ini dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta setiap triwulannya.

**TABEL PERHITUNGAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
TERKAIT PENGGUNAAN E-OFFICE DISPOSISI MASUK DAN SURAT MASUK
TRIWULAN IV**

Nama Jabatan	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nama Pejabat	:	Budi Awaluddin
Triwulan	:	IV
1	Jumlah Semua Disposisi Masuk	: 97
2	Jumlah Disposisi Masuk Diproses (Laporkan dan Teruskan)	: 97
3	Realisasi Disposisi Masuk (2/1x100%)	: 100%
4	Jumlah Surat Masuk	: 1.144
5	Jumlah Surat Masuk Belum Ditindaklanjuti	: 1.144
6	Realisasi Surat Masuk (5/4x100%)	: 100%
7	Realisasi Disposisi Masuk (3)	: 100%
8	Realisasi Surat Masuk (6)	: 100%
9	Realisasi Perjanjian Kinerja ([7+8]/2)	: 100%

Mengetahui
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi
DKI Jakarta


Sigit Wijatmoko
NIP 197408301993111001

Tanggal, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

Gambar 3.10. Perhitungan e-Office Tahun 2022

- j. Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal (Target 100%)

Merupakan pelaksanaan dari Sasaran Peningkatan penggunaan e-Produk hukum, perhitungan kinerja indikator ini adalah Penyambungan antara

sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.

Pada Tahun 2022 Dinas Dukcapil tidak mengajukan Produk Hukum, sehingga capaian mencapai 100%.



Gambar 3.11. Nota Dinas Penggunaan e-Produk Hukum Tahun 2022

4. Capaian Sasaran Operasional

- a. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (target 100%, realisasi 100%)

Presentase ini menilai Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan arahan lain) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%. Nilai realisasi Dinas Dukcapil adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah di tindak lanjuti sebanyak 9 arahan gubernur baik yang bersifat Informasi maupun yang membutuhkan tindak lanjut dan (100%).

Tabel 3.53. Realisasi TL Arahan Gubernur Tahun 2022

ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
4592	29-12-2022	Siapkan data penduduk baru	30-01-2023	Informasi	
4531	29-12-2022	<ul style="list-style-type: none"> - data hasil cleansing akan diberikan kepada DPAPP dan Muskel (Dinas Sosial) - Kita harus mulai dengan mitigasi masalah, jika data sudah benar, kita akan rilis di media - konsekuensi keputusan kita adalah HAM; saya minta agar Para Walikota dan Bupati menginformasikan jajaran kewilayahan (Camat dan Lurah) untuk mendampingi dan mendukung Disdukcapil. 	30-01-2023	Informasi	
4511	29-12-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan duduk bersama membicarakan data. cleansing data bersama. - diskusi lebih lanjut mengenai data - data hasil cleansing akan digunakan sebagai dasar pemberian bantuan kita ke depannya - Kepala Dinas agar menyiapkan data untuk pembicaraan dengan Dirjen Dukcapil terkait cleansing data 	13-01-2023	Selesai	valid
4417	28-11-2022	Kepala Dinas Dukcapil agar membuatkan surat Pj. Gubernur dengan maksud meminta bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk membicarakan kebijakan perapian identitas penduduk. Siapkan data-data dan informasi permasalahan aturan kependudukan di Dukcapil yang berdampak kemiskinan di DKI Jakarta naik	23-12-2022	Selesai	valid
4416	28-11-2022	Bentuk tim kecil untuk cleansing database yang sudah ada dan tersebar di dinas-dinas terkait penerima KJP dan Bansos. Kepala BPKD agar bantu mengarahkan	30-01-2023	Informasi	
4396	28-11-2022	Setiap Kepala Dinas yang membuat perbal ditandatangani Gubernur, perlu kehati-hatian. Pastikan tidak menimbulkan risiko dan mereviu kembali usulan-usulan Raperda, jangan sampai memiliki multi-intrepretasi atau menimbulkan perbedaan pendapat jika ada pergantian pejabat. Biro Hukum menjadi pertahanan dalam reviu peraturan daerah.	30-01-2023	Informasi	

ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
4392	28-11-2022	Melakukan percepatan belanja modal, khususnya pengadaan lahan dapat segera terealisasi.	30-01-2023	Informasi	
4391	28-11-2022	<ol style="list-style-type: none"> Setiap penambahan usulan-usulan anggaran dari Dinas-dinas yang diluar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus terlebih dahulu dibicarakan kepada TAPD Dinas-dinas memeriksa terlebih dahulu Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atas permintaan Hibah dan memastikan pembanding/penyedia yang sepadan terhadap permintaan hibah barang-barang yang spesifik. Saat APBD tahun 2023 telah turun, maka anggaran yang bermanfaat untuk rakyat dapat langsung segera direalisasikan, seperti: KJP, Bansos, perbaikan jalan dan lainnya. 	30-01-2023	Informasi	
4172	29-04-2022	Dinas Dukcapil dan Dinas Kominfo agar memberikan dukungan yang lengkap untuk PPDB Tahun 2022 sejak awal proses. Kadis Pendidikan, Dukcapil, dan Kominfo agar bersinergi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan PPDB Tahun 2022 dengan baik.	30-01-2023	Informasi	

- b. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (Target 100%, Realisasi 100%)

Perhitungan kinerja dalam indikator ini dengan menghitung Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%, sampai dengan saat ini seluruh aduan masyarakat telah ditindak lanjuti, sehingga dapat dikatakan apabila capaian kinerja sebesar 100%

Aduan masyarakat berasal dari berbagai macam chanel yang dimiliki Dinas Dukcapil antara lain Email, Facebook, JAKI, SP4N Lapor dan Twitter yang selesai ditindaklanjuti berdasarkan Triwulan.

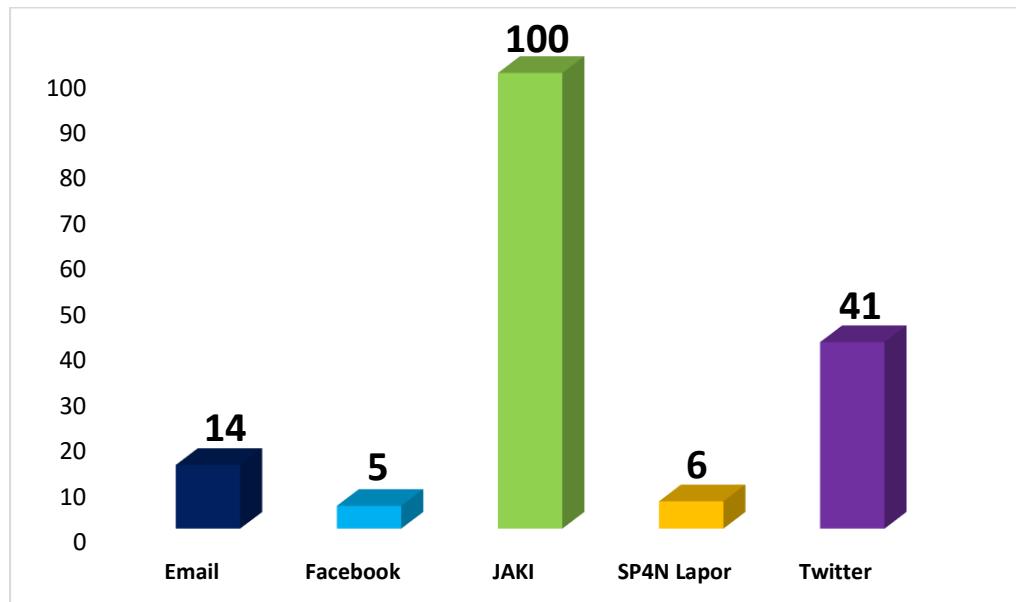
1) TL Aduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan I telah diselesaikan sebanyak 166 Aduan Masyarakat dengan rincian.

Tabel 3.54. Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022

PD/ UKP	Email	Facebook	JAKI	SP4N Lapor	Twitter	Jumlah
DKI Jakarta	6	2	26	1	22	57
Jakarta Pusat	-	1	1	-	1	3
Jakarta Utara	2	1	10	1	3	17
Jakarta Barat	3	-	8	1	5	17
Jakarta Selatan	1	-	14	-	4	19

PD/ UKP	Email	Facebook	JAKI	SP4N Lapor	Twitter	Jumlah
Jakarta Timur	2	1	41	3	6	53
TOTAL	14	5	100	6	41	166



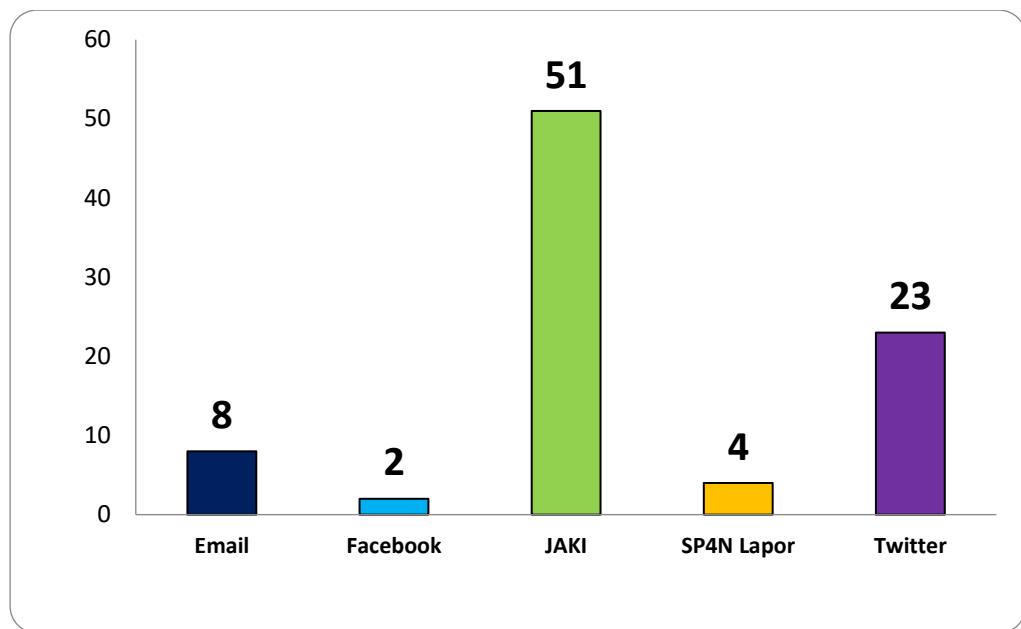
Gambar 3.12. Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022

2) TL Aduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022

Pada triwulan II telah diselesaikan sebanyak 88 Aduan Masyarakat dengan rincian.

Tabel 3.55. Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022

PD/ UKP	Email	Facebook	JAKI	SP4N Lapor	Twitter	Jumlah
DKI Jakarta	1	1	26	3	16	47
Jakarta Pusat	3	-	3	-	1	7
Jakarta Utara	-	-	3	-	2	5
Jakarta Barat	2	-	4	1	-	7
Jakarta Selatan	1	1	4	-	2	8
Jakarta Timur	1	-	11	-	2	14
TOTAL	8	2	51	4	23	88



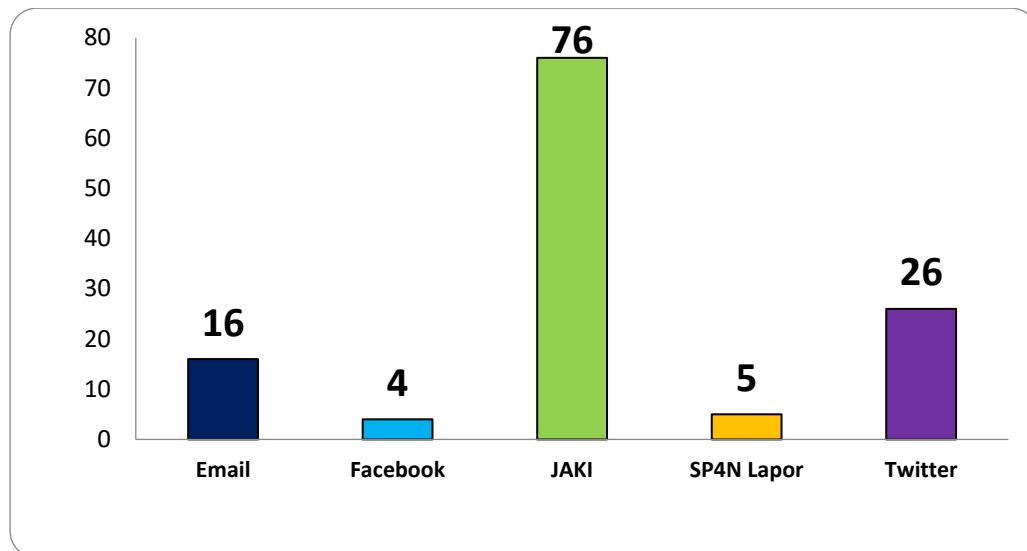
Gambar 3.13. Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022

3) TL Aduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2022

Pada triwulan III telah diselesaikan sebanyak 127 Aduan Masyarakat dengan rincian.

Tabel 3.56. Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2022

PD/ UKP	Email	Facebook	JAKI	SP4N Lapor	Twitter	Jumlah
DKI Jakarta	7	1	25	3	12	48
Jakarta Pusat	-	-	8	-	1	9
Jakarta Utara	1	1	5	-	1	8
Jakarta Barat	-	-	4	-	4	8
Jakarta Selatan	1	2	9	-	-	12
Jakarta Timur	7	-	25	2	8	42
TOTAL	16	4	76	5	26	127



Gambar 3.14. Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2022

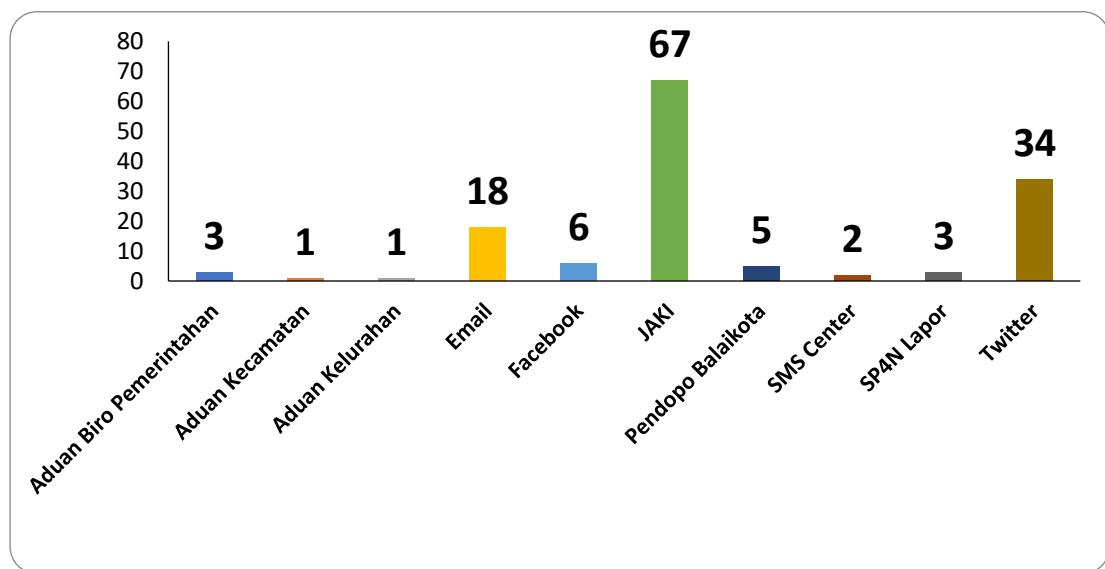
4) TL Aduan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2022

Pada triwulan IV telah diselesaikan sebanyak 140 Aduan Masyarakat yang tidak hanya berasal Email, Facebook, JAKI, SP4N Lapor dan Twitter dari tapi juga dari kanal lainnya yaitu Aduan Biro Pemerintahan, Aduan Kecamatan, Aduan Kelurahan, Pendopo Balaikota dan SMS Center, hal ini terjadi dikarenakan Pj. Gubenur membuka kanal aduan masyarakat secara langsung di Pendopo Balaikota dan lainnya.

dengan rincian.

Tabel 3.57. Realisasi TL Aduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022

PD/ UKP	Aduan Biro Pemerintahan	Aduan Kecamatan	Aduan Kelurahan	Email	Face book	JAKI	Pendopo Balaikota	SMS Center	SP4N Lapor	Twitter	Jumlah
DKI Jakarta	1	1		5	3	22	2	1	2	16	53
Jakarta Pusat	2		1	2	1	1				1	8
Jakarta Utara				4	2	11	1			5	23
Jakarta Barat				4		7		1		4	16
Jakarta Selatan				1		11				1	13
Jakarta Timur				2		15	2		1	7	27
TOTAL	3	1	1	18	6	67	5	2	3	34	140



Gambar 3.15. Grafik Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2022

Keseluruhan dari Aduan Masyarakat yang ada pada Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah diselesaikan sebanyak 521 aduan masyarakat.

- c. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Merupakan pelaksanaan Sasaran Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), dengan penghitungan kinerja 90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

Nilai realisasi Dinas Dukcapil adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah di tindak lanjuti sebanyak 5 LHP yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Berita Acara Rencana Kinerja Kepala Perangkat Daerah Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun LHP BPK yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Triwulan I Tahun 2022

LKPD 2013 Temuan 11 BPK RI

Memerintahkan Kepala BPKD untuk mengelola dan mengamankan aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik secara legal dan formal atas aset tanah milik Dinas Dukcapil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 1650/TM.12.00 tanggal 21 Maret 2021 tentang Progres Penerbitan Sertifikat Tanah Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta (0,25), pada akhir tahun 2022 telah diterbitkan Sertifikat Tanah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

**BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

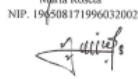
Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW I Tahun 2022

NO	PENILAIAN PERKIN URAIAN	TW I		TINDAK LANJUT SKPD	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT
		Jumlah	Nilai (Rp)		
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Saldo TLHP BPK RI Cut Off Desember 2021 yang belum selesai Ditindaklanjuti)	1	0,00	LKPD 2013 nomor 11 BPK RI Memerintahkan Kepala BPKD untuk mengelola dan mengamankan aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik secara legal dan formal atas aset tanah milik Dinas Dukcapil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	
2	Tambahan Rekomendasi (Jika ada LHP Baru)	0	0,00		
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	1	0,00		
4	Target (Jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	25%	Ditindak lanjuti dengan surat nomor 1650/TM.12.00 tanggal 21 Maret 2021 hal Progres Penerbitan Sertifikat Tanah Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta (0,25)	
		Jumlah	0,25	0,00	
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	25,00%	#DIV/0!	
		Jumlah	0,25	0,00	
6	Capaian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana/target)	Presentase	100,00%	#DIV/0!	
7	Capaian Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja	Presentase	25,00%		

Keterangan :

- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Tindaklanjuti atas LHP yang terbit mulai tahun 2005
- Tambah Rekomendasi adalah jumlah rekomendasi yang ditambahkan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 80% dari Jumlah Rekomendasi
- Apabila Realisasi Target Total di akhir triwulan tidak mencapai 80% dari Jumlah Keseluruhan Rekomendasi maka verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% walaupun realisasi triwulan IV (TW IV) mencapai target triwulan IV
- Realisasi adalah Jumlah Rekomendasi yang selesai di Tindaklanjuti setiap semester
- Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian tetap 100%
- Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisanya rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan.

Pengguna Verifikator
Pemantauan Lanjut

Maria Roseta
NIP. 196508171996032002

Zetrina Sofia
NIP 197705052006042053

Mengetahui :
Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator

Dina Himawati
NIP. 197112021998032004


Jl. Pemimpin Daerah No. 1
BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
March 2022
Penangkat Daerah

Budi Awiuddin
NIP. 19780117199711001

Gambar 3.16. Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan I 2022

2. Triwulan II Tahun 2022

Pada Triwulan II Tahun 2022 berhasil diselesaikan 2 (dua) LHP BPK RI dengan NOMOR: 11/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2022

BPK merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar memerintahkan kepada:

Huruf a. Para Kepala OPD terkait untuk mengintegrasikan dan memutakhirkan Aplikasi Jakarta Satu sesuai Instruksi Gubemur Nomor 34 Tahun 2018;

Huruf c. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala DCKTRP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perindustrian dan Sipil, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial supaya mengintegrasikan dan memutakhirkkan data di Jakarta Satu sesuai Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018; dan

Ditindaklanjuti dengan surat No. 1589/PC.02.00 tanggal 16 Maret 2022 hal Penyampaian Data Penduduk untuk Jakarta Satu, dan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan SKPD terkait tentang Integrasi Data Berbasis Nomor Induk Kependudukan dalam Sistem Peta Jakarta Satu.

BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH
PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berikut ini kami sampaikan progres pernyataan progres pernyataan TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW II Tahun 2022

NO	PENILAIAN PERKIN URAIAN	TW I		TW II		TINDAK LANJUT SKPD	BHP NOMOR: 1010007100125010002 BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA agar memerintahkan kepada	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)			
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Saldo TLHP BPS, RI Cat Off Desember 2021 yang belum Selsai Dikirim/Sampai)	1	0,00	1,00	0,00		a. Para Kepala OPD terkait untuk mengintegrasikan dan memerintahkan Aplikasi Jakarta Satu mesin Instroku Gubernur Nomor 34 Tahun 2018;	
2	Tambahan Rekomendasi (Jika ada LHP Baru)	0	0,00	5,00	0,00		b. Kepala Balai Perdagangan, Bursa, Kepala Balai Pengelola Aset Daerah, Kepala DCKTRP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial agar memerintahkan mengintegrasikan dan memerintahkan data di Jakarta Satu sesuai Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018; dan	
3	Jumlah Rekomendasi yang harus dilaksanajati	1	0,00	6,00	0,00		c. Berita Acara Rencana Kinerja Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan IV Tahun 2021	
4	Target (Jumlah pencapaian yang ditentukan secara nyata dan tenurik setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	25%	25%			d. Kepala Balai Perdagangan, Bursa, Kepala Balai Pengelola Aset Daerah, Kepala DCKTRP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial agar memerintahkan mengintegrasikan dan memerintahkan data di Jakarta Satu sesuai Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018; dan	
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	25,00%	#DIV/0!	25,00%	#DIV/0!		
6	Capaian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana/target)	Presentase	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!		
7	Capaian Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja	Presentase	25,00%		25,00%			

- Keterangan :
- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Tindaklanjuti atau LHP yang telah mulai tahun 2005
 - Target adalah Jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang ditetapkan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 90% dari Jumlah Rekomendasi.
 - Apabila Realisasi Target Total dan tahun tidak mencapai 90% dari Jumlah Keterlambatan Rekomendasi maka verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100%
 - Realisasi adalah jumlah pencapaian setiap triwulan.
 - Realisasi adalah jumlah Rekomendasi yang selesai di Tindaklanjuti setiap semester.
 - Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian lebih 100%.
 - Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (berbentuk LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan.

Pengawas Verifikator
Peninjauan Tindak Lanjut

Maria Rosita
NIP. 196508171996032002


Zenna Sofia
NIP. 197705052006042053

Mengetahui :
Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator

Dina Hamzah
NIP. 197112021998032004

Jakarta, Juni 2022
Perangkat Daerah

Budi Awanuddin
NIP. 19700117199711001

Gambar 3.17. Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan II 2022

3. Triwulan III Tahun 2022

Berhasil diselesaikan LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

BPK merekomendasikan Gubemur DKI Jakarta agar memerintahkan kepada:

Huruf b. Para Kepala OPD terkait agar:

2). Memberikan Sosialisasi kepada masing-masing pegawai di lingkungan kerjanya untuk memutakhirkkan status kepegawaiannya

Ditindaklanjuti dengan :

Sosialisasi Pemutakhiran Data Kepegawaian (Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat Sosialisasi Pemutakhiran Data Pegawai, Daftar Hadir, Laporan Pemutakhiran Data Kepegawaian, Materi Sosialisasi dan Daftar Pegawai yang telah melakukan Pemutakhiran Datanya)

NO	PENILAIAN PERKIN URALAN	BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
		TW I		TW II		TW III		TINDAK LANJUT SKPD		
Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)			
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Saldo TLHP BPK RI Cut Off Desember 2021 yang belum Sesuai Ditindaklanjuti)	1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	LHP ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021 BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan kepada b. Para Kepala OPD terkait agar:		
2	Tindaklanjut Reformulasi (Jika ada LHP Baru)	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2). Mengeluarkan Surat Edaran kepada instansi-instansi pegawai di lingkungan setiap instansi menetapkan status kepegawaian		
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	1	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00			
4	Target (Jumlah pencapaian yang dicapai secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	25%		25%		25%	Diketahui dan ditandatangani dengan :		
		Jumlah	0,25	0,00	1,30	0,00	0,75	Sosialisasi Penyelesaian Data Kepegawaian (Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat Sosialisasi Pemutakhiran Data Pegawai, Daftar Hadir, Laporan Penyelesaian Data Kepegawaian, Materi Sosialisasi dan Daftar Pegawai yang salah sebutkan) Perwakilan BPK RI		
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	25,00%	#DIV/0!	25,00%	#DIV/0!	25,00%			
		Jumlah	1	0,00	2,00	0,00	1,00			
6	Capaian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencanawajib)	Presentase	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	100,00%			
7	Capaian Akhir Periode Penyelesaian Kinerja	Presentase	25,00%		25,00%		25,00%			

Keterangan :

- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Tindaklanjuti atas LHP yang terbit mulai tahun 2005
- Target adalah jumlah Rekomendasi yang harus dicapai secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 100% dari jumlah Rekomendasi.
- Apabila Realisasi Target Total di akhir tahun tidak mencapai 80% dari jumlah Konsistensi Rekomendasi maka verifikasi Penyelesaian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% walaupun pada triwulan IV (TW IV) terdapat target yang belum selesai.
- Realisasi adalah jumlah Rekomendasi yang selesai di Tindaklanjuti setiap semester.
- Capaian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaian sampai 100%.
- Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan memperluas rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan.



Pengawas Verifikator
Penandatangan Tindak Lanjut

Maria Roseta
NIP. 196508171996032002

M. Iqbal Muhsirok
NIP. 19900308014031001



Mengatubai :

Plt. Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator

Dina Himawati
NIP. 197112021998032004



September 2022
Perwakilan BPK RI
Budi Awanusman
NIP. 19780117199711101

Gambar 3.18. Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan III 2022

4. Triwulan IV Tahun 2022

Berhasil diselesaikan LHP 15/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2022

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Temuan

2.1 Pengelolaan Belanja Pegawai pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tidak Tertib Uraian Rekomendasi

b BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan:
 b. Para Kepala OPD terkait agar: 1) Menginstruksikan pejabat Pengelola Kepegawaian untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi listing gaji/TKD/TPP.

Ditindaklanjuti dengan :

Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 6 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 Tentang Meningkatkan Verifikasi Listing Gaji/

TPP Pegawai dan Sosialisasi Pemutakhiran Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

BERITA ACARA RENCANA KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH PENYELESAIAN TLHP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta s.d TW IV Tahun 2022

NO	PENILAIAN PERKIN URAIAN	PENYELESAIAN TLHP BPK RI						HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT					
		TW I Jumlah	Nilai (Rp)	TW II Jumlah	Nilai (Rp)	TW III Jumlah	Nilai (Rp)	TW IV Jumlah	Nilai (Rp)	TINDAK LANJUT SKPD	Setuju	Tidak	Catatan
1	Jumlah Rekomendasi Awal (Saldo TLHP BPK RI Cut Off Desember 2021 yang belum Selesai Ditindaklanjuti)	1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	LHP 15/LHP/XVIII/JKT-XVIII/JKT.2/05/2022 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021			
2	Tambahan Rekomendasi (Jika ada LHP Baru)	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Jumlah Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	1	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	Triman 2.1 Pengelolaan Belanja Pegawai pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tidak Terlalu Urus Rekomendasi			
4	Target (Jumlah pencapaian yang dicapai secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	a. BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan: b. Para Kepala OPD terkait agar: 1) Menginstruksikan pejabat Pengelola Keppengrahan untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi listing gaji/TKD/TPP.			
5	Realisasi (Hasil yang diperoleh setiap triwulan)	Presentase	25,00% #DIV/0!	25,00% #DIV/0!	25,00% #DIV/0!	25,00% #DIV/0!	25,00% #DIV/0!	25,00% #DIV/0!	25,00% #DIV/0!	Ditelaah kembali dengan: Instruksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 6 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 Tentang Meningkatkan Verifikasi Listing Gaji TPP Pegawai dan Sosialisasi Pemutakhiran Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta			
6	Capaiian (Realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana/target)	Presentase	100,00% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!	100,00% #DIV/0!				
7	Capaiian Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja	Presentase	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				

Keterangan :

- Rekomendasi Awal adalah jumlah rekomendasi yang belum selesai di Tindaklanjuti atas LHP yang terbit mulai tahun 2005
- Target adalah Jumlah Rekomendasi yang harus dicapai yang diterapkan setiap triwulan dalam satu tahun sehingga mencapai 80% dari Jumlah Rekomendasi
- Apabila Realisasi Target Total di akhir tahun tidak mencapai 80% dari Jumlah Keseluruhan Rekomendasi maka verifikasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV tidak bisa 100% walaupun realisasi triwulan (TW IV) mencapai target seluruhnya
- Realisasi adalah Jumlah Realisasi yang berhasil diwujudkan. Tidak dilakukan setiap semester
- Capaiian adalah persentase Realisasi terhadap Target. Jika Realisasi melebihi Target maka Capaiian tetap 100%
- Penambahan Rekomendasi pada triwulan berjalan (terbitnya LHP baru) yang akan menambah sisa rekomendasi yang belum di TL, tidak mengubah persentase target yang sudah ditetapkan.

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut

Maria Roseta
NIP. 196508171996032002

M. Iqbal Mubarok
NIP. 199003082014031001

Mengetahui :
Plt. Inspektor Pembantu I
Selaku Verifikator

Dina Himawati
NIP. 197112021998032004

Jakarta, Desember 2022
Perangkat Daerah


Budi Awanidin
NIP. 197801171997111001

Gambar 3.19. Berita Acara Penyelesaian TLHP BPK RI Triwulan IV 2022

Semua tindak lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah diupload pada system yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu pada <https://simantab.jakarta.go.id/>, juga telah divalidasi oleh pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam Tripartid antara Dinas Dukcapil, Inspektorat dan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

f. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk pada sasaran strategis tahun 2022 merupakan Tujuan dari Dinas Dukcapil yaitu Pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk, sedangkan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk adalah Sasaran Pertama (S1) dari Dinas Dukcapil yaitu Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan dan Indikator Persentase Pemanfaatan data kependudukan adalah Sasaran Kedua (S2) dari Dinas Dukcapil yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional. Berikut Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.58. Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program														
			Kinerja 2018			Kinerja 2019			Kinerja 2020			Kinerja 2021			Kinerja 2022		
			Target	Capaian Target	Tingkat Capaian	Target	Capaian Target	Tingkat Capaian	Target	Capaian	Tingkat Capaian	Target	Capaian	Tingkat Capaian	Target	Capaian	Tingkat Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	62 %	65 %	82,54%	126,98%	70,00%	84,29%	120,41%	86,00%	96,90%	112,67%	88,00%	97,87%	111,22%	90,00%	99,87%	110,97%
2	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	49,5 %	59,3 %	60,01%	101,20%	67,10%	78,87%	117,54%	75,70%	85,96%	113,55%	89,57%	99,47%	111,05%	93,29%	100,00%	107,19%
3	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk																
4	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil																
5	Percentase tersusunnya profil kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	100,00%	7	7	100,00%
6	Indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	3 Indeks	4 Indeks	133,3%	3 Indeks	4 Indeks	133,3%	4 Indeks	4 Indeks	100,00%	4 Indeks	4 Indeks	100,00%	4 Indeks	4 Indeks	100,00%
7	Percentase Pemanfaatan data kependudukan	22 %	0 %	40,83%	100,00%	40,00%	47,50%	118,75%	60,00%	98,33%	163,89%	80%	120,00%	150,00%	100%	105,38%	105,38%
8	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	26	0	49	100,00%	48	57	118,75%	72	118	163,89%	96	144	150,00%	130	137	105,38%

Catatan :

Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menggunakan Program Lama yaitu

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator kinerja
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil
 - b. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c. Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator indeks kepuasan pelayanan kantor
3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Dinas Dukcapil melakukan penyesuaian terhadap Program yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk, pada Tahun 2018-2020 Indikator ini masih tergabung dalam Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga capaiannya masih digabung.
2. Program Pencatatan Sipil
Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, pada Tahun 2018-2020 Indikator ini masih tergabung dalam Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga capaiannya masih digabung.
3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Indikator Persentase tersusunnya profil kependudukan, dilaksanakan bersamaan dengan penyesuaian program pada tahun 2021, sehingga tada tahun 2018-2022 belum ada capaian dalam indikator ini, meskipun Profil Kependudukan Dinas dan Suku Dinas sudah disusun.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan telah ada dari tahun 2018, namun pada pelaksanaanya pada tahun 2018 belum ditentukan target dalam indikator ini, akan tetapi telah berhasil terealisasi pada tahun 2018.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indeks indeks kepuasan pelayanan kantor, merupakan indeks dari program penunjang perkantoran dan Kendaraan Dinas operasional yang dilaksanakan oleh Dinas, Suku Dinas dan UPT.

Tabel 3.59. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
				Anggaran 2018			Anggaran 2019			Anggaran 2020			Anggaran 2021			Anggaran 2022			
				APBD	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian	APBD	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian	APBD	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian	APBD	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian	APBD	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian	
1	Memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk	1 Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	287.42 3.625.9 06	246.633.9 23.165	85,81%	198.24 4.460.2 00	175.280.5 42.924	88,42 %	135.927.0 42.452	130.577.1 97.542	96,06 %	326.23 5.604.2 00	304.671.0 50.090	93,39 %	321.407.7 06.465	302.357.6 11.835	94,07%	
			Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	66.175. 686.43 4	54.381.27 1.584	82,18%	150.98 1.378.1 71	132.943.0 40.416	88,05 %	85.551.58 0.113	82.754.07 4.117	96,73 %	325.88 6.023.8 80	304.337.8 88.822	93,39 %	321.152.4 61.603	302.105.2 84.739	94,07%	
			Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk										53.645. 518.86 6	53.242.91 4.272	99,25 %	59.336.48 1.504	59.066.27 1.695	99,54%	
			Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil										3.248.6 59.815	3.231.047 .750	99,46 %	5.078.961 .799	4.618.421 .274	90,93%	
			Percentase tersusunnya profil kependudukan										137.27 9.107	131.535.7 00	95,82 %	231.068.6 17	226.113.7 90	97,86%	
			indeks kepuasan pelayanan kantor	221.24 7.939.4 72	192.252.6 51.581	86,89%	44.285. 074.28 6	39.404.19 6.626	88,98 %	50.205.73 5.314	47.655.89 8.925	94,92 %	253.06 8.672.2 45	233.589.1 49.749	92,30 %	256.505.9 49.683	238.194.4 77.980	92,86%	
			2 Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Percentase Pemanfaatan data kependudukan	-	-	0,00%	2.978.0 07.743	2.933.305 .882	98,50 %	169.727.0 25	167.224.5 00	98,53 %	349.58 0.320	333.161.2 68	95,30 %	255.244.8 62	252.327.0 96	98,86%
				Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	-	-	0,00%	2.978.0 07.743	2.933.305 .882	98,50 %	169.727.0 25	167.224.5 00		349.58 0.320	333.161.2 68	95,30 %	255.244.8 62	252.327.0 96	98,86%
				287.42 3.625.9 06	246.633.9 23.165	85,81%	198.24 4.460.2 00	175.280.5 42.924	88,42 %	135.927.0 42.452	130.577.1 97.542	96,06 %	326.23 5.604.2 00	304.671.0 50.090	93,39 %	321.407.7 06.465	302.357.6 11.835	94,07%	

g. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional

Target Kepemilikan Dokumen Dukcapil selain menjadi target yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga merupakan target Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024 maupun dalam Rencana Strategis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

No	Cakupan	Target Dinas Dukcapil	Target Nasional	Realisasi	GAP	Ket
1	KTP el	100%	99,30%	100,0%	0,70%	Renstra Dirjen Dukcapil
2	KK	100%	99,30%	100,0%	0,70%	Renstra Dirjen Dukcapil
3	KIA	100%	40%	100,0%	60,00%	Renstra Ditjen Dukcapil Hal 87 dan Hal 124
4	Akta Kelahiran	98%	98%	100,0%	2,00%	RPJMN Lamp III Hal A.3.1 dan Hal 010.B.64
5	Akta Kematian	85%	60%	100,0%	40,00%	RPJMN Lamp III Hal A.3.1
6	Akta Perkawinan	70%		100,0%	40,00%	RPJMN Lamp III Hal A.3.1
7	Akta Perceraian	100%	100%	100,0%	-	RPJMN Lamp III Hal A.3.1
		93,29%				

h. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SDG's

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional.

Tabel 3.61. Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

Goal	Indikator	Nama Indikator TPB/SDGs Nasional	Nama Indikator TPB/SDGs Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	1.4.1.(j)	Percentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	89,7	100,00	111,48%
16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	89,7	100,00	111,48%
16	16.9.1. (b)	Percentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	89,7	100,00	111,48%
17	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Data Registrasi	1	1	100,00%

i. Analisis Keberhasilan Sasaran Strategis

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi Sasaran Strategis diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan antar lain:

1. Tersampaiannya Tujuan dan Sasaran Organisasi, hal ini dibuktikannya dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Kelurahan
2. Disediakannya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dibuktikan dengan adanya Anggaran yang mencukupi untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut
3. Diberikannya *reward* dan *punishment* terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja Reward diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan bagi Kelurahan, Kecamatan maupun Suku Dinas yang berhasil mencapai target Kinerjanya Punishent berupa surat peringatan terhadap yang tidak berhasil mencapai target kinerjanya.
4. Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang realisasinya jauh diatas target yang ditetapkan.
5. Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sangat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai berapa target indikator Tujuan dan Sasaran.
 - a) KSD 39 yaitu Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA, didalamnya terdapat beberapa hal yang harus dicapai, misalnya tersusunnya Renstra 2023-2026, hal ini sangat membantu dalam menentukan Tujuan dan Sasaran serta target-targetnya. Selain itu juga pada KSD 39 harus melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja maupun Rencana Kinerja setiap triwulan yang tentu saja dari hasil evaluasi ini dapat dijadikan acuan perbaikan untuk triwulan selanjutnya.
 - b) KSD 61 yaitu Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan juga bergantung pada KSD ini, hal ini dikarenakan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) harus dilaksanakan dan dilaporkan setiap triwulannya. Indikator ini hasil kerja sama antara Dinas Dukcapil, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
6. Faktor pendukung keberhasilan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah inovasi yang semakin memudahkan dalam mendapatkan layanan Administrasi Kependudukan, inovasi tersebut antara lain :
 - a. Layanan Administrasi Kependudukan 15 menit, 30 Menit, 60 Menit dan 480 Menit sesuai dengan SK Kadis No. 71 Tahun 2022.

- b. Layanan Pedekate kerja sama dengan Rumah Ibadah agar nantinya Warga DKI yang menikah di Rumah Ibadah yang telah terintegrasi langsung mendapatkan pelayanan Pencatatan Perkawinan dari Dukcapil, hal ini memudahkan dalam pencatatan Akta Perkawinan.
- c. Layanan Whatsapp & Telegram, untuk mempermudah layanan tanpa harus bertatap muka melalui layanan whatsapp/ telegram di tiap wilayah untuk meminimalisir pelayanan tatap muka langsung.
- d. KAMSA, (Kampung Sadar Administrasi Kependudukan), dalam rangka mewujudkan perilaku warga Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Sadar Pemutakhiran Data Kependudukan, dan Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan pada kampung/ RW di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- e. Layanan Drive Thru yang ditujukan untuk menghemat waktu dan membatasi orang dalam ruangan sehingga bisa mempermudah kebutuhan warga Jakarta dan lebih aman secara prokes karena tidak perlu turun (mengurangi mobilitas dengan orang lain).
- f. Layanan Aplikasi Online
Meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat DKI Jakarta, Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi antara lain :
 - 1) Alpukat Betawi, adalah mobile apps yang bisa diunduh di melalui Google Playstore maupun Appstore yang memungkinkan penduduk dapat mengajukan permohonan layanan, penjadwalan pelayanan, dan memonitor pelayanan yang diajukannya. Pelayanan yang bisa diproses pada aplikasi ini diantaranya pencetakan KTP-el (rusak atau hilang), pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, perubahan biodata, permohonan pindah dan legalisir
 - 2) SiLaporlagi, digunakan untuk melakukan pengurusan SKTT secara online, dan hanya datang pada saat pengambilan SKTT (Orang Asing).
 - 3) Jakarta Mendata Warga, aplikasi yang memberikan akses kepada perangkat kelurahan, khususnya Ketua RT/RW untuk mendata warga di lingkungannya, terutama warga non permanen di lingkungan RT/RW, untuk diarahakan untuk membuat Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) di Kecamatan.
 - 4) Aplikasi SISDUK-PCR, merupakan pelayanan integrasi dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat merupakan ikhtiar dari Dukcapil dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat dapat langsung menerima dokumen secara lengkap berupa akte cerai, KTP baru dan KK terbaru dalam satu waktu.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dilapaskan dari segi anggaran, akan tetapi dikarenakan belum selesainya Tahun Anggaran 2022, maka belum dapat didapatkan efisiensi maupun kualitas pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adapun realisasi anggaran pada Dinas, Suku Dinas dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Realisasi per Program

Terdapat 4 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada Dinas, UPT dan Suku Dinas

Tabel 3.62. Realisasi Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2022

No	Jenis Belanja	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
		Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%	
1	DINAS DUKCAPIL	509.069.002	509.056.273	100,00%	12.729	0,00%	
2	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKPUS	9.580.328.188	9.523.404.520	99,41%	56.923.668	0,59%	
3	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKUT	8.419.285.030	8.399.501.538	99,77%	19.783.492	0,23%	
4	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKBAR	11.745.233.821	11.707.613.780	99,68%	37.620.041	0,32%	
5	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKSEL	13.275.749.855	13.247.011.637	99,78%	28.738.218	0,22%	
6	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKTIM	13.358.100.160	13.238.224.421	99,10%	119.875.739	0,90%	
7	SUDIN DUKCAPIL KAB - KEP.SERIBU	779.515.188	772.365.871	99,08%	7.149.317	0,92%	
8	UPTIK	1.669.200.260	1.669.093.655	99,99%	106.605	0,01%	
9	UPAK	-	-	0,00%	-	0,00%	
	TOTAL PENGGABUNGAN	59.336.481.504	59.066.271.695	99,54%	270.209.809	0,46%	

Tabel 3.63. Realisasi Program Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Jenis Belanja	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
		Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	DINAS DUKCAPIL	3.108.856.199	2.656.413.332	85,45%	452.442.867	14,55%
2	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKPUS	135.219.480	134.221.200	99,26%	998.280	0,74%
3	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKUT	142.156.740	140.997.917	99,18%	1.158.823	0,82%
4	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKBAR	133.741.036	132.086.670	98,76%	1.654.366	1,24%
5	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKSEL	80.739.340	80.003.250	99,09%	736.090	0,91%
6	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKTIM	184.567.000	182.006.700	98,61%	2.560.300	1,39%
7	SUDIN DUKCAPIL KAB - KEP.SERIBU	2.981.880	2.970.000	99,60%	11.880	0,40%
8	UPTIK	-	-	0,00%	-	0,00%
9	UPAK	1.290.700.124	1.289.722.205	99,92%	977.919	0,00%
	TOTAL PENGGABUNGAN	5.078.961.799	4.618.421.274	90,93%	460.540.525	9,97%

Tabel 3.64. Realisasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2022

No	Jenis Belanja	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
		Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	DINAS DUKCAPIL	65.212.540	65.211.000	100,00%	65.212.540	65.211.000
2	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKPUS	-	-	0,00%	-	-
3	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKUT	-	-	0,00%	-	-

No	Jenis Belanja	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
		Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
4	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKBAR	-	-	0,00%	-	-
5	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKSEL	-	-	0,00%	-	-
6	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKTIM	-	-	0,00%	-	-
7	SUDIN DUKCAPIL KAB - KEP.SERIBU	-	-	0,00%	-	-
8	UPTIK	-	-	0,00%	-	-
9	UPAK	190.032.322	187.116.096	98,47%	190.032.322	187.116.096
	TOTAL PENGGABUNGAN	255.244.862	252.327.096	98,86%	255.244.862	252.327.096

Tabel 3.65. Realisasi Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2022

No	Jenis Belanja	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
		Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	DINAS DUKCAPIL	81.635.830	79.390.600	97,25%	2.245.230	2,75%
2	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKPUS	21.192.600	20.682.630	97,59%	509.970	2,41%
3	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKUT	21.307.572	21.085.560	98,96%	222.012	1,04%
4	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKBAR	46.620.000	45.787.500	98,21%	832.500	1,79%
5	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKSEL	39.600.000	38.572.500	97,41%	1.027.500	2,59%
6	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKTIM	20.084.460	19.980.000	99,48%	104.460	0,52%
7	SUDIN DUKCAPIL KAB - KEP.SERIBU	628.155	615.000	97,91%	13.155	2,09%

No	Jenis Belanja	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
		Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
8	UPTIK	-	-	0,00%	-	0,00%
9	UPAK	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PENGGABUNGAN		231.068.617	226.113.790	97,86%	4.954.827	2,19%

Tabel 3.66. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2022

No	Jenis Belanja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	DINAS DUKCAPIL	178.955.996.013	168.086.806.476	93,93%	10.869.189.537	6,07%
2	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKPUS	8.822.887.754	8.037.272.919	91,10%	785.614.835	8,90%
3	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKUT	10.607.015.929	9.559.835.846	90,13%	1.047.180.083	9,87%
4	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKBAR	12.901.712.243	11.589.436.212	89,83%	1.312.276.031	10,17%
5	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKSEL	12.195.310.628	11.494.237.076	94,25%	701.073.552	5,75%
6	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKTIM	14.625.397.015	13.160.769.061	89,99%	1.464.627.954	10,01%
7	SUDIN DUKCAPIL KAB - KEP.SERIBU	311.549.235	295.607.174	94,88%	15.942.061	5,12%
8	UPTIK	17.720.307.067	15.621.125.106	88,15%	2.099.181.961	0,00%
9	UPAK	365.773.799	349.388.110	95,52%	16.385.689	0,00%
TOTAL PENGGABUNGAN		256.505.949.683	238.194.477.980	92,86%	18.311.471.703	7,69%

Tabel 3.67. Rekapitulasi Realisasi Program Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	DINAS DUKCAPIL	182.720.769.584	171.396.877.681	93,80%	11.323.891.903	6,20%
2	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKPUS	18.559.628.022	17.715.581.269	95,45%	844.046.753	4,55%
3	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKUT	19.189.765.271	18.121.420.861	94,43%	1.068.344.410	5,57%
4	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKBAR	24.827.307.100	23.474.924.162	94,55%	1.352.382.938	5,45%
5	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKSEL	25.591.399.823	24.859.824.463	97,14%	731.575.360	2,86%
6	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKTIM	28.188.148.635	26.600.980.182	94,37%	1.587.168.453	5,63%
7	SUDIN DUKCAPIL KAB - KEP.SERIBU	1.094.674.458	1.071.558.045	97,89%	23.116.413	2,11%
8	UPTIK	19.389.507.327	17.290.218.761	89,17%	2.099.288.566	0,00%
9	UPAK	1.846.506.245	1.826.226.411	98,90%	20.279.834	0,00%
	TOTAL PENGGABUNGAN	321.407.706.465	302.357.611.835	94,07%	19.050.094.630	6,30%

2. Realisasi Kegiatan

a. Realisasi pada Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3.68. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	509.069.002	509.056.273	100,00%	12.729	0,00%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	3.108.856.199	2.656.413.332	85,45%	452.442.867	14,55%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	65.212.540	65.211.000	100,00%	1.540	0,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	81.635.830	79.390.600	97,25%	2.245.230	2,75%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	178.955.996.013	168.086.806.476	93,93%	10.869.189.537	6,07%
			182.720.769.584	171.396.877.681	93,80%	11.323.891.903	6,20%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	165.768.323.583	155.757.229.371	93,96%	10.011.094.212	6,04%	Pembayaran Gaji
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00%	-	0,00%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86.900.000	86.900.000	100,00%	-	0,00%	Bimbingan teknis dalam rangka memberikan pengatahan terhadap aparatur
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.405.990.562	4.972.077.966	91,97%	433.912.596	8,03%	Pengadaan ATK, Toner dan Cetakan KIA serta Perlatan Lainnya

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.483.834	12.466.410	99,86%	17.424	0,14%	Untuk Pengadaan Bendera dan Umbul-umbul
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	338.253.438	331.040.850	97,87%	7.212.588	2,13%	Pengadaan Cetakan Formulir, Cetakan Umum dan Penjilidan
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	122.040.520	122.040.520	100,00%	-	0,00%	Pengadaan BBM untuk KDO
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.849.200	31.880.260	91,48%	2.968.940	8,52%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.199.080	9.199.067	100,00%	13	0,00%	Penyediaan sarana dan Prasana Keamanan Kantor
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.831.462	126.046.035	97,84%	2.785.427	2,16%	Pengadaan PJLP Caraka
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.181.863.860	1.134.291.820	95,97%	47.572.040	4,03%	Pembayaran Biaya Telpon, Listrik dan Air
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.720.000	98.234.994	77,52%	28.485.006	22,48%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.417.146.082	1.408.787.373	99,41%	8.358.709	0,59%	Pengadaan PJLP Kebersihan, Keamanan, Sopir dan ME
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.615.439	203.840.425	91,57%	18.775.014	8,43%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.364.325.030	3.091.734.485	91,90%	272.590.545	8,10%	Digunakan untuk Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor, Pemeliharaan Lift Kantor, Pengolahan Limbah dan Instalasi, Pemeliharaan Gedung Pengadaan Fumigasi dan Rodent Control serta Pemeliharaan Taman

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	710.346.923	675.236.900	95,06%	35.110.023	4,94%	Digunakan untuk Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja serta Penyediaan Perlengkapan Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.107.000	21.800.000	98,61%	307.000	1,39%	Digunakan untuk Bimbingan teknis Pemanfaatan Data bagi SKPD Pengguna Data yang akan melakukan PKS dengan Dukcapil
18	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	128.831.462	128.820.273	99,99%	11.189	0,01%	Dipergunakan untuk perekaman Penduduk rentan yang berada di Panti Sosial dibawah Binaan Dinas Sosial
19	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	380.237.540	380.236.000	100,00%	1.540	0,00%	Digunakan dalam rangka penyelesaian masalah kependudukan yang timbul
20	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	3.108.856.199	2.656.413.332	85,45%	452.442.867	14,55%	Digunakan untuk Penataan Register Akta pada Dinas dan Suku Dinas serta untuk Alih Media Register Akta
21	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.212.540	65.211.000	100,00%	1.540	0,00%	Digunakan untuk Pembinaan Kependudukan Orang Asing dan Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
22	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	81.635.830	79.390.600	97,25%	2.245.230	2,75%	Laporan Agregat Kependudukan
			182.720.769.584	171.396.877.681	93,80%	11.323.891.903	6,20%	

b. Realisasi pada Suku Dinas Dukcapil Kota Adm Jakarta Pusat

Tabel 3.69. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	9.580.328.188	9.523.404.520	99,41%	56.923.668	0,59%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	135.219.480	134.221.200	99,26%	998.280	0,74%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	0	0	0%	0	0%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	21.192.600	20.682.630	97,59%	509.970	2,41%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	8.822.887.754	8.037.272.919	91,10%	785.614.835	8,90%
			18.559.628.022	17.715.581.269	95,45%	844.046.753	4,55%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00%	-	0,00%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.259.373.202	6.530.519.448	89,96%	728.853.754	10,04%	Pengadaan ATK, Toner dan Perlatan Lainnya
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	187.687.500	185.352.240	98,76%	2.335.260	1,24%	Untuk Pengadaan Cetakan Umum dan Formulir untuk pelayanan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	51.445.440	51.445.440	100,00%	-	0,00%	Pengadaan BBM untuk KDO

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.474.000	18.111.440	84,34%	3.362.560	15,66%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	644.157.310	637.959.527	99,04%	6.197.783	0,96%	Pengadaan PJLP Caraka
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	337.154.400	309.370.356	91,76%	27.784.044	8,24%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.831.462	126.031.759	97,83%	2.799.703	2,17%	Pengadaan PJLP Sopir
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.129.030	136.865.409	90,56%	14.263.621	9,44%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.635.410	38.617.300	99,95%	18.110	0,05%	Digunakan untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor seperti AC, Komputer dan Printer
11	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.533.528.188	9.476.604.520	99,40%	56.923.668	0,60%	Digunakan untuk pengadaan PJLP/ Operator Layanan Kependudukan
12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	46.800.000	46.800.000	100,00%	-	0,00%	Digunakan untuk pelayanan secara mobile/ pelayanan keliling/ jemput bola (Disabilitas/ orang Sakit/ sekolah/ Pelayanan hari Sabtu
13	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	135.219.480	134.221.200	99,26%	998.280	0,74%	Digunakan untuk Penataan Register Akta
14	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	21.192.600	20.682.630	97,59%	509.970	2,41%	Laporan Agregat Kependudukan
			18.559.628.022	17.715.581.269	95,45%	844.046.753	4,55%	

c. Realisasai pada Suku Dinas Dukcapil Kota Adm Jakarta Utara

Tabel 3.70. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Utara Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	8.419.285.030	8.399.501.538	99,77%	19.783.492	0,23%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	142.156.740	140.997.917	99,18%	1.158.823	0,82%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	21.307.572	21.085.560	98,96%	222.012	1,04%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	10.607.015.929	9.559.835.846	90,13%	1.047.180.083	9,87%
			19.189.765.271	18.121.420.861	94,43%	1.068.344.410	5,57%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.900.000	6.900.000	100,00%	-	0,00%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.022.137.733	7.051.892.783	87,91%	970.244.950	12,09%	Pengadaan ATK, Toner dan Perlatan Lainnya
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	174.235.303	173.123.870	99,36%	1.111.433	0,64%	Untuk Pengadaan Cetakan Umum dan Formulir untuk pelayanan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	55.915.200	55.915.200	100,00%	-	0,00%	Pengadaan BBM untuk KDO

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.459.620	25.664.030	90,18%	2.795.590	9,82%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.821.880	520.639.564	99,96%	182.316	0,04%	Pengadaan PJLP Caraka
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.613.170	168.330.373	82,27%	36.282.797	17,73%	Pembayaran Biaya Telpon, Listrik dan Air
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.231.200	245.260.932	93,53%	16.970.268	6,47%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.508.334	653.030.968	99,93%	477.366	0,07%	Pengadaan PJLP Kebersihan, Keamanan ME dan Sopir
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.120.266	169.168.510	92,38%	13.951.756	7,62%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.128.223	388.934.026	99,19%	3.194.197	0,81%	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.945.000	100.975.590	98,09%	1.969.410	1,91%	Digunakan untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor seperti AC, Komputer, Printer, dll
13	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.374.045.030	8.354.261.538	99,76%	19.783.492	0,24%	Digunakan untuk pengadaan PJLP/ Operator Layanan Kependudukan
14	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	45.240.000	45.240.000	100,00%	-	0,00%	Digunakan untuk pelayanan secara mobile/ pelayanan keliling/ jemput bola (Disabilitas/ orang Sakit/ sekolah/ Pelayanan hari Sabtu
15	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	142.156.740	140.997.917	99,18%	1.158.823	0,82%	Digunakan untuk Penataan Register Akta
16	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	21.307.572	21.085.560	98,96%	222.012	1,04%	Laporan Agregat Kependudukan
			19.189.765.271	18.121.420.861	94,43%	1.068.344.410	5,57%	

d. Realisasi pada Suku Dinas Dukcapil Kota Adm Jakarta Barat

Tabel 3.71. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Barat Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	11.745.233.821	11.707.613.780	99,68%	37.620.041	0,32%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	133.741.036	132.086.670	98,76%	1.654.366	1,24%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	46.620.000	45.787.500	98,21%	832.500	1,79%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	12.901.712.243	11.589.436.212	89,83%	1.312.276.031	10,17%
			24.827.307.100	23.474.924.162	94,55%	1.352.382.938	5,45%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.460.000	13.460.000	100,00%	-	0,00%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.412.353.643	7.332.250.206	87,16%	1.080.103.437	12,84%	Pengadaan ATK, Toner dan Perlatan Lainnya
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.324.460	18.053.040	98,52%	271.420	1,48%	Digunakan untuk pengadaan Bendera, Umbul-umbul, gelas, cangkir, dll
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.919.436	131.000.202	99,30%	919.234	0,70%	Untuk Pengadaan Cetakan Umum dan Formulir untuk pelayanan

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	217.079.520	217.079.520	100,00%	-	0,00%	Pengadaan BBM untuk KDO
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.254.080	41.809.564	83,20%	8.444.516	16,80%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	644.157.310	644.028.617	99,98%	128.693	0,02%	Pengadaan PJLP Caraka
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454.497.360	382.493.379	84,16%	72.003.981	15,84%	Pembayaran Biaya Telpon, Listrik dan Air
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.616.000	358.225.950	95,62%	16.390.050	4,38%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.246.511	652.917.703	99,95%	328.808	0,05%	Pengadaan PJLP Kebersihan, Keamanan ME dan Sopir
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.969.770	238.825.703	88,79%	30.144.067	11,21%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.314.199.368	1.213.804.251	92,36%	100.395.117	7,64%	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor, Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah, Pemeliharaan Instalasi Penanggulangan Kebakaran, Penataan Ruang Rapat dan Partisi Ruangan Kerja serta Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.634.785	345.488.077	99,10%	3.146.708	0,90%	Digunakan untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor seperti AC, Komputer, Printer serta untuk Pemeliharaan Alat Berat Mesin Pembangkit Listrik (genset) Kantor
14	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11.530.415.849	11.493.543.492	99,68%	36.872.357	0,32%	Digunakan untuk pengadaan PJLP/ Operator Layanan Kependudukan

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
15	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	214.817.972	214.070.288	99,65%	747.684	0,35%	Digunakan untuk pelayanan secara mobile/ pelayanan keliling/ jemput bola (Disabilitas/ orang Sakit/ sekolah/ Pelayanan hari Sabtu
16	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	133.741.036	132.086.670	98,76%	1.654.366	1,24%	Digunakan untuk Penataan Register Akta
17	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	46.620.000	45.787.500	98,21%	832.500	1,79%	Laporan Agregat Kependudukan
			24.827.307.100	23.474.924.162	94,55%	1.352.382.938	5,45%	

e. Realisasi pada Suku Dinas Dukcapil Kota Adm Jakarta Selatan

Tabel 3.72. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	13.275.749.855	13.247.011.637	99,78%	28.738.218	0,22%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	80.739.340	80.003.250	99,09%	736.090	0,91%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	39.600.000	38.572.500	97,41%	1.027.500	2,59%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	12.195.310.628	11.494.237.076	94,25%	701.073.552	5,75%
			25.591.399.823	24.859.824.463	97,14%	731.575.360	2,86%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.103.600	10.049.300	99,46%	54.300	0,54%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.467.614.535	7.905.549.022	93,36%	562.065.513	6,64%	Pengadaan ATK, Toner dan Perlatan Lainnya
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	198.167.200	194.309.385	98,05%	3.857.815	1,95%	Untuk Pengadaan Cetakan Umum dan Formulir untuk pelayanan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	99.433.500	99.433.500	100,00%	-	0,00%	Pengadaan BBM untuk KDO
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.623.288	27.213.420	91,86%	2.409.868	8,14%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.578.120	769.515.963	99,60%	3.062.157	0,40%	Pengadaan PJLP Caraka
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.291.000	257.928.609	82,86%	53.362.391	17,14%	Pembayaran Biaya Telpon, Listrik dan Air
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.672.000	407.520.000	99,72%	1.152.000	0,28%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.891.995	646.654.353	99,50%	3.237.642	0,50%	Pengadaan PJLP Kebersihan, Keamanan ME dan Sopir
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.947.923	211.014.839	87,94%	28.933.084	12,06%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	823.916.041	785.172.768	95,30%	38.743.273	4,70%	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor, Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah, Pemeliharaan Gedung serta Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.071.426	179.875.917	97,72%	4.195.509	2,28%	Digunakan untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor seperti AC, Komputer, Printer dan pemeliharaan lainnya
13	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.205.224.855	13.176.486.637	99,78%	28.738.218	0,22%	Digunakan untuk pengadaan PJLP/ Operator Layanan Kependudukan
14	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	70.525.000	70.525.000	100,00%	-	0,00%	Digunakan untuk pelayanan secara mobile/ pelayanan keliling/ jemput bola (Disabilitas/ orang Sakit/ sekolah/ Pelayanan hari Sabtu
15	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	80.739.340	80.003.250	99,09%	736.090	0,91%	Digunakan untuk Penataan Register Akta
16	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	39.600.000	38.572.500	97,41%	1.027.500	2,59%	Laporan Agregat Kependudukan
			25.591.399.823	24.859.824.463	97,14%	731.575.360	2,86%	

f. Realisasi pada Suku Dinas Dukcapil Kota Adm Jakarta Timur

Tabel 3.73. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Timur Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	13.358.100.160	13.238.224.421	99,10%	119.875.739	0,90%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	184.567.000	182.006.700	98,61%	2.560.300	1,39%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	20.084.460	19.980.000	99,48%	104.460	0,52%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	14.625.397.015	13.160.769.061	89,99%	1.464.627.954	10,01%
			28.188.148.635	26.600.980.182	94,37%	1.587.168.453	5,63%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.400.000	15.400.000	100,00%	-	0,00%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.425.698.795	9.224.454.400	88,48%	1.201.244.395	11,52%	Pengadaan ATK, Toner dan Perlatan Lainnya
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.268.012	122.266.500	98,39%	2.001.512	1,61%	Pengadaan Bendera, Umbul-umbul, dispenser dan peralatan lainnya
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	167.004.365	166.325.397	99,59%	678.968	0,41%	Untuk Pengadaan Cetakan Umum dan Formulir untuk pelayanan

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	275.737.440	275.737.440	100,00%	-	0,00%	Pengadaan BBM untuk KDO
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.790.050	18.973.515	73,57%	6.816.535	26,43%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.988.772	767.511.446	99,29%	5.477.326	0,71%	Pengadaan PJLP Caraka
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.047.320	145.594.675	79,98%	36.452.645	20,02%	Pembayaran Biaya Telpon, Listrik dan Air
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	412.077.600	374.712.800	90,93%	37.364.800	9,07%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	666.269.908	647.236.426	97,14%	19.033.482	2,86%	Pengadaan PJLP Kebersihan, Keamanan ME dan Sopir
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.818.359	288.799.199	87,30%	42.019.160	12,70%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	910.690.621	842.167.433	92,48%	68.523.188	7,52%	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor, Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah, Pemeliharaan Instalasi Penanggulangan Kebakaran serta Pemeliharaan Gedung
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.605.773	271.589.830	85,78%	45.015.943	14,22%	Digunakan untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor seperti AC, Komputer, Printer dan pemeliharaan lainnya
14	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.212.240.160	13.094.679.421	99,11%	117.560.739	0,89%	Digunakan untuk pengadaan PJLP/ Operator Layanan Kependudukan
15	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	145.860.000	143.545.000	98,41%	2.315.000	1,59%	Digunakan untuk pelayanan secara mobile/ pelayanan keliling/ jemput bola (Disabilitas/

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
								orang Sakit/ sekolah/ Pelayanan hari Sabtu
16	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	184.567.000	182.006.700	98,61%	2.560.300	1,39%	Digunakan untuk Penataan Register Akta
17	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	20.084.460	19.980.000	99,48%	104.460	0,52%	Laporan Agregat Kependudukan
			28.188.148.635	26.600.980.182	94,37%	1.587.168.453	5,63%	

g. Realisasi pada Suku Dinas Dukcapil Kabupaten Adm Kepulauan Seribu

Tabel 3.74. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada Sudin Dukcapil Kab Adm Kepulauan Seribu Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	779.515.188	772.365.871	99,08%	7.149.317	0,92%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	2.981.880	2.970.000	99,60%	11.880	0,40%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	628.155	615.000	97,91%	13.155	2,09%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	311.549.235	295.607.174	94,88%	15.942.061	5,12%
			1.094.674.458	1.071.558.045	97,89%	23.116.413	2,11%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.033.914	126.859.680	90,59%	13.174.234	9,41%	Pengadaan ATK, Toner dan Perlatan Lainnya
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.336.573	5.076.920	95,13%	259.653	4,87%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan tamu
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.717.148	127.920.474	99,38%	796.674	0,62%	Pengadaan PJLP Caraka
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.461.600	35.750.100	95,43%	1.711.500	4,57%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
5	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	776.922.888	769.815.871	99,09%	7.107.017	0,91%	Digunakan untuk pengadaan PJLP/ Operator Layanan Kependudukan
6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.592.300	2.550.000	98,37%	42.300	1,63%	Digunakan untuk pelayanan secara mobile/ pelayanan keliling/ jemput bola (Disabilitas/ orang Sakit/ sekolah/ Pelayanan hari Sabtu
7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.981.880	2.970.000	99,60%	11.880	0,40%	Digunakan untuk Penataan Register Akta
8	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	628.155	615.000	97,91%	13.155	2,09%	Laporan Agregat Kependudukan
			1.094.674.458	1.071.558.045	97,89%	23.116.413	2,11%	

h. Realisasi pada UPTIK

Tabel 3.75. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada UPTIK Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	1.669.200.260	1.669.093.655	99,99%	106.605	0,01%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	0	0	0,00%	0	0,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	17.720.307.067	15.621.125.106	88,15%	2.099.181.961	11,85%
			19.389.507.327	17.290.218.761	89,17%	2.099.288.566	10,83%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.912.000	2.595.700	66,35%	1.316.300	33,65%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.128.448.784	9.903.412.629	88,99%	1.225.036.155	11,01%	Pengadaan ATK, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), Peralatan Penunjang Layanan untuk Loket seperti Komputer, Laptop, Printer, dll serta Pengadaan Suku Cadang Komputer
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.136.650	2.750.000	87,67%	386.650	12,33%	Untuk Penjilidkan laporan-laporan

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	26.418.000	26.418.000	100,00%	-	0,00%	Pengadaan BBM untuk KDO
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.357.200	5.275.900	71,71%	2.081.300	28,29%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.286.548.724	5.430.968.836	86,39%	855.579.888	13,61%	Digunakan untuk Pengembangan Aplikasi Penunjang Dukcapil, Pemeliharaan Jaringan LAN s.d Tk Kelurahan, Sewa Jaringan DRC dan SMS Masking, Pemeliharaan Server Data Center, Penyediaan Licensi Perangkat Lunak dan Anti Virus, Pemeliharaan Software dan Database Data Center serta untuk Pemeliharaan Ruang Server
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.485.500	225.685.200	96,25%	8.800.300	3,75%	Digunakan untuk Pemeliharaan Komputer dan Printer tingkat Kelurahan, Kecamatan, RSUD dan UPTIK
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.209	24.018.841	80,06%	5.981.368	19,94%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
9	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	1.669.200.260	1.669.093.655	99,99%	106.605	0,01%	Penyediaan PJLP/ Operator TenagaTeknis UPTIK
			19.389.507.327	17.290.218.761	89,17%	2.099.288.566	10,83%	

i. Realisasi pada UPAK

Tabel 3.76. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada UPAK Tahun 2022

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	0	0	0,00%	0	0,00%
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	1.290.700.124	1.289.722.205	99,92%	977.919	0,08%
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	190.032.322	187.116.096	98,47%	2.916.226	1,53%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	0	0	0,00%	0	0,00%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	365.773.799	349.388.110	95,52%	16.385.689	4,48%
			1.846.506.245	1.826.226.411	98,90%	20.279.834	1,10%

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00%	-	0,00%	Penyediaan Meterai, Buku Cek
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.952.596	124.950.450	94,69%	7.002.146	5,31%	Pengadaan ATK, Toner dan Perlatan Lainnya
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.994.183	19.864.560	99,35%	129.623	0,65%	Pengadaan dispenser dan peralatan lainnya
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	11.781.720	11.750.000	99,73%	31.720	0,27%	Pengadaan BBM untuk KDO

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Keterangan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.559.920	33.296.000	96,34%	1.263.920	3,66%	Pengadaan Makanan dan minuman untuk harian pegawai dan untuk tamu
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.415.731	74.394.132	99,97%	21.599	0,03%	Pengadaan PJLP Caraka
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.240.000	35.400.000	83,81%	6.840.000	16,19%	Pengadaan Sewa Mesin Foto Kopi
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.655.310	9.710.418	91,13%	944.892	8,87%	Pemeliharaan dan Perpanjangan STNK KDO
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.674.339	38.522.550	99,61%	151.789	0,39%	Digunakan untuk Pemeliharaan Printer, Komputer dan Scanner
10	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1.290.700.124	1.289.722.205	99,92%	977.919	0,08%	Digunakan untuk Pengadaan PJLP/ Operator pada Loket Pelayanan UPAK
11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	190.032.322	187.116.096	98,47%	2.916.226	1,53%	Digunakan untuk Pengadaan CRO pada Loket Pelayanan UPAK
			1.846.506.245	1.826.226.411	98,90%	20.279.834	1,10%	

Efisiensi pada Dinas, UPT dan Suku Dinas sebagian besar karena Pengadaan menggunakan e-Katalog (Toner, Peralatan Mesin yang didalamnya merupakan pengadaan Komputer, Laptop, Printer, Scanner dan Peralatan Lainnya, Sewa Mesin Foto Kopi) dan Pendagaan dengan Lelang (Pengadaan KIA, Pemeliharaan Gedung), sementara pengadaan lainnya menggunakan pengadaan langsung dan swakelola terdapat efisensi namun tidak signifikan. Sisa mati pada Penyediaan Gaji cukup besar dikarenakan untuk mengantisipasi pengisian jabatan yang kosong serta untuk Pembayaran Telpon, Air dan Listrik sisa mati karena untuk mengantisipasi terhadap kenaikan Tarif Dasar untuk Telpon, Air dan Listrik

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian kinerja yang sesuai target maupun melebihi target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan mulai dari penyusunan Renstra hingga penyusunan program, kegiatan dan anggaran setiap tahunnya serta tidak terlepas juga dari tanggung jawab seluruh pegawai, mulai dari pejabat eselon 3 selaku Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat eselon 4 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sampai dengan pelaksana yang membantu pelaksanaan tugas yang telah diberikan Pimpinan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua tahun 2022 telah ditetapkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2022.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua telah ditetapkan 4 sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2022 yaitu:

- Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk;
- Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang – undangan, dengan indikator kinerja Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk;
- Peningkatan pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan data kependudukan;
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi teknis yang melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan, telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **dapat dikatakan “Berhasil” dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran**. Dengan demikian, pemenuhan target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2022 juga **tercapai**.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban yang diberikan Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan, guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana sebagian besar telah tercapai bahkan jauh diatas target yang telah ditetapkan, para aparatur diharuskan untuk tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta dengan cara :

1. Memaksimalkan teknologi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan terutama bagi warga yang tidak memungkinkan datang ke loket pelayanan. Bisa dalam bentuk pengembangan aplikasi pelayanan secara daring/ online.
2. Pemanfaatan media sosial untuk mensosialisasikan pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring/ Online.
3. Memberikan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman), untuk memberikan motivasi;
4. Memaksimalkan pelayanan mobile dan jemput bola bagi warga disabilitas dan warga lansia;
5. Melakukan evaluasi pelayanan Administrasi Kependudukan secara berkala.

Pada tahun-tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur tahun 2022 :



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

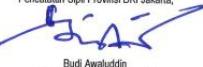
Nama : Budi Awaluddin
NIP : 197801171997111001
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminkuk	e-SAKIP	<p>Definisi: Survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan dukcapil yang dilakukan di loket-loket pelayanan dan instansi pengguna data base kependudukan. Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017.</p> <p>Metode Pengukuran: SKM = Total dan nilai persero per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta</p>	90	90	90	90	90	Indeks
2	Peningkatan terit kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	1	Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminkuk	e-SAKIP	<p>Definisi: Rata-rata dari Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Percentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) 2. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%)</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	88,57	90,5	92	93,29	93,29	Per센
		2	Percentase Kampung Sadar Adminkuk (Kamsa)	e-SAKIP	<p>Percentase kawasan/ kampung/RW yang capaian kepemilikan dokumen adminduk sama dengan atau lebih besar dari target Nasional</p> <p>Metode Pengukuran: Jumlah Kamsa dibagi target kamsa (267 kawasan/ kampung/ RW) dikalikan 100%</p> <p>Sumber Data : Data base kependudukan dan Data Pelayanan Adminkuk</p>	15	30	50	100	100	Per센
3	Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepedulian pembangunan nasional.	1	Percentase Pemanfaatan data kependudukan	e-SAKIP	<p>Definisi: Pemanfaatan data penduduk (agregat, database dan verifikasi data) oleh lembaga/ instansi pengguna data</p> <p>Metode Pengukuran: Instansi pengguna data penduduk / target instansi pengguna data (sebanyak 130 instansi) x 100%</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	N/A	80	90	100	100	Per센
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Percentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penurunan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran minimal 40% apabila serapan anggaran > 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka penilaian bantuan 40% nilai penyerapan anggaran = (Percentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperlakukan meliputi APED dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi. Apabila siswa diolah dengan baik setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa sana adalah selisih telah pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dihitung kembali untuk subkegiatan berikutnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil Inputan PDOKPD</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((Kefisieni X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan output <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) - (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%) <p>Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (dilah)</p>	N/A	N/A	N/A	91	91	Per센
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Percentase penyelesaian rencana aksi Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial Nomor (42)	100%	100%	100%	100%	100%	Percentase
		2	Percentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%	100%	100%	Percentase
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Percentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Percentase

7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Percentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Percentase	
		2	Percentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Percentase	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Percentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Percentase	
Sasaran Khusus												
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah penyrev DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keadilan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundungan dan kecukupan pengukuran (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDF=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat	
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Percentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, januan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makam Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Tel, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Percent	
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Percentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Percentase tersesuainya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Percentase tersesuainya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfo menyusun editorial plan lingkup Provinsi. c) Percentase tersesuainya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <5 jam. d) Percentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20% PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30% PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <5 jam. d) Bobot 30% PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Percent	
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat	
13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Definisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengukuran (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	95	95	95	Nilai
14	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan filer "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e-office". Diperlukan penentuan penanggung jawab aliran E office di seluruh SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada filer "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Percentase	
15	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Percentase	
Sasaran Operasional												
16	Tereselsaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Percentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Percent	
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Percentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Percent	
18	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi lembaga hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Percentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(80% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seluruhnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum dilaksanakan dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Percent	

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

 Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 6 Februari 2022
 Ketua Dinas Kependidikan dan
 Pendidikan Tinggi Provinsi DKI Jakarta,

 Budi Awaluddin
 NIP. 19780117199711001

Lampiran II : Inovasi

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang tertib administrasi kependudukan, telah dilakukan berbagai inovasi guna memudahkan masyarakat Jakarta untuk mengurus dokumen kependudukan. Inovasi dan perbaikan pada tahun 2022 juga mengundang apresiasi dari berbagai pihak.

Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2022

1. Penyelesaian Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai dengan SK Kadis No. 71 Tahun 2022, antara lain :

a) Layanan Administrasi Kependudukan 15 Menit :

- Pencatatan Biodata Penduduk kurang 12 Tahun
- Penerbitan KK
- Penerbitan KTP-el
- Penerbitan KIA
- Legalisasi Dokumen Kependudukan Belum TTE
- Penerbitan Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (STBP2NP)
- Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- Penerbitan Surat Keterangan Lahir-Mati
- Penerbitan Kembali Kutipan hilang rusak yang telah ada surat bukti keabsahan
- Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
- Pencatatan Peristiwa Penting WNI dan Orang Asing

b) Layanan Administrasi Kependudukan 30 Menit :

- Perekaman dan Penerbitan KTP-el
- Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
- Pelaporan Perjanjian Perkawinan
- Pelaporan Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan
- Pencatatan Pengangkatan Anak
- Pencatatan Pengakuan Anak
- Pencatatan Pengesahan Anak
- Perubahan Nama
- Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
- Perubahan Akta Pencatatan Sipil
- Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Pengadilan
- Perubahan Status Kewarganegaraan

c) Layanan Administrasi Kependudukan 60 Menit

- Pencatatan Biodata Penduduk lebih 12 tahun
- Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- Layanan Konfirmasi Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
- Pemanfaatan Data Dan Informasi Kependudukan berupa Data Agregat
- Pelayanan terintegrasi dengan fasilitas Kesehatan/ Pemakaman/ Rumah Ibadah/ Kantor Urusan Agama serta pelayanan pindah datang dalam dan luar DKI Jakarta
- Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dan tanpa Pencatatan Sipil melalui Pengadilan / *Contrarius Actus*
- Penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena Penguinasaan salah satu pihak bersengketa

d) Layanan Administrasi Kependudukan 480 Menit :

- Pemanfatan Akses Data Kependudukan yang telah disetujui oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri

2. Layanan PeDeKaTe

PedeKATE adalah Program Layanan terbaru dari Dukcapil yang bekerjasama dengan Rumah Ibadah agar nantinya Warga DKI yang menikah di Rumah Ibadah yang telah terintegrasi dengan PEDEKATE dapat langsung mendapatkan pelayanan Pencatatan Perkawinan dari Dukcapil.



Kordinasi Kerjasama
Integrasi Pencatatan Perkawinan

Jakarta
kota kolaborasi

PENCATATAN SIPIL

Koordinasi dengan Gereja Santo Robertus
Untuk Kerjasama Integrasi Pencatatan Perkawinan
dengan Sistem "PeDeKaTe" (Paket Dokumen Kawin Tercatat)

@edukapiljakarta

3. Layanan Whatsapp

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta turut mendukung program Pemerintah dalam hal pembatasan social guna menekan penularan penyakit covid-19. Hal yang dilakukan adalah dengan meluncurkan layanan administrasi kependudukan melalui layanan whatsapp di tiap wilayah untuk meminimalisir pelayanan tatap muka langsung :

JAYA RAYA
disduk
capil
Jawara
Jakarta
kota kolaborasi

3 NOMER PELAYANAN

Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

DJAWARA

»»» 0812-8527-7751 «««

(Terkait kendala pada NIK yang tidak terbaca pada layanan publik seperti : BPJS, NPWP dll)

PENGADUAN MASYARAKAT

»»» 0813-1888-2047 «««

(Terkait layanan adminduk)

LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS, SAKIT DAN LANSIA & PUNGLI/GRATIFIKASI

»»» 0812-2225-0781 «««

[f](#) [t](#) [o](#) @dukcapiljakarta | [kependudukancapil.jakarta.go.id](#)



4. KAMSA (Kampung Sadar Administrasi Kependudukan)

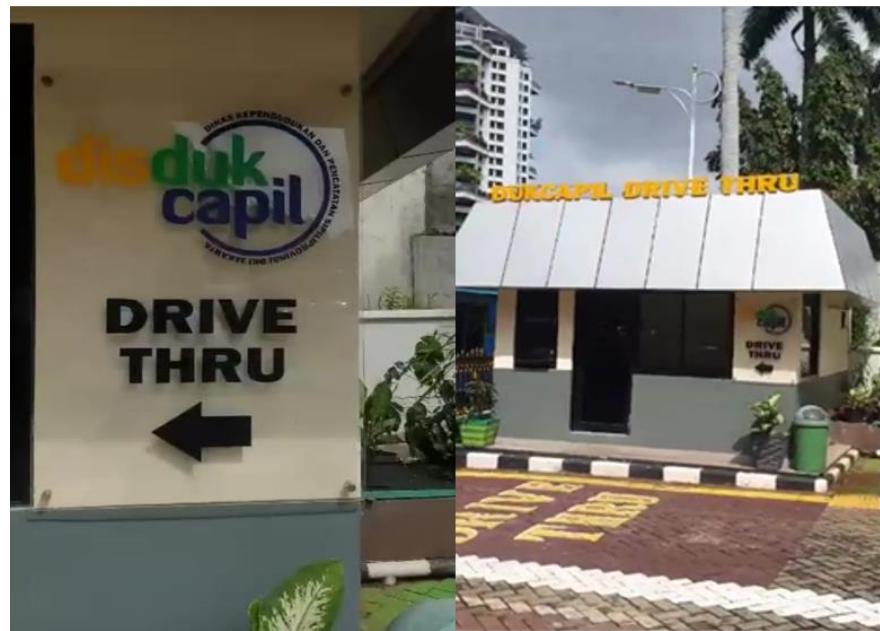
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penganangan Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA). Kegiatan ini bermaksud mewujudkan perilaku warga Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Sadar Pemutakhiran Data Kependudukan, dan Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan.

Penganangan KAMSA dilakukan di masing-masing kota administrasi DKI Jakarta, yaitu di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Kepulauan 1000. Berikut adalah kegiatan penganangan KAMSA yang telah diabadikan di beberapa lokasi :



5. Layanan Drive Thru

Terdapat fasilitas Layanan Drive Thru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan drive thru ditujukan untuk menghemat waktu dan membatasi orang dalam ruangan sehingga bisa mempermudah kebutuhan warga Jakarta dan lebih aman secara prokes karena tidak perlu turun (mengurangi mobilitas dengan orang lain).



6. Layanan Aplikasi Online

Selain itu, Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai macam aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat DKI Jakarta, yaitu :

a. Alpukat Betawi

Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat) adalah mobile apps yang bisa diunduh di ponsel android melalui Google Playstore. Melalui aplikasi ini penduduk dapat mengajukan permohonan layanan, penjadwalan pelayanan, dan memonitor pelayanan yang diajukannya. Pelayanan yang bisa diproses pada aplikasi ini diantaranya pencetakan KTP-el (rusak atau hilang), pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, perubahan biodata, permohonan pindah dan legalisir.



b. SiLaporlagi

SiLaporlagi (Sistem Pelaporan Orang Asing dan Pelaporan Luar Negeri), adalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, berbentuk website dimana pemohon dapat melakukan permohonan secara online yang dapat diakses di website <http://silaporlagi-dukcapil.jakarta.go.id/>. Aplikasi si Lapor Lagi digunakan untuk melakukan pengurusan SKTT secara online, dan hanya datang pada saat pengambilan SKTT.

The screenshot shows the SiLaporlagi dashboard. On the left, there's a sidebar with a list of service items and their last update times:

- JENIS LAYANAN dan PERSYARATAN LAYANAN 3 months ago
- F1.03 Formulir Perpindahan Penduduk 5 months ago
- PERMOHONAN REVISI/CETAK ULANG SKTT 9 months ago
- ALUR LAYANAN SKTT di SILAPORLAGI 9 months ago
- ALUR LAYANAN KK KTP WNA di SILAPORLAGI a year ago
- ALUR REGISTRASI SPONSOR DI SILAPORLAGI a year ago
- F1.02 Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan a year ago
- LAYANAN KONSULTASI a year ago
- WAKTU LAYANAN SILAPORLAGI a year ago
- Apa sih SILAPORLAGI? 2 years ago

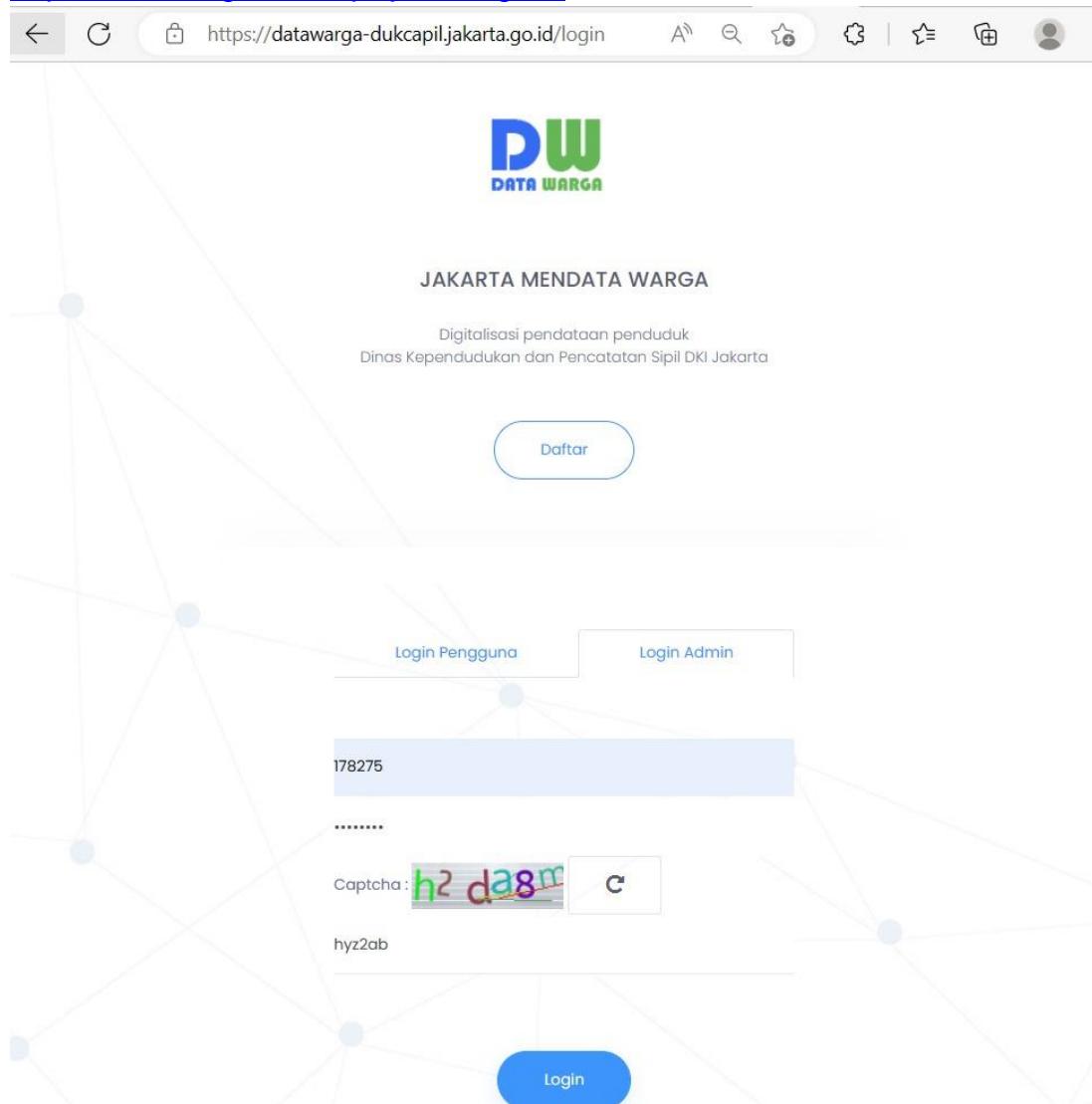
On the right, there's a chart titled "Data Permohonan 2022" showing the number of SKTT, KTP WNA, and EPO applications from January to September. The chart shows a general upward trend for SKTT applications throughout the year.

The advertisement features the DKI Jakarta logo and text:
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA
SKTT ONLINE
silaporlagi-dukcapil.jakarta.go.id
Layanan Informasi SKTT: 089638668323

A cartoon character is shown sitting at a desk with a computer, with a speech bubble saying "Silaporlagi dukcapil.jakarta.go.id". A QR code is displayed with the text "SCAN ME". To the right, a box explains the service: "silaporlagi adalah aplikasi untuk melakukan pengurusan SKTT secara Online, dengan silapor warga DKI Jakarta dapat lebih mudah lagi, karena Sponsor WNA dapat melakukan permohonan SKTT secara online dan hanya datang pada saat pengambilan SKTT". Below this are links for "PENDAFTARAN USER BARU / LOGIN", "ISI FORMULIR DARING PERMOHONAN SKTT", "UNGAG DOKUMEN", "PROSES PENERBITAN SKTI OLEH PETUGAS", "PEMOHON MENDAPAT NOTIFIKASI BAHWA PEMOHONAN TELAH SELESAI", and "AMBIL (SELESAI)".

c. Jakarta Mendata Warga

Aplikasi ini merupakan aplikasi layanan yang memberikan akses kepada perangkat kelurahan, khususnya Ketua RT/RW untuk mendata warga di lingkungannya, pada tahap awal aplikasi ini digunakan untuk mendata warga non permanen di lingkungan RT/RW, warga non permanen yang terdata diarahakan untuk membuat Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) di Kecamatan, Jakarta Mendata Warga dapat diakses di alamat <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id>.



d. Aplikasi SISDUK-PCR

Merupakan pelayanan integrasi dari dinas dukcapil provinsi DKI Jakarta dengan pengadilan agama jakarta barat merupakan ikhtiar dari dukcapil dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat dapat langsung menerima dokumen secara lengkap berupa akte cerai, KTP baru dan KK terbaru dalam satu waktu pengurusan pada sistem dengan aplikasi SISDUK-PCR.



Lampiran III : Penghargaan









PIAGAM PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA:

**Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Administrasi Jakarta Selatan**

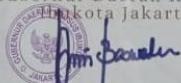
Atas prestasinya sebagai

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI "SANGAT BAIK"

*Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2021*

Jakarta, 12 April 2022

Gubernur Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.



PIAGAM PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SEBAGAI PERAIH

**Komponen Pengungkit Tertinggi Dengan Nilai
35,20 (96,97%)**

*Pelaksanaan Reformasi Birokasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021*

Jakarta, 12 April 2022

Gubernur Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.



PIAGAM PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

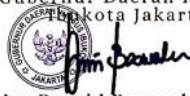
SEBAGAI PERAIH

Predikat AA (95,98)

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021

Jakarta, 12 April 2022

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.





Lampiran IV : Dokumentasi Layanan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta





